

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO **n**ext

Edisi 26
Februari 2021



9 772655 993006

VAKSINASI COVID-19

#VaksinAmanDanHalal

INDONESIA


5000



TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Ferdinandus Setu

**Wakil
Pemimpin Redaksi:**
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Frans Bambang Irawan
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara

Produksi:
Fahmi Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika

Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

Sukseskan Vaksinasi

COVID-19

Vaksinasi COVID-19 sukses, Indonesia sehat, Indonesia bangkit kembali. Inilah harapan kita bersama setelah empat tahap kedatangan Vaksin Sinovac di Indonesia. Pemerintah berhasil mendatangkan 1,2 juta dosis vaksin tahap ke-1 tanggal 6 Desember 2020, tahap ke-2 sebanyak 1,8 juta pada 31 Desember 2020, tahap ke-3 bertambah 15 juta di tanggal 12 Januari 2021, dan tahap ke-4 pemerintah kembali mendatangkan 11 juta dosis pada 2 Februari 2021.

Data Vaksinasi COVID-19 dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) per 18 Februari, jumlah orang yang telah divaksinasi tahap ke-1 sebanyak 1,164,144, dan tahap ke-2 ada 623,832 dari total sasaran Vaksinasi secara nasional sebesar 181,554,465. Melihat perkembangan Vaksinasi yang semakin baik, pemerintah optimis dan pantang mundur untuk memastikan Indonesia segera bangkit dari pandemi COVID-19. Vaksin memang sangat penting saat ini, tetapi kedisiplinan dan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan juga tidak kalah penting.

Presiden Joko Widodo menjadi penerima Vaksinasi pertama. Tahap ke-1 dilakukan pada 13 Januari 2021 dan tahap ke-2 tepat dua minggu setelahnya, yakni 27 Januari 2021. Kepala Negara ingin memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang didatangkan aman untuk digunakan. Untuk lebih meyakinkan masyarakat, jajaran Kabinet Indonesia Maju pun melakukan Vaksinasi setelah Presiden Jokowi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga telah melakukan Vaksinasi tahap ke-1 dan ke-2, masing-masing

di tanggal 18 Januari 2021 dan 01 Februari 2021 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Menteri Kominfo menegaskan tidak ada efek samping setelah melakukan Vaksinasi COVID-19. Artinya, Presiden hingga para Menteri yang secara langsung membuktikan Vaksin COVID-19 aman dan tidak berbahaya. Keyakinan itu juga sekaligus mematahkan asumsi dan ketakutan atas informasi sesat yang tersebar di masyarakat.

Kementerian Kominfo memberikan dukungan penuh dalam menyukseskan Vaksinasi COVID-19 melalui program, kebijakan dan langkah-langkah strategis. Setidaknya ada dua langkah strategis yang disoroti media dan masyarakat sejauh ini. Pertama, Menteri Johnny berhasil melakukan terobosan dengan menyediakan akses internet di 3,126 Fasilitas Layanan Kesehatan hanya dalam jangka waktu 3 bulan. Kedua, Surat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika dengan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19. SKB itu menegaskan keseriusan pemerintah dalam melindungi data pribadi warga negara.

Kekompakan dan kesediaan untuk melakukan Vaksinasi tidak saja dari Pejabat Negara, para tenaga medis yang kita ketahui merupakan pahlawan kesehatan pun membuktikan hal yang sama ini. Satgas COVID-19 menargetkan sasaran Vaksinasi untuk Sumber Daya Manusia Kesehatan sebanyak 1,252,685 penerima. Kini, Vaksin telah didistribusikan ke seluruh pelosok negeri hingga ke desa-desa terpencil. Masyarakat dan tenaga medis tidak lagi terkontaminasi atas informasi sesat itu. Karena Vaksin dan Vaksinasi didukung dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan adalah obat yang paling ampuh menyudahi wabah COVID-19 di Indonesia.

Kepada seluruh pembaca Majalah KominfoNext, edisi kali ini Tim Redaksi mengangkat tema khusus tentang Vaksin dan Vaksinasi COVID-19 yang telah dan akan terus diberikan kepada masyarakat. Kami harap dan mendorong pembaca sekalian untuk bersama-sama menyukseskan Vaksinasi untuk Indonesia Sehat, Indonesia Bangkit dan Indonesia Maju.

Selamat membaca

Ferdinandus Setu
Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat

 @FSetu
  @FSetu
  FSetu TV

Daftar

Isi

2

Surat dari MMB 9

4

Rak Buku

6

KominfoPedia

10

Teknologi &
Gadget

16

Kabar Istana

24

Liputan Utama

50

Jurnal Foto

58

Feature

62

ASN Muda

82

Tim AIS

88

Esai Foto

106

Portal



Perpustakaan Kominfo



Lantai 1 Gedung B
Kementerian Kominfo

Senin s.d Jumat
08.30 s.d 15.30



Penulis :
Emma Sargent, Tim Fearon

Cara Berbicara Kepada Setiap Orang Dalam Setiap Situasi

Kebanyakan dari kita merasa canggung berada dalam situasi tertentu, misalnya saat memasuki ruang yang dipenuhi orang-orang tak dikenal, berbicara di hadapan umum, menghadiri kegiatan sosial, ataupun hanya bertatap muka.

Buku ini mengajarkan kita cara menghadapi berbagai situasi dengan penuh percaya diri, siapapun dan berapapun jumlah orang di dalamnya. Dalam buku ini akan kita temukan strategi untuk selalu tenang dan terkendali dalam suatu acara, ide-ide untuk mengawali percakapan, bagaimana menjalin rasa simpati dengan setiap orang yang Anda temui, mengenali hal-hal yang menghambat rasa percaya diri, serta teknik-teknik mengatasi hambatan tersebut, hingga cara untuk mengalahkan rasa malu, menaklukkan rasa gugup, dan mengatasi kecanggungan.



Penulis :
Ying Lowrey

DIY Life Hacks 99 Cara Bikin Hidup Lebih Mudah

Mungkin kamu pernah punya celana jeans kesayangan, tapi resletingnya sering turun sehingga membuatmu malu. Atau tali sandalmu putus padahal kondisinya masih bagus dan terlalu sayang untuk dibuang. Atau bisa juga kamu sedang buru-buru mau pergi, tapi sepatumu kusam sementara semir di rumah habis.

Buku ini memuat 99 ide kreatif life hack sederhana dan mudah yang bisa kamu praktikan sehari-hari. Dengan sedikit kreativitas, kamu bisa selamat dari berbagai "kondisi darurat" tersebut, dengan cara-cara sederhana dan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarmu.



Penulis :
Hermawan Kartajaya
Arman Hakim Nasution

Inovasi

Inovasi menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0 di samping kolaborasi. Inovasi dikenal dengan istilah hilirisasi, yang secara prinsip melibatkan setidaknya 3 pemain kunci untuk bisa berunjuk kinerja, yaitu akademisi, pengusaha, dan pemerintah. Artinya, inovasi baru bisa efektif apabila mampu mensinergikan 3 unsur tersebut agar dapat mentransformasikan invensi menjadi sebuah inovasi.

Buku ini menguraikan bagaimana sebuah inovasi diciptakan, dikelola, diimplementasikan, dimonitor, dan diukur, sehingga mampu memberikan information dashboard kepada para inovator untuk dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Sumber Foto :

Unsplash





Sejarah Vaksin

Halo SobatKom! Apa kabarnya? Sudah dapat giliran vaksin belum? Mumpung Program Vaksinasi COVID-19 Nasional sedang berjalan, Kominfopedia kali ini juga mau ikut membahas seputar vaksin, tepatnya seputar sejarah penemuan dan pengembangan vaksin.

Semua berawal dari munculnya sebuah virus mematikan di daerah timur laut Afrika, 10.000 tahun yang lalu. Virus ini menyebar melalui udara, menyerang sel-sel kulit, sumsum tulang, hingga menyerang organ limpa dan kelenjar getah bening dari orang yang terinfeksi. Orang tersebut akan mengalami demam, muntah-muntah, dan muncul bintil merah --bercak kecil seperti bekas digigit nyamuk-- di kulitnya. Inilah yang disebut dengan penyakit cacar (*smallpox*).

30% orang yang terkena cacar meninggal pada pekan kedua sejak ia terinfeksi. Sementara mereka yang sembuh, menderita bekas luka bopeng di kulitnya seumur hidup mereka.

Wabah cacar pertama terjadi di tahun 1530 SM, saat peristiwa perang Mesir dengan Kerajaan Het (Hittite). Tawanan Mesir menyebarkan cacar ke bangsa Het, menyebabkan Raja Het wafat, dan menghancurkan peradaban Het. Perlahan, cacar pun mulai menyebar ke seluruh dunia melalui pedagang Mesir, sampai ke tanah Arab saat Perang Salib, hingga mencapai benua Amerika melalui penjajahan Spanyol dan Portugis.

Sejak itu, cacar telah membunuh milyaran manusia. Diperkirakan 300 sampai 500 juta orang meninggal di abad ke-20 akibat cacar. Namun, bukan berarti penyakit mematikan ini tak bisa dikalahkan. Sejarah mencatat, upaya mencegah penularan cacar telah dimulai jauh sebelum munculnya ilmu kedokteran modern, tepatnya pada tahun 1022.

Menurut buku berjudul "The Correct Treatment of Smallpox", seorang Biarawati Buddha yang hidup di Gunung Emei (O Mei Shan) di Provinsi Sichuan, Tiongkok, menggiling keropeng cacar (dari bagian kulit yang sudah mengering) dan meniupkannya ke lubang hidung orang yang sehat. Ia melakukan ini setelah menyadari bahwa orang yang berhasil sembuh dari cacar tak pernah terinfeksi cacar kembali. Pengobatan tak lazim ini pun berhasil. Metode inilah yang disebut dengan Variolasi.

Metode variolasi perlahan berkembang dan mulai dipraktikkan oleh para dokter di tahun 1700-an. Dokter mengambil materi dari luka dan memberikannya ke orang yang sehat dengan cara menggores lengannya sebanyak empat sampai lima goresan. Metode ini cukup berhasil, sebagian besar orang yang telah menjalani variolasi tidak lagi terinfeksi cacar. Namun tetap belum sempurna, karena hampir tiga persen penerima variolasi tetap meninggal, meski sudah terpapar materi dari luka akibat penyakit tersebut.



Solusi pengobatan modern untuk cacar akhirnya muncul dari seorang dokter Inggris bernama Edward Jenner, yang hingga saat ini dikenal sebagai Bapak Immunologi.

Di usia 13 tahun, saat Jenner menjadi asisten dokter bedah dan apoteker di kota Sudbury, Inggris. Jenner mendengar seorang pekerja pemerah susu berkata, "Aku tak akan tertular cacar, karena sudah terkena cacar sapi. Aku tak akan pernah memiliki wajah buruk dan bopeng."

Cacar sapi (Cowpox) adalah penyakit kulit yang menyerupai cacar dan menginfeksi sapi. Jenner menyadari ucapan wanita itu benar, bahwa orang yang pernah terkena cacar sapi tidak lagi terserang Smallpox, sang cacar yang mematikan. Virus cacar dan cacar sapi sebenarnya termasuk dalam satu famili yang sama. Namun, saat virus menginfeksi inang yang tidak dikenal, seperti cacar sapi menginfeksi manusia, maka dampaknya tak lagi mematikan.

Jenner memutuskan untuk menguji apakah virus cacar sapi dapat digunakan untuk perlindungan dari virus cacar. Pada bulan Mei 1776, Jenner bertemu seorang gadis pemerah susu bernama Sarah Nelmes, dengan bekas luka cacar sapi yang masih baru di lengannya. Materi dari bintil luka Sarah kemudian diinokulasi* ke James Phipps yang berusia 8 tahun, anak dari tukang kebun yang bekerja di rumah Jenner.

Setelah mengalami demam dan meriang selama beberapa hari, James mulai berangsur pulih. Lalu, dua bulan setelahnya, James kembali diinokulasi, kali ini menggunakan materi dari luka cacar yang masih baru. Namun tidak ada tanda-tanda kemunculan cacar pada James.

Jenner pun menyimpulkan, pengujian terhadap cacar sapi sebagai perlindungan dari virus cacar telah berhasil. Namun ia tetap menguji coba kembali dengan memberikan materi virus cacar sapi pada beberapa orang lainnya, lalu

memberikan virus cacar berulang kali untuk membuktikan bahwa mereka kebal terhadap cacar.

Melalui metode ini, Jenner menemukan vaksin cacar. Berbeda dengan variolasi yang menggunakan materi asli dari virus cacar untuk membentuk perlindungan pada tubuh, vaksinasi menggunakan virus cacar sapi yang tak terlalu mematikan bagi manusia.

Lembaga kedokteran pun secara hati-hati mendiskusikan metode yang ditemukan Jenner tersebut, hingga akhirnya di tahun 1840 metode vaksinasi diterima dalam ilmu kedokteran, sementara variolasi mulai dilarang di wilayah Inggris.

Kemudian, setelah program vaksinasi cacar besar-besaran selama abad ke-19 dan ke-20, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan dunia bebas cacar di tahun 1979. Dunia bebas cacar merupakan tonggak sejarah kemenangan gemilang umat manusia melawan penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat.

Metode vaksin pun terus dikembangkan untuk mencegah berbagai macam penyakit lainnya. Tahun 1900, dikenal ada dua jenis vaksin virus untuk manusia, yaitu vaksin cacar dan vaksin anti rabies, serta tiga vaksin dari bakteri untuk mencegah tifoid, kolera, dan pes. Lalu di abad ke-20, ditemukan beberapa jenis vaksin lain seperti vaksin pertusis (batuk rejan), vaksin tetanus, vaksin polio, campak, hepatitis B, vaksin demam kuning (*yellow fever*), hingga di tahun 2020 lalu dunia mulai berlomba mengembangkan vaksin untuk virus SARS-CoV-2, virus penyebab penyakit COVID-19.

**Inokulasi*: Tindakan memberikan pustula cacar kepada seseorang, dengan maksud untuk menimbulkan respon ringan terhadap pencegahan penyakit.

Sumber : TED-Ed, "How we conquered the deadly smallpox virus" - Simona Zompi.
<https://in.vaccine-safety-training.org/> "Sejarah Pengembangan Vaksin."

TEKNO LOGI

vac·cine

&

GAD GET

/vak'sēn/

Menguak Teknologi Pembuatan Vaksin

Adagium “mencegah lebih baik daripada mengobati” merupakan salah satu ungkapan yang paling familiar di telinga kita.

Selain mencari dan menyelamatkan korban, tentunya arti ungkapan ini terus berkembang, tidak hanya secara makna literal dalam bidang kesehatan, tetapi juga makna kiasan dari seluruh sendi kehidupan yang merujuk ke pengertian bahwa kita jangan menunggu sesuatu terjadi tetapi buatlahantisipasi. Tapi tenang Sobatkom, kali ini kita hanya akan membahas makna literal ungkapan tersebut, yaitu tentang salah satu upaya umat manusia untuk mencegah timbulnya penyakit melalui vaksinasi. Vaksinasi yaitu proses pemberian vaksin melalui suntikan ataupun ditetaskan ke mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu.



Sumber Foto :

Unsplash



Live Attenuated Vaccine (LAV)

Teknologi LAV sudah ada sejak tahun 1950. Vaksin dengan teknologi ini dikembangkan dari mikroorganisme (bakteri, virus) hidup yang dilemahkan di laboratorium. Bakteri atau virus ini akan tumbuh di tubuh penerima vaksin, namun tidak akan menyebabkan penyakit atau hanya sakit ringan karena sudah dilemahkan. Vaksin LAV ini bekerja dengan merangsang respon kekebalan tubuh seperti halnya ketika tubuh terinfeksi bakteri/virus dari alam.

Dikarenakan teknologi LAV ini menggunakan mikroorganisme hidup yang dilemahkan, secara teori tetap akan ada kemungkinan terkait dengan keamanan dan stabilitas vaksin. Diantaranya bakteri/virus menjadi ganas dan menyebabkan orang jatuh sakit (walaupun sangat jarang terjadi), vaksinasi menjadi tidak efektif untuk orang yang memiliki masalah dengan sistem kekebalan tubuh seperti para penderita HIV-AIDS, serta adanya kemungkinan tercemar dengan virus lain selama proses pengembangan.

Berikut jenis vaksin dengan **teknologi LAV** yang sudah **direkomendasikan World Health Organization (WHO)** :



Vaksin Tuberculosis (BCG)



Vaksin Demam Kuning

Inaktivasi (Antigen Mati) & Subunit (Antigen Murni)

Inaktivasi

Vaksin yang diinaktivasi dibuat dengan mematikan mikroorganisme (bakteri, virus dll) dengan menggunakan bahan kimia atau secara fisik. Karena sudah mati, maka mikroorganisme ini tidak dapat lagi menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Vaksin dengan teknologi inaktivasi memiliki risiko lebih rendah dibandingkan vaksin LAV, karena kemungkinan mikroorganisme menjadi ganas atau menyebabkan penyakit menjadi tidak ada.

Namun, dari sisi keampuhan, vaksin dengan inaktivasi ini memiliki kelemahan, karena seringkali tubuh tidak memberikan respon kekebalan dari rangsangan vaksin, atau jikapun timbul respon, kekebalan yang dihasilkan tidak berlangsung selamanya. Terkadang diperlukan beberapa dosis untuk bisa menimbulkan respon kekebalan yang memadai.

Beberapa vaksin penyakit yang dikembangkan dengan teknologi Inaktivasi yaitu bakteri pertussis dan virus polio.

Subunit (Antigen Murni)

Vaksin yang diinaktivasi dibuat dengan mematikan mikroorganisme (bakteri, virus dll) dengan menggunakan bahan kimia atau secara fisik. Karena sudah mati, maka mikroorganisme ini tidak dapat lagi menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Vaksin dengan teknologi inaktivasi memiliki risiko lebih rendah dibandingkan vaksin LAV, karena kemungkinan mikroorganisme menjadi ganas atau menyebabkan penyakit menjadi tidak ada.

Namun, dari sisi keampuhan, vaksin dengan inaktivasi ini memiliki kelemahan, karena seringkali tubuh tidak memberikan respon kekebalan dari rangsangan vaksin, atau jikapun timbul respon, kekebalan yang dihasilkan tidak berlangsung selamanya. Terkadang diperlukan beberapa dosis untuk bisa menimbulkan respon kekebalan yang memadai.

Beberapa vaksin penyakit yang dikembangkan dengan teknologi Inaktivasi yaitu bakteri pertussis dan virus polio.

Sumber Ilustrasi :

<https://time.com/5887199/coronavirus-vaccine-race/>



Toksoid

Vaksin toksoid dikembangkan dengan memanfaatkan toksin yang dihasilkan oleh bakteri tertentu (tetanus atau difteri). Toksin ini masuk dalam aliran darah dan menyebabkan gejala penyakit. Toksoid atau toksin yang sudah tidak berbahaya akan digunakan sebagai antigen untuk merangsang kekebalan tubuh.

Vaksin toksoid sangat aman karena tidak dapat menyebabkan penyakit yang akan dicegahnya. Selain itu juga, vaksin ini tidak memiliki kemungkinan untuk menjadi virulen atau patogen berbahaya yang bisa menimbulkan penyakit. Namun, untuk bisa mendapatkan reaksi kekebalan yang diinginkan, terkadang diperlukan beberapa dosis dari vaksin toksoid ini atau menggunakan komponen lain untuk meningkatkan khasiat vaksin (ajuvan) seperti garam aluminium atau garam kalsium. Vaksin ini banyak digunakan untuk vaksinasi tetanus dan difteri.

Messenger-RNA (m-RNA)

Teknologi vaksin terbaru ini dikembangkan oleh dua perusahaan Pfizer dan BioNTech untuk mengembangkan vaksin untuk Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. M-RNA merupakan salinan gen yang membawa informasi genetik untuk kemudian menghasilkan protein dan memancing sistem kekebalan tubuh seseorang untuk mengenali virus SARS-CoV-2.

Setelah disuntikkan ke tubuh penerima vaksin, maka m-RNA akan menginstruksikan tubuh untuk memproduksi protein virus corona dalam jumlah besar. Lonjakan dari protein ini akan membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan atau bersifat defensif terhadap virus corona. Penggunaan teknologi m-RNA diklaim bisa membuat produksi vaksin lebih, karena tidak memerlukan virus utuh dalam proses produksinya.

Dikarenakan m-RNA merupakan teknologi baru dan belum pernah diaplikasikan dalam vaksinasi apapun sebelumnya, penelitian dan pengujian terhadap efektivitas dan risiko dari vaksinasi ini masih terus diteliti dan dikaji.



Vaksinasi Sukses, Data Pribadi Aman Lewat Kolaborasi Integrasi



Program Vaksinasi COVID-19 telah dan akan terus didistribusikan ke seluruh Indonesia dengan tujuan untuk menekan angka persebaran sekaligus mengakhiri wabah pandemi. Ketika distribusi dosis vaksin dilakukan, pada saat bersamaan data pribadi penerima vaksin juga tentu harus dilindungi guna menghindari pencurian data pribadi. Lantas bagaimana pemerintah memastikan data pribadi warga negara aman dan terlindungi untuk kebutuhan vaksinasi?

Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan PT Telkom Indonesia menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan uji coba Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19. Menteri Kominfo Johnny G. Plate mengatakan bahwa selain mengintegrasikan aplikasi dan *database*, Satu Data Vaksinasi COVID-19 juga dilengkapi mekanisme verifikasi dan keamanan data pribadi.

"Sistem Informasi ini dibuat karena pemerintah percaya bahwa keamanan dan keefektifan vaksin juga perlu didukung oleh sistem manajemen vaksinasi yang aman dan komprehensif, serta prosedur yang efisien," ujar Menteri Kominfo dalam keterangan untuk pekerja media mengenai Uji Coba Satu Data Vaksinasi di Puskesmas Jurangmangu, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (12/01/2021).

Menurut Menteri Johnny, uji coba ini ditujukan untuk memantau kesiapan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. "Saya berkunjung ke Puskesmas Jurangmangu Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam rangka persiapan akhir sebelum dilakukannya proses Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Melalui uji coba yang baru saja dilakukan, saya ingin menyampaikan ke rekan-rekan pers bahwa sistem informasi ini telah siap digunakan untuk program vaksinasi COVID-19," ungkapnya.

Kolaborasi



Integrasi

Dalam kunjungan itu, Menteri Kominfo menyaksikan tahapan proses vaksinasi yang dalam tahap pertama ini ditujukan untuk petugas kesehatan dan pendukungnya. "Hari ini yang disaksikan di sini yang dilihat bahwa prosedur vaksinasi dalam 7 tahap dan melewati 4 desk. Di Puskesmas semuanya tersedia dan dilakukan dengan baik juga," tuturnya.

Menurut Menteri Johnny, selama program Vaksinasi COVID-19, Puskesmas dilengkapi dengan fasilitas akses internet dengan *bandwidth* yang cukup agar proses vaksinasi dapat dilakukan dengan baik. "Pendataan dalam rangka Satu Data Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan dengan baik dan benar. Proses ini harus dilakukan mengingat vaksinasi dilakukan dalam dua dosis. Kali ini dosis pertama dan dalam jangka waktu dua minggu atau 14 hari akan dilakukan vaksinasi yang kedua," jelasnya.

Menteri Kominfo juga menjelaskan proses vaksinasi sudah siap dan akan dilaksanakan bertahap dimulai dari tenaga medis dan tenaga pendukung. "Setelah siap untuk melakukan vaksinasi, sistem teknologi informasi dan digital juga telah siap dalam rangka mendukung vaksinasi," ungkapnya.

Integrasikan Data

Menteri Johnny menyatakan kesiapan Sistem Satu Data Vaksinasi COVID-19 mencakup integrasi data, sistem keamanan, dan mekansime verifikasi.

“

Sistem Satu Data Vaksinasi COVID -19 mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga untuk menghasilkan sistem yang komprehensif, baik untuk tahap pendaftaran, distribusi, pelaksanaan, hingga monitoring pelaksanaan vaksinasi pertama dan kedua.

Dalam kunjungan itu, Menteri Kominfo menyaksikan tahapan proses vaksinasi yang dalam tahap pertama ini ditujukan untuk petugas kesehatan dan pendukungnya. "Hari ini yang disaksikan di sini yang dilihat bahwa prosedur vaksinasi dalam 7 tahap dan melewati 4 desk. Di Puskesmas semuanya tersedia dan dilakukan dengan baik juga," tuturnya.

Menurut Menteri Johnny, selama program Vaksinasi COVID-19, Puskesmas dilengkapi dengan fasilitas akses internet dengan *bandwidth* yang cukup agar proses vaksinasi dapat dilakukan dengan baik. "Pendataan dalam rangka Satu Data Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Proses ini harus dilakukan mengingat vaksinasi dilakukan dalam dua dosis. Kali ini dosis pertama dan dalam jangka waktu dua minggu atau 14 hari akan dilakukan vaksinasi yang kedua," jelasnya.

Menteri Kominfo juga menjelaskan proses vaksinasi sudah siap dan akan dilaksanakan bertahap dimulai dari tenaga medis dan tenaga pendukung. "Setelah siap untuk melakukan vaksinasi, sistem teknologi informasi dan digital juga telah siap dalam rangka mendukung vaksinasi," ungkapnya.

1

Aplikasi PeduliLindungi dari Kementerian Kominfo dan Kementerian BUMN yang digunakan dalam *tracking-tracing-fencing* akan digunakan untuk melakukan registrasi ulang bagi masyarakat penerima vaksin;

2

Aplikasi PrimaryCare dari BPJS Kesehatan yang telah digunakan di berbagai fasilitas kesehatan sejak 2014 juga akan digunakan untuk melakukan pencatatan hasil vaksinasi; dan

3

Aplikasi SMILE dari Kementerian Kesehatan dan United Nations Development Program (UNDP) digunakan untuk melakukan monitoring distribusi vaksinasi dari tingkat provinsi hingga ke setiap fasilitas layanan kesehatan (*fasyankes*).

“

Perlu kami tekankan bahwa **sistem keamanan dan kebijakan privasi ketiga aplikasi ini sudah terbukti aman** dan masyarakat tidak perlu khawatir, terutama dalam melakukan registrasi ulang melalui **aplikasi PeduliLindungi**



Jamin Keamanan Data

Dalam acara tersebut, Menteri Johnny menyatakan sore ini akan dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kominfo dan Menteri Kesehatan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keamanan sistem *database* Satu Data Vaksinasi COVID-19. "Kementerian Kesehatan akan bertindak sebagai wali data dan Kementerian Kominfo berwenang dalam perlindungan data pribadi," ujarnya.

Menteri Kominfo mengharapkan dengan adanya SKB itu akan dapat semakin meningkatkan kepercayaan juga keyakinan masyarakat akan vaksin dan tata kelola vaksinasi oleh Kementerian Kesehatan serta kementerian dan lembaga lainnya.

"Saya juga berharap, rekan-rekan media sekalian juga terus melakukan pemberitaan yang aktual, faktual, dan kredibel, terutama dalam menyukseskan upaya vaksinasi yang aman, lancar, juga efektif," harapnya.

Mengutip slogan Kementerian Kesehatan, Menteri Johnny mengajak pekerja media untuk menggaungkan semangat vaksinasi yang aman, imun dan taat protokol kesehatan.

"Mari kita gaungkan spirit vaksinasi yang aman, imun, dan taat protokol kesehatan:

vaksin terjamin keamanannya, vaksin menciptakan imunitas, dan efektivitas vaksin harus dibarengi dengan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun," ungkapnya.

Dalam acara kunjungan Uji Coba Satu Data Vaksinasi di Puskesmas Jurangmangu, Menteri Kominfo didampingi oleh Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany dan pejabat di lingkungan Kota Tangerang Selatan.

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyampaikan terima kasih atas bantuan Kementerian Kominfo untuk memperlancar proses vaksinasi. "Terima kasih banyak tentunya Pak Menteri, mudah-mudahan ini bisa membantu dan memperlancar proses untuk ada tahapannya," tuturnya saat memberikan keterangan pers.

Menurut Walikota Airin, saat ini Tangerang Selatan memiliki 1.0461 orang tenaga medis dengan 67 fasilitas kesehatan. "Ini baru tahap yang pertama yang tentu 14 hari kemudian untuk penyuntikan di tahap berikutnya. Setelah petugas medis divaksinasi, baru untuk yang lain dan ke masyarakat. Teman-teman wartawan bantu kami untuk bisa menyosialisasikan bahwa fokus utama untuk vaksin sekarang ini di wilayah Tangerang Selatan," ungkapnya.

Pengembangan Vaksin

Selain aplikasi terintegrasi, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo melalui Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI juga telah menyelesaikan penyediaan akses Internet 3.126 titik fasyankes yang sebelumnya tidak terfasilitasi dengan baik.

"Penyelesaian ini menggenapi tersedianya akses Internet di seluruh 13.011 fasyankes di Indonesia. Adanya akses Internet ini menjadi tulang punggung yang penting untuk pelayanan kesehatan dan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia," jelasnya.

Selain itu, menurut Menteri Kominfo, pemerintah juga telah melengkapi sistem digital dengan mengerahkan Satuan BABINSA dari TNI dan Satuan BABINKAMTIBMAS dari POLRI untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi di lapangan.

"Secara khusus, satuan pasukan ini akan membantu melakukan verifikasi dan registrasi ulang secara *offline* (luar jaringan/ luring) bagi masyarakat yang kesulitan mengakses kanal registrasi *online* (daring) PeduliLindungi," paparnya.

Presiden Jokowi:

Pengendalian Laju Penyebaran Virus Jadi *Prioritas Utama*



Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pengendalian penyebaran virus COVID-19 harus menjadi prioritas utama dalam upaya mengatasi pandemi saat ini.

Pada forum ini, Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada walikota seluruh Indonesia yang dengan pemerintah pusat bergerak bersama-sama menangani pandemi COVID-19 baik dampak kesehatan maupun dampak di bidang sosial dan ekonomi.

Namun, ia menegaskan, pandemi belum berakhir dan semua pihak harus terus bekerja keras dalam upaya untuk pulih dan bangkit. "Kita juga harus semakin detail untuk menemukan cara-cara baru dalam mengatasi permasalahan dan bahkan memanfaatkan kondisi krisis ini untuk meraih kemajuan yang signifikan," ujarnya.

Terkait upaya pengendalian laju penyebaran virus, Kepala Negara kembali menegaskan tentang pentingnya disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. "Saya kira berulang-ulang sudah saya sampaikan, disiplin **3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak)** harus tetap digaungkan kepada masyarakat. Pemda, saya sudah perintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri, akan dibantu oleh aparat TNI dan Polri di daerah," tegasnya.

Lebih lanjut Presiden mencontohkan, imbauan disiplin protokol kesehatan seperti memakai masker harus diimbangi dengan pemberian masker bagi yang memerlukan. "Jangan hanya juga menyuruh pakai masker kepada masyarakat, tetapi harus sekarang saya tambah perintahnya, juga harus bagi masker karena banyak rakyat kadang juga tidak mampu untuk beli masker. Selain menyuruh pakai masker, mengimbau pakai masker, tapi juga bagi masker," ujar Presiden.

Dalam upaya pengendalian laju kasus COVID-19, Presiden juga mengungkapkan Pemerintah terus berupaya meningkatkan 3T (*testing, tracing, dan treatment*). "Tes, lacak, kemudian isolasi, ini penting. Ini sudah dua minggu ini saya tekankan terus masalah ini, tetapi yang paling penting adalah pelaksanaan di lapangan," ujarnya.

Presiden meminta pemerintah daerah (pemda) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, TNI, dan Polri dalam mengambil langkah jika terdapat kasus positif di wilayahnya. Kepala daerah juga diminta melakukan pemetaan zonasi penyebaran COVID-19 secara detail.

“Jika dirasa perlu ini PPKM bisa dilakukan tetapi dalam skala mikro, dalam lingkup yang kecil. Baik itu dalam skala kampung, skala desa, RW atau RT saja.”

Pemda juga harus memperhatikan ketersediaan tempat tidur perawatan di rumah sakit dan obat-obatan maupun kesiapsiagaan tenaga medis dalam melakukan perawatan pada pasien COVID-19.



**“
Pengendalian laju
penyebaran virus harus
menjadi prioritas utama
kita.”**

Manajemen **Vaksinasi**

Dalam sambutannya, Presiden juga menegaskan pentingnya mempersiapkan manajemen untuk percepatan vaksinasi di daerah. Pemerintah telah memulai program vaksinasi COVID-19 yang diberikan secara gratis dengan target lebih kurang 181,5 juta penduduk Indonesia. Saat ini tengah dilaksanakan tahap pertama vaksinasi dengan prioritas tenaga kesehatan yang akan segera dilanjutkan untuk sektor lainnya.

“Mulai minggu depan ini sudah mulai masuk ke pelayan publik yang sering berhubungan dengan masyarakat.”

Vaksinasi segera dilakukan pada sektor dengan interaksi dan mobilitas tinggi dengan pendekatan klaster bukan orang per orang. “Perencanaan secara detail ini harus dimulai, dipetakan. Kalau vaksin datang dalam jumlah banyak itu siapa dulu yang didahulukan. Jangan lupa yang untuk yang rentan, utamanya yang lanjut usia itu menjadi prioritas,” ujarnya.

Kepala Negara juga meminta pemerintah daerah untuk mempersiapkan secara matang vaksinator untuk pelaksanaan vaksinasi ini. “Pemerintah daerah, pemerintah kota, harus mempersiapkan betul vaksinator. Berapa jumlah vaksinator di kota kita dan juga manajemen vaksinasinya di lapangan,” tandasnya.

Sumber : <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-pengendalian-laju-penyebaran-virus-jadi-prioritas-utama/>

Presiden Jokowi Terima Suntikan **Dosis Kedua** Vaksin COVID-19

Presiden Joko Widodo menerima suntikan dosis kedua vaksin COVID-19 pada Rabu, 27 Januari 2021, di sisi barat halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. Dua minggu lalu, tepatnya pada 13 Januari 2021, Presiden menjadi orang pertama yang menerima suntikan dosis vaksin dalam program vaksinasi massal secara gratis di Indonesia.

Sama halnya dengan prosedur vaksinasi sebelumnya, dalam pelaksanaan kali ini, Presiden tetap terlebih dahulu melakukan sejumlah tahapan. Sekira pukul 08.25 WIB, Kepala Negara tampak menempati meja registrasi untuk melakukan validasi data. Selanjutnya, Kepala Negara juga melalui tahap penapisan kesehatan seperti pengukuran suhu tubuh, tekanan darah, dan pemeriksaan riwayat kesehatan untuk memastikan penerima vaksin berada dalam kondisi



prima dan layak mengikuti vaksinasi untuk dosis kedua ini.

Prof. dr. Abdul Muthalib, Sp.PD-KHOM. kembali bertindak selaku vaksinator kepada Presiden Joko Widodo. Selama pelaksanaan vaksinasi, Wakil Ketua Dokter Kepresidenan tersebut dibantu oleh M. Sokheh, S.Kep., Ns. selaku Ners.

“Sama seperti yang dilakukan dua minggu lalu, tidak terasa (saat penyuntikan). Kalau dulu setelah dua jam hanya pegal-pegal, kalau sekarang saya kira sama saja,” ujar Presiden selepas menerima suntikan dosis kedua vaksin.

Vaksin yang disuntikkan kepada Presiden dan para penerima vaksin lainnya di seluruh Indonesia hingga saat ini ialah vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co.Ltd. yang di Indonesia bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero).

CoronaVac telah mengantongi izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM) setelah melalui sejumlah uji klinis yang melibatkan sebanyak 1.620 relawan di Bandung. Majelis Ulama Indonesia juga telah menyatakan bahwa vaksin tersebut suci dan halal sehingga dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.

Vaksin CoronaVac, sebagaimana vaksin-vaksin COVID-19 lain yang tersedia saat ini, membutuhkan dua dosis penyuntikan bagi tiap masing-masing penerima untuk memperkuat respons imun dari suntikan dosis pertama. Sebanyak 0,5 mililiter dosis vaksin disuntikkan di masing-masing penyuntikan.

Untuk diketahui, sejumlah perwakilan yang mendapatkan dosis pertama vaksin bersama Presiden pada dua minggu lalu dan dinyatakan memenuhi syarat kesehatan untuk mengikuti vaksinasi kembali hadir untuk menerima penyuntikan dosis kedua.

Nama-nama perwakilan tersebut yang hadir mengikuti vaksinasi sesi pertama bersama Presiden pagi ini ialah Daeng Mohammad Faqih (Ketua Umum PB IDI), Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI sekaligus mewakili Muhammadiyah), Ahmad Ngisomudin (Rois Syuriah PBNU), Marsekal Hadi Tjahjanto (Panglima TNI), Jenderal Pol. Idham Azis (Kapolri), dan Raffi Ahmad (perwakilan anak muda).

Selain enam orang di atas, sejumlah perwakilan juga tampak hadir pada vaksinasi pertama dalam sesi-sesi setelahnya. Mereka yang hadir tersebut ialah Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Unifah Rosyidi (Ketua Umum PGRI), Ronald Rischard Tapilatu (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), dan Romo Agustinus Heri Wibowo (Konferensi Waligereja Indonesia).

Selain itu, turut pula perwakilan lainnya yakni Penny Kusumastuti Lukito (Kepala BPOM), Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Kadin), Ade Jubaedah (Sekjen Ikatan Bidan Indonesia), Harif Fadhillah (Ketua Umum DPP PPNI), Agustini Setiyorini (perwakilan buruh), dan Narti (perwakilan pedagang).

Di samping itu, tampak Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito dan dr. Reisa Broto Asmoro turut serta mengikuti vaksinasi dosis kedua ini.

Selepas penyuntikan vaksin, baik kepada Presiden maupun para perwakilan, terlebih dahulu dilakukan observasi selama 30 menit untuk memantau kemungkinan Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (KIPI). Seluruh penerima vaksin juga diberikan sosialisasi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sumber : <https://ksp.go.id/presiden-jokowi-terima-suntikan-dosis-kedua-vaksin-covid-19.html>



Bansos, Insentif, Hingga Vaksinasi Jadi Upaya Pemerintah Tangani Pandemi



Presiden Joko Widodo memastikan bahwa bantuan sosial dan sejumlah insentif lain bagi masyarakat terdampak pandemi serta para pelaku UMKM akan terus bergulir di tahun 2021 ini.

Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam jangka pendek untuk menghadapi masa pandemi COVID-19 sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden saat menjadi pembicara kunci dalam Kompas100 CEO Forum Tahun 2021 pada Kamis, 21 Januari 2021.

"Akan kita teruskan yang berkaitan dengan bantuan sosial untuk yang tidak mampu. Kemudian yang berkaitan dengan bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah entah itu insentif pajak atau bantuan modal darurat," ujarnya secara virtual dari Istana Negara, Jakarta.

Pemerintah juga akan memberikan perhatian bagi masyarakat yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja melalui salah satu program pemerintah, Kartu Prakerja. Semua program dan upaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu meringankan beban yang dirasakan oleh mereka yang terdampak pandemi saat ini.

Sementara dari sisi penanganan kesehatan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedisiplinan terhadap protokol kesehatan masih menjadi strategi

utama bagi penanganan pandemi yang juga menjadi upaya jangka pendek pemerintah.

"Bapak/Ibu (CEO) harus berbicara kepada karyawan-karyawannya. Gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT dan RW nya harus berbicara kepada rakyat kita betapa penting yang namanya disiplin terhadap protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan," tuturnya.

Kedisiplinan tersebut juga akan diikuti pemerintah pusat dan daerah dengan membenahi persoalan *testing, tracing, dan treatment* sebagai salah satu bagian dari upaya penanganan di bidang kesehatan.

Terkini, pemerintah telah memulai pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 secara gratis yang pada tahap pertama ini memprioritaskan para tenaga kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Kepala Negara mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar dan pengalaman yang banyak melalui program-program serupa yang telah berjalan bertahun-tahun lamanya.

"Kita punya kekuatan: 30 ribu vaksinator, kurang lebih 10 ribu puskesmas, dan lebih dari 3 ribu rumah sakit yang bisa kita gerakkan. Kita memiliki puskesmas yang setiap tahunnya juga melakukan imunisasi kepada anak-anak kita," kata Presiden.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/bansos-insentif-hingga-vaksinasi-jadi-upaya-pemerintah-tangani-pandemi/>

Presiden Jokowi Sidak Vaksinasi Massal Pedagang di Pasar Tanah Abang



Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu, 17 Februari 2021, melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelaksanaan vaksinasi COVID-19 massal untuk para pedagang. Vaksinasi massal yang digelar di Pasar Tanah Abang, Jakarta, tersebut dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Vaksinasi ini merupakan lanjutan dari program vaksinasi massal nasional yang telah dimulai sejak 13 Januari 2021 yang lalu. Pada tahapan pertama, vaksinasi dilakukan dengan menyorot sumber daya manusia di bidang kesehatan. Adapun vaksinasi tahapan kedua kali ini menyorot para pelayan dan pekerja publik.

"Tahapan kedua yang dimulai hari ini di Pasar Tanah Abang, DKI Jakarta, atas kerja sama antara Kementerian Kesehatan dan Provinsi DKI Jakarta, kita memulai vaksinasi untuk pelayan publik dan pekerja publik yang di dalam kalkulasi kami ada 16,9 juta yang nanti akan divaksin di seluruh Indonesia, plus 21,5 juta

untuk yang lanjut usia. Ini tahapan kedua yang ingin kita kerjakan," ujar Presiden dalam keterangannya selepas peninjauan.

Dalam sidak tersebut, Presiden tampak tiba di Pasar Tanah Abang sekitar pukul 08.52 WIB dan langsung menuju lokasi vaksinasi digelar bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut Presiden, vaksinasi yang digelar telah berjalan dengan baik dan diharapkan akan menyorot lebih banyak lagi target vaksinasi selain pedagang.

"Tadi sudah kita lihat semuanya berjalan dengan baik, manajemen lapangannya sangat baik. Kita harapkan para pekerja dan pelayan publik, baik itu aparat keamanan, para pedagang pasar, wartawan, atlet, juga pekerja-pekerja di toko dan mal semuanya akan divaksinasi," jelasnya.



Setelah dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, Presiden menjelaskan, kegiatan vaksinasi massal bagi pelayan dan pekerja publik juga akan dilakukan di provinsi-provinsi lain sehingga tiap hari jumlah orang yang divaksin akan terus bertambah. Presiden pun kembali mengingatkan akan pentingnya untuk disiplin menjalankan 3M sejalan dengan vaksinasi yang terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pandemi COVID-19.

Untuk diketahui, vaksinasi bagi para pedagang di Pasar Tanah Abang ini telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari pendataan, sosialisasi, hingga penapisan kesehatan pra-vaksinasi. Adapun jumlah sasaran vaksinasi pedagang Pasar Tanah Abang seperti yang terdata di PD Pasar Jaya adalah sebanyak 9.729 orang.

<https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/bansos-insentif-hingga-vaksinasi-jadi-upaya-pemerintah-tangani-pandemi/>

“
Terakhir, jangan lupa tetap selalu saya sampaikan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan jangan kita lupakan.”



Mengenal Vaksinasi di Indonesia



Dari Tahapan, Target,
hingga Alur Pendaftaran

Setelah dirundung pandemi COVID-19 hampir setahun ini, Indonesia patut sedikit berlega hati. Pasalnya, program vaksinasi secara gratis yang disebut-sebut menjadi salah satu penangkal merebaknya wabah virus Corona, telah resmi dimulai pada Januari minggu kedua awal tahun ini.

Kepastian berjalannya program vaksinasi tersebut diperoleh setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat terhadap vaksin berdasarkan hasil uji klinis tahap tiga di Bandung dan data-data saintifik lainnya. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi ini.

Mengutip sebuah unggahan di Instagram @kemenkominfo, BPOM memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergensi (Emergency Use Authorization/EUA) untuk vaksin COVID-19 yang pertama kali kepada vaksin CoronaVac, produksi Sinovac Biotech Inc. yang bekerja sama dengan PT. Biofarma.

"Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi dengan dukungan data dan bukti ilmiah yang menunjang aspek keamanan, khasiat dan mutu dari vaksin dan mengacu kepada panduan dari WHO dalam pemberian persetujuan EUA," ungkap admin IG Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (12/01/2021).

Melansir laman covid19.go.id, sebanyak 15 juta bahan baku vaksin COVID-19 dari Sinovac tiba di Indonesia pada 12 Januari 2021 lalu. Sebelumnya Pemerintah Indonesia juga telah mendatangkan vaksin COVID-19 Sinovac dalam dua tahap, yaitu 1,2 juta dosis pada 6 Desember 2020, dan 1,8 juta dosis pada 31 Desember 2020.

Lima belas juta bahan baku vaksin ini selanjutnya akan diproses oleh Bio Farma dalam jangka waktu satu bulan sehingga pada bulan Februari ini akan didapatkan 12 juta vaksin jadi.

Vaksin tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, pukul 12:20 WIB menggunakan pesawat Boeing 777-300ER dari maskapai Garuda Indonesia.

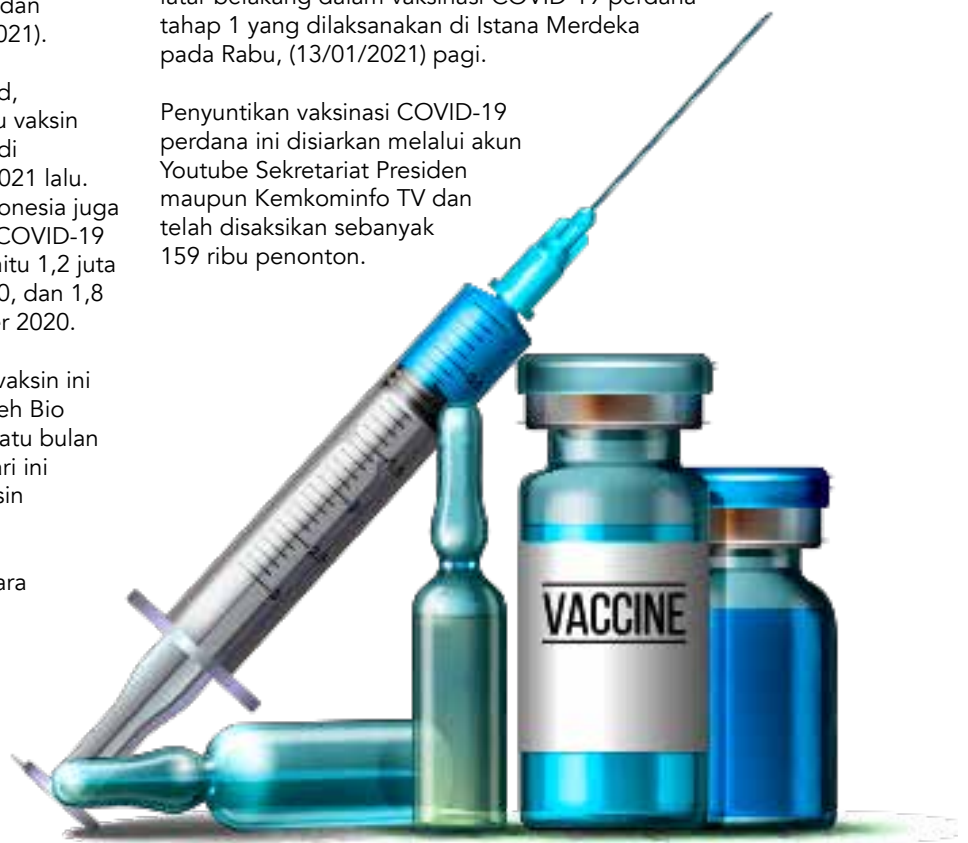
Vaksin COVID-19 produksi Sinovac dan Bio Farma telah mendapatkan persetujuan penggunaan darurat (EUA) dari Badan POM,...

Hadir saat penjemputan vaksin di Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, didampingi oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiাপutra, yang menyaksikan proses *unloading 9 envirotainer* ke gudang penyimpanan, kemudian dibawa dengan 3 truk pengangkut ke PT Bio Farma (Persero) di Bandung untuk proses selanjutnya.

"Vaksin COVID-19 produksi Sinovac dan Bio Farma telah mendapatkan persetujuan penggunaan darurat (EUA) dari Badan POM, dan juga telah mendapatkan fatwa halal dan suci dari Majelis Ulama Indonesia," tulis laman covid19.go.id

Oleh karena itu, guna memberikan kepercayaan pada masyarakat, Presiden RI Joko Widodo menepati janjinya kepada publik sebagai figur pertama yang mendapatkan suntikan vaksin. Bersama Presiden sebagai penerima vaksin pertama, turut serta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang dalam vaksinasi COVID-19 perdana tahap 1 yang dilaksanakan di Istana Merdeka pada Rabu, (13/01/2021) pagi.

Penyuntikan vaksinasi COVID-19 perdana ini disiarkan melalui akun Youtube Sekretariat Presiden maupun Kemkominfo TV dan telah disaksikan sebanyak 159 ribu penonton.



Acuan Informasi bagi Masyarakat



Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam sebuah konferensi pers beberapa waktu lalu menilai Indonesia menjadi salah satu negara yang menunjukkan langkah konkret yang cepat dengan menghadirkan vaksin COVID-19 di Tanah Air. Oleh karena itu, Pemerintah akan memastikan informasi disampaikan kepada masyarakat secara akurat, kredibel serta proaktif.

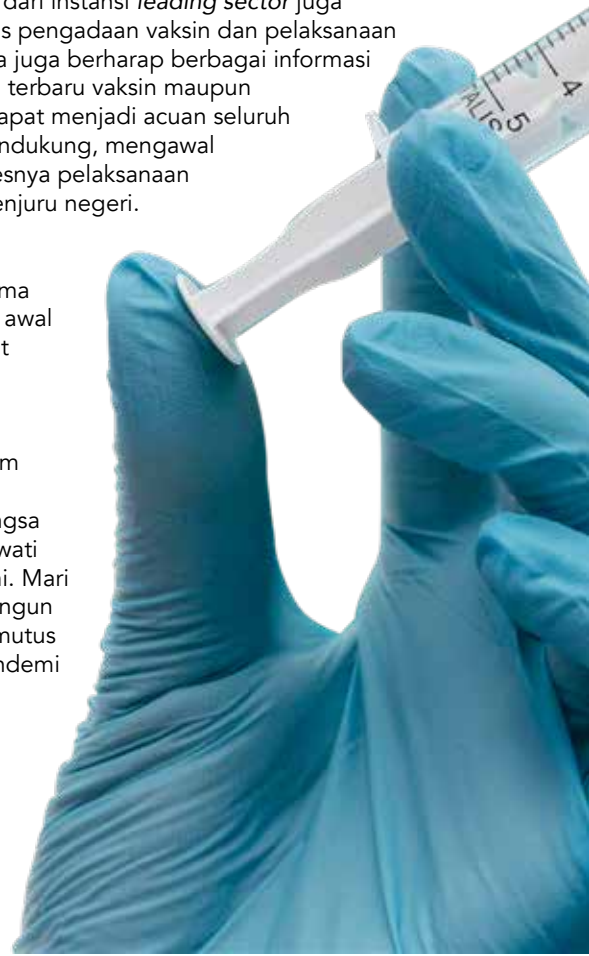
Menteri Johnny menjelaskan upaya ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk terus mendorong percepatan penanggulangan pandemi COVID-19 demi kesehatan pulih ekonomi bangkit.

“Pemerintah memastikan bahwa informasi terkait kedatangan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan terus disampaikan kepada masyarakat secara akurat, kredibel serta proaktif,” tegasnya.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bersama Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Kementerian Kominfo menjadi salah satu platform yang mengawal dan memberikan informasi terkait penanganan COVID-19, vaksin dan vaksinasi COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Melalui konferensi pers itu, Menteri Kominfo menegaskan bahwa para pimpinan dari instansi *leading sector* juga terus mengawal proses pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Ia juga berharap berbagai informasi terkait perkembangan terbaru vaksin maupun vaksinasi COVID-19 dapat menjadi acuan seluruh masyarakat dalam mendukung, mengawal dan mendorong suksesnya pelaksanaan vaksinasi di seluruh penjuru negeri.

“Kedatangan vaksin COVID-19 yang pertama ini adalah momentum awal yang perlu kita sambut dengan energi positif, serta semangat yang optimistis. Kita semua tahu bahwa momentum ini dapat memberikan daya dorong bagi bangsa Indonesia untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Mari bersama-sama kita bangun optimisme dalam memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19,” ajaknya.



Mekanisme Vaksinasi dan Tahapan bagi Peserta

Sementara terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana program vaksinasi COVID-19, Menteri Johnny melakukan peninjauan ke Puskesmas Jurang Mangu Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, Selasa (12/01/2021). Tinjauannya itu dilakukan dalam rangka pengecekan salah satu fasilitas kesehatan milik Kota Tangerang Selatan menerima vaksin COVID-19, maupun pelaksanaan penyuntikannya.

Mengenakan pakaian batik dan jaket biru dengan tulisan PeduliLindungi, Menteri Johnny tiba di lokasi sekitar pukul 14.30 WIB dan disambut oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Setelah penyambutan,

Menteri Johnny berkeliling mengunjungi area Puskesmas Jurang Mangu guna mendengarkan penjelasan mengenai proses tahapan vaksinasi bagi peserta vaksin COVID-19.

Di hadapan Menteri Johnny, Sanitarian Puskesmas Jurang Mangu, Dyna Fairuz Maharani menjelaskan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon penerima vaksinasi. Ia menyebut, untuk tahapan pertama, penerima vaksinasi datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian, pada saat kedatangan calon penerima vaksinasi wajib menggunakan masker/*face shield*, dalam kondisi sehat, dan apabila belum terdaftar, disarankan mengisi data melalui situs atau aplikasi PeduliLindungi.

“Peserta vaksinasi diperiksa suhu tubuhnya, diberikan nomor urut kedatangan dan diminta untuk mencuci tangan. Selanjutnya, peserta vaksinasi menunggu giliran di ruang tunggu yang telah disediakan dengan menerapkan jarak minimal 2 meter dengan penerima vaksinasi lainnya,” ujar Dyna sembari memaparkan mekanisme ketika calon penerima vaksinasi akan datang ke lokasi.

Dalam penjelasannya, ia mengatakan peserta vaksinasi akan dilayani sesuai dengan waktu yang telah tercantum pada aplikasi pada saat melakukan pendaftaran. Setelah itu, petugas meja 1 akan memanggil calon penerima vaksin sesuai dengan nomor urut kedatangan dan memastikan penerima vaksinasi hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan dengan memverifikasi bukti tiket elektronik (*e-ticket*) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Calon penerima vaksin verifikasi data menggunakan aplikasi Pcare vaksinasi. Jika mengalami masalah verifikasi data, bisa dilakukan secara manual (format atau data sasaran diunduh dan dicetak saat pagi hari H pelayanan),” ungkapnya.

Setelah selesai diverifikasi dan datanya sesuai, calon penerima vaksinasi diminta menuju ke meja 2 untuk dilakukan *screening* untuk diperiksa. Usai diperiksa, petugas meja 2 melakukan anamnesa kepada peserta dengan mengajukan 16 pertanyaan untuk melihat kondisi kesehatan dan kondisi penyerta (komorbid), serta melakukan pemeriksaan fisik sederhana.

“Pemeriksaan ini meliputi suhu tubuh dan tekanan darah, lalu setelah proses *screening* selesai dilakukan, petugas meng-*input* data hasil *screening* tersebut ke aplikasi Pcare vaksinasi menggunakan HP/komputer/laptop,” tutur Dyna.

Setelah data dimasukkan, aplikasi akan mengeluarkan rekomendasi hasil *screening* berupa sasaran layak divaksinasi (lanjut), ditunda atau tidak diberikan. Jika ditunda, petugas menyampaikan kepada calon penerima vaksin bahwa akan ada notifikasi ulang melalui SMS *blast* atau melalui aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan registrasi ulang dan menentukan jadwal pengganti pelaksanaan imunisasi. Jika diputuskan untuk lanjut, maka peserta vaksinasi diminta untuk menuju meja 3.

“Jika tidak memungkinkan untuk menginput data langsung ke dalam aplikasi (akses internet tidak ada atau sarana tidak tersedia), maka hasil *screening* dicatat dalam format *screening* untuk kemudian diinput ke dalam aplikasi setelah tersedia koneksi internet,” jelas Dyna.

Untuk tahapan selanjutnya, kata dia, calon penerima vaksin dipersilakan menuju ke meja tiga untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kemudian, antrian kedua dipersilakan untuk pendaftaran di meja 1. Setelah itu, petugas akan menerangkan tentang informasi mengenai vaksin, meliputi jenis vaksin yang akan diberikan, manfaat vaksin, interval pemberian vaksin, tanggal pemberian vaksin pada dosis kedua dan akibat atau efek samping vaksin.

Dyna menerangkan, selesai penyuntikan, petugas puskesmas mengarahkan penerima vaksinasi untuk ke meja 4. Pada tahap itu, petugas menginput nama penerima vaksinasi, NIK, nama vaksin dan nomor *batch* ke dalam aplikasi Pcare vaksinasi.

“Selanjutnya Pak Menteri, petugas memberikan vaksinasi secara intramuskular sesuai prinsip penyuntikan yang aman secara intramuskular di lengan kiri dan menuliskan nama penerima vaksin, NIK, dan nomor *batch* pada sebuah memo yang diberikan kepada penerima vaksin untuk diserahkan kepada petugas di meja 4,” terangnya.

Dyna melanjutkan, di meja 4, petugas memberikan kartu vaksinasi manual dan atau elektronik, serta penanda kepada peserta yang telah selesai divaksin dan mempersilahkan penerima vaksin untuk duduk dan menunggu selama 30 menit di ruang observasi untuk diberikan penyuluhan, serta diberikan media KIE (konseling, informasi, edukasi) tentang pencegahan COVID-19 melalui 3M dan vaksinasi COVID-19.

“Jika 30 menit telah selesai dan tidak ada tanda-tanda KIPI (kejadian ikutan pasca imunisasi), penerima vaksin dipersilakan untuk pulang dan datang kembali guna mendapatkan penyuntikan dosis kedua,” ucapnya.

Apabila terdapat tanda-tanda saat pulang setelah 30 menit seperti gatal, bengkak, sesak ataupun alergi lainnya, penerima vaksin dapat melaporkan gejala-gejala yang timbul ke pihak Puskesmas melalui nomor telepon 021-78381743.

Jika terjadi KIPI, petugas akan melakukan tatalaksana KIPI dan mengisi formulir pelaporan KIPI. Jika terjadi syok anafilaktik, akan dilakukan tindakan sesuai SOP syok anafilaktik oleh tenaga kesehatan. “Petugas vaksinator per sesi melaporkan kepada petugas farmasi, jumlah vaksin yang digunakan, dan mengembalikan sisa vaksin yang tidak terpakai (jika ada),” papar Dyna.

Setelah semua sesi pelayanan selesai, petugas farmasi diwajibkan menginput jumlah vaksin dan logistik yang terpakai ketika aplikasi SMILE dan menyimpan kembali vaksin yang tidak terpakai ke dalam lemari es vaksin dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius.



Siagakan 67 Fasyankes Tangsel

Diberitahukan Melalui SMS Blast

Usai mendengarkan penjelasan dari Petugas Puskesmas Jurang Mangu dan menyaksikan tahapan proses vaksinasi tahap pertama ini yang ditujukan bagi petugas kesehatan dan pendukungnya, Menteri Johnny bersama Walikota Tangsel memberikan keterangan kepada pekerja media terkait dengan agenda kunjungan kerja kali ini.

Menjawab pertanyaan dari salah satu jurnalis media cetak terkait informasi mengenai SMS *blast*, Menteri Johnny mengatakan, pemberitahuan informasi mengenai vaksinasi COVID-19 tahap pertama diberikan melalui layanan SMS secara nasional telah dimulai hari ini dan berlangsung selama dua hari hingga esok, Rabu 13 Januari 2021.

"Setelah didata siapa saja yang akan menerima vaksin, hari ini dan besok akan dilakukan SMS *blast* kepada hampir 1,5 juta penerima vaksin tahap pertama," jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, tenaga kesehatan yang telah terdaftar sebagai peserta akan mendapatkan informasi berupa waktu dan lokasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

"Mereka nanti akan mendapat informasi kapan dan di mana untuk melakukan vaksinasi," ungkapnya.

Dalam kunker vaksinasi di Puskesmas Jurangmangu, Menteri Kominfo didampingi oleh Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany dan pejabat di lingkungan Kota Tangerang Selatan.

Pada kesempatan yang sama, Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany yang datang ke lokasi memakai seragam dinas dilengkapi rompi berwarna biru dengan tulisan COVID-19, menyatakan pihaknya telah menyiapkan 67 fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menjadi lokasi vaksinasi COVID-19.

"Ada 67 fasyankes. Terdiri dari 29 puskesmas salah satunya Jurang Mangu, ditambah 24 rumah sakit umum daerah dan swasta, plus 14 klinik," kata Airin.

Nantinya, jumlah dosis vaksin yang akan dikirimkan ke lokasi vaksinasi akan disesuaikan dengan jumlah peserta. "Nanti setelah ketahuan berapa, misalnya yang memilih di Jurangmangu, Dinas Kesehatan nanti otomatis men-drop untuk vaksinnya," ucap Walkot Tangsel Airin.

Airin menjelaskan, proses penyuntikan vaksin COVID-19 tahap pertama di wilayah Tangerang Selatan akan dimulai pada Kamis, 15 Januari 2021. Ia menyebut, vaksinasi tahap pertama dikhususkan bagi tenaga kesehatan yang totalnya mencapai 10.461 orang.

Namun, wilayah Tangerang Selatan pada saat ini baru akan mendapatkan 8.901 dosis vaksin COVID-19 dari Provinsi Banten. Jadi masih ada kurang dan nanti akan ditambahkan," jelasnya.

Menurut Airin, vaksin jenis Sinovac tersebut dalam proses pengiriman dan akan disimpan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Tangerang Selatan.

"Vaksin dengan jumlah tersebut sedang diambil dari Dinas Provinsi Banten dan diperkirakan hari ini selesai dan disimpan di Storage Dinas Kesehatan," paparnya.

Menyasar Jutaan Penduduk dengan Beragam Profesi

Lebih lanjut, demi mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta agar Kementerian Kesehatan mempersingkat target vaksinasi yang semula 15 bulan menjadi 12 bulan. Presiden Jokowi mengarahkan agar Kemenkes setidaknya melakukan vaksinasi COVID-19 minimal 1 juta dosis per hari.

Pemerintah telah menetapkan tahapan-tahapan terkait program vaksinasi COVID-19. Rencana tahapan tersebut sebelumnya telah dikonsultasikan dengan Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) atau badan independen yang memberikan saran kepada Menteri Kesehatan terkait program vaksinasi di Indonesia.

Tenaga kesehatan menjadi pihak pertama yang berada dalam tahapan vaksinasi tersebut. Di Indonesia saat ini ada 1,3 juta nakes yang tersebar

di 34 provinsi. Pada tahap kedua, diberikan kepada *public workers* yang diperkirakan mencapai 17,4 juta orang. Kemudian, pada tahap terakhir menyasar masyarakat lansia di atas 60 tahun yang jumlahnya 21,5 juta orang.

Guna mencapai target tersebut, Kemenkes melakukan beberapa upaya dan akselerasi seperti menambah fasilitas kesehatan dan pos vaksin, menambah hari dan jam pelayanan vaksinasi di faskes, hingga menambah tenaga vaksinator.

"Yang pertama adalah kita terus berupaya menambah faskes yang mampu memberikan vaksinasi. Jadi kita menambah jumlah fasyankes maupun menambah pos-pos vaksinasi," jelas Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi dalam *workshop* daring yang disiarkan melalui kanal Youtube RSUI, Sabtu (13/02/2021).

Bagi fasyankes yang sudah mampu melaksanakan vaksinasi diharapkan dapat menambah hari dan jam

pelayanan. "Sehingga akan lebih banyak dan tentunya akan lebih setiap hari, tujuh hari dalam seminggu diupayakan setidaknya tetap ada fasyankes yang akan memberikan vaksinasi. Dengan itu kita baru bisa mencapai target 1 juta dosis per hari," beber Siti Nadia.

Menyoal jumlah vaksinator, Siti Nadia mengatakan hingga akhir Januari 2021, ada 40 ribu orang. Jumlah tersebut akan ditingkatkan menjadi 81 ribu orang pada akhir Februari 2021. Dengan demikian, satu orang vaksinator diharapkan dapat melakukan antara 40 sampai 50 suntikan per hari.

Strategi lain yang dilakukan Kemenkes untuk mengejar target vaksinasi 12 bulan yakni memperluas tempat pelaksanaan vaksinasi. Tempat-tempat vaksinasi tersebut terdiri dari lokasi yang berbasis faskes pemerintah dan swasta; berbasis institusi seperti TNI, Polri, perkantoran dan lainnya; vaksinasi massal di ruang-ruang publik seperti di Istora, Sabuga, Graha Saba; serta vaksinasi massal bergerak untuk memudahkan masyarakat mengakses vaksinasi.



Tahap Kedua pada Pertengahan Februari

Saat ini, vaksinasi COVID-19 tahap pertama pada tenaga kesehatan tengah berjalan. Rencananya, vaksinasi tahap kedua bakal dimulai Rabu, 17 Februari 2021. Target vaksinasi COVID-19 tahap kedua dengan total sasaran 38,5 juta orang yakni pada lansia (target 21,5 juta) dan petugas publik (17 juta).

Dalam kesempatan berbeda, Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rononuwu mengatakan vaksinasi COVID-19 pada lansia ditujukan bagi orang di atas usia enam puluh tahun. Sementara petugas publik yang juga akan menerima vaksinasi terdiri pedagang pasar, tokoh agama dan penyuluh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintahan dan aparatur sipil negara.

Penetapan lansia serta pekerja publik sebagai target vaksinasi dengan memperhatikan *roadmap* World Health Organization serta kajian penasihat ahli imunisasi nasional. Selain lansia, kelompok

masyarakat yang masuk dalam tahap kedua ini memiliki interaksi dan mobilitas tinggi sehingga sangat rentan terpapar COVID-19," jelas Maxi dalam konferensi pers daring Vaksinasi COVID-19 Bagi Petugas Pelayanan Publik pada Senin (15/02/2021).

Selanjutnya, di bidang pariwisata ada petugas pariwisata, hotel dan restoran. Kemudian, pelayan publik terdiri dari pemadam kebakaran, pegawai BUMN dan BUMD, Kepala Desa dan perangkat desa.

Atlet, wartawan serta pekerja medis juga termasuk ke dalam prioritas target vaksinasi COVID-19 tahap kedua. Selain itu, ada pula pekerja transportasi publik seperti driver ojek online, masinis, pilot, pramugari, petugas Transjakarta, petugas MRT, kondektur, dan guru yang menjadi prioritas pada tahap ini. Vaksinasi tahap kedua diharapkan selesai pada Mei 2021, seiring pada bulan tersebut dilakukan penyuntikan pada masyarakat umum.

Sebagai warga negara yang baik, mari dukung program vaksinasi ini sembari perlu bermawas diri dan terus patuh menjalankan protokol kesehatan 3M di manapun berada: Memakai masker dengan benar,

Menjaga jarak dan hindari kerumunan, Mencuci tangan pakai sabun dengan rutin.

Dengan demikian, melalui program vaksinasi COVID-19 diharapkan masyarakat menjadi siap untuk menjalankan pola hidup yang baru. Mulai dari bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Tak mudah memang untuk mendaratkan pandangan baru ini, namun dengan saling menguatkan, maka Indonesia akan dimampukan untuk terus menciptakan produktivitas di tengah pandemi COVID-19.

Mari saling bergandengan tangan untuk mensukseskan program vaksinasi nasional ini. Salam sehat untuk Anda dan keluarga terkasih.





untuk Satu Data Vaksinasi COVID-19

Setelah melakukan kajian dan uji klinis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan para ahli kesehatan, Pemerintah Indonesia akhirnya mendatangkan vaksin Sinovac dari Tiongkok. Kedatangan vaksin saat ini sudah memasuki tahapan keempat sejak kedatangan pertama pada awal Desember 2020 lalu. Presiden Joko Widodo menjadi penerima perdana vaksin, melalui vaksinasi tahap pertama tanggal 13 Januari 2021 dan tahap kedua tanggal 27 Januari 2021.

Dengan didukung oleh tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, kita bersama berharap agar program vaksinasi perdana yang akan dilakukan segera dapat berjalan dengan lancar.

Kesiapan pemerintah dalam Program Vaksinasi COVID-19 juga dilakukan dengan memastikan data pribadi setiap penerima vaksin harus mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Menteri Kominfo mengatakan, penandatanganan SKB itu merupakan upaya memberikan kepastian hukum dalam mengatur Sistem Manajemen Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

"Dengan didukung oleh tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita bersama berharap agar program vaksinasi perdana yang akan dilakukan segera dapat berjalan dengan lancar," ujar Menteri Johnny usai Penandatanganan SKB tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta pada hari Selasa (12/01/2021).

Menteri Kominfo menyatakan pemerintah telah menyelesaikan langkah-langkah final untuk menjamin keamanan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Setelah sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa halal COVID-19 produk dari Sinovac. Kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun telah mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk Vaksin COVID-19 yang telah dijamin aman dan memiliki tingkat efisiensi yang melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO.

Menteri Johnny menyatakan, di hari yang sama telah disaksikan uji coba Sistem Satu Data Vaksinasi COVID-19. Menurutnya pelaksanaan uji coba berjalan dengan baik. "Sistem mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga dari tahap persiapan, pelaksanaan, proses pelaporan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan vaksinasi COVID-19," jelasnya.

Terdapat 12 diktum pada SKB Nomor HK.03.01/MENKES/53/2021 dan Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur mengenai ketentuan umum dan teknis Satu Data Vaksinasi COVID-19 itu. Dalam SKB ditetapkan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19 sebagai sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk persiapan, pelaksanaan vaksinasi, proses pelaporan, monitoring, dan evaluasi dalam penyelenggaraan vaksinasi COVID-19.



Tiga Peran Kominfo

Menteri Kominfo menjelaskan SKB tersebut mengatur pembagian kewenangan pemangku kepentingan dalam menjamin pengamanan serta perlindungan data agar vaksinasi COVID-19 dapat berjalan dengan baik.

"Kementerian Kesehatan akan menjadi wali data. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk akan menjadi pihak yang mengoperasikan, mengembangkan dan mengelola sistem informasi ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," tuturnya.

Menteri Johnny merinci peran Kementerian Kominfo berkaitan dengan tiga hal, yakni mendukung registrasi, integrasi data dan keamanan data pribadi.

"Pertama, mendukung integrasi aplikasi PeduliLindungi dalam sistem informasi satu data COVID-19.

PeduliLindungi akan digunakan dalam tahapan registrasi ulang dan juga tahapan penerbitan sertifikasi digital vaksinasi tahap pertama dan tahap kedua," jelasnya.

Kedua, Menteri Kominfo menjelaskan kewenangan dalam melakukan integrasi tata kelola data sistem informasi. Menurutnya, Kementerian Kominfo akan melakukan mirroring data dengan sistem Pusat Data Nasional yang tengah dikembangkan guna memvalidasi sasaran penerima vaksin yang datanya dikelola oleh beberapa kementerian dan lembaga.

"Ketiga, melakukan pengawasan untuk menjamin pemanfaatan data pribadi dan sistem informasi yang aman

dan handal. Hal ini dilakukan Kementerian Kominfo untuk memastikan penerapan prinsip perlindungan data pribadi serta keamanan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasional sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19," paparnya.

Menurut Menteri Johnny, tiga hal tersebut mungkin terlihat sederhana, akan tetapi saat ini perlindungan data menjadi imperatif. "Untuk memastikan keamanan data pemilik data menjadi imperatif yang payung hukumnya harus dicari dan dibentuk agar tata kelola ini dapat berjalan dengan baik," jelasnya.



Pelindungan Data Pribadi

Dalam sambutan usai penandatanganan SKB, Menteri Kominfo menekankan arti penting pelindungan data. Menurutnya dunia saat ini bertarung dari ruang fisik ke ruang digital. Pertarungan dalam ruang digital ditandai dengan pemanfaatan penggunaan tata kelola manajemen data atau *flow data* dalam negeri maupun *cross-border data flow* dalam Forum G20, United Nations, ITU Members Meeting, ASEAN-China Meeting dan beberapa forum internasional lain.

"Beberapa kali saya menyampaikan dalam event internasional untuk memastikan agar *flow data cross border* tidak mengganggu atau menghambat kepentingan nasional negara yang bersangkutan, termasuk kepentingan Indonesia," paparnya.

Menteri Johnny menekankan prinsip *lawfulness, transparency, fairness* dan *reciprocal*. Apalagi saat ini, menurut Menteri Kominfo, Satu Data COVID-19 menyangkut data 181,5 juta penduduk usia produktif yang menjadi kekuatan fundamental untuk Indonesia.

"Dan karenanya pelindungan terhadap data penduduk di usia produktif itu harus terjaga dengan baik, digunakan dengan baik, jangan sampai *missuse* dan jangan sampai *unlawfull*, ini yang harus kita jaga dengan baik," imbuhnya.

Menurut Menteri Johnny, meski pemanfaatan informasi berkaitan dengan data pribadi akan bergantung pada regulasi sektoral, memastikan pelindungan data pribadi tetap menjadi tugas Kementerian Kominfo.

"Termasuk Undang-Undang Kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan

sebagai wali data untuk COVID-19. Kementerian Kominfo harus memastikan dan perlindungan terhadap data pribadi yang dalam hari-hari terakhir ini," ujarnya.

Menteri Kominfo menyatakan mulai Rabu (13/02/2021) akan dikirimkan SMS *Blast* untuk menjangkau para tenaga kesehatan yang akan segera mengikuti proses vaksinasi. "Saya berharap pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi akan dilakukan dengan baik, dan saya berterima kasih kepada rekan-rekan PT Telkom yang terus membangun kapasitas dan kemampuan aplikasi PeduliLindungi," paparnya.

Menteri Johnny menegaskan, kolaborasi dan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi menjadi bagian penting untuk mendukung Program Presiden Joko Widodo.

"Menggunakan seluruh *network* telekomunikasi kita sebarakan SMS *Blast* itu. Kementerian Kominfo beserta ekosistemnya dapat mendukung Kementerian Kesehatan dan kementerian lembaga lainnya. Secara khusus mendukung program Presiden yang menyukseskan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dan segera kita memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia," ungkapnya.



3

Akses Internet untuk 3,126 Fasyankes



Tuntas dalam Tiga Bulan

Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negeri setahun terakhir, hampir semua sektor kehidupan masyarakat bisa dikatakan lumpuh. Teknologi informasi dan komunikasi kemudian menjadi salah satu 'jembatan' yang dapat mengakselerasi percepatan penanganan pandemi COVID-19, terutama di sektor pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo melakukan sebuah terobosan, mengakselerasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi lebih cepat dari target sebelumnya.

Penuntasan untuk Fasyankes



Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2019 terkait fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), terdapat 2.877 rumah sakit dan 10.134 puskesmas di Indonesia. Dari total 13.011 fasyankes tersebut, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo mengidentifikasi 3.126 fasyankes yang masih membutuhkan optimalisasi layanan internet.

“Dari 3.126 titik tersebut, di tahun 2019, BLU BAKTI Kominfo telah menyediakan akses internet di 226 titik fasyankes. Sedangkan pada tahun 2020 lalu, melalui kerjasama dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), BLU BAKTI Kominfo melakukan percepatan layanan internet di 2.192 fasyankes,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Menteri Johnny mengatakan, dalam kurun waktu tiga bulan yakni Oktober hingga Desember 2020, Kementerian Kominfo telah menyiapkan infrastruktur akses internet untuk 3.126 fasyankes di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut kemudian melengkapi ribuan fasyankes yang sudah terkoneksi dengan internet di seluruh pelosok Tanah Air.

“Kalau dilihat dari *roadmap* sebelumnya, dan jika dilaksanakan secara biasa-biasa saja, maka penyediaan akses internet untuk seluruh layanan kesehatan itu baru dapat dilakukan pada tahun 2027,” kata Menteri Johnny dalam Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengenai Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta pada hari Selasa (12/01/2021).

Percepatan pembangunan akses internet untuk fasyankes ini dilakukan akibat dari dampak pandemi COVID-19. Jika mengacu pada *roadmap* pembangunan infrastruktur TIK sebelumnya, Menteri Kominfo menjelaskan hal itu akan mempersulit pelayanan tenaga medis dalam mengatasi pandemi COVID-19.

Dengan demikian, penggelaran akses internet pada akhirnya dilakukan tujuh tahun lebih awal. Target ini merupakan pencapaian yang luar biasa atas kerja sama berbagai pihak, sehingga dalam tiga bulan bisa diselesaikan dengan baik.

Sebagai kementerian yang membidangi sektor strategis dalam menghadapi pandemi COVID-19, Menteri Johnny menegaskan bahwa institusi yang dipimpinnya akan terus menjamin infrastruktur telekomunikasi atau ruang digital

Indonesia dapat digunakan dengan baik, aman dan secara akurat. Upaya tersebut menjadi keharusan bagi seluruh elemen anak bangsa untuk bahu-membahu mengakhiri pandemi di Indonesia. Apalagi pemerintah telah berhasil mendatangkan vaksin dan telah dilakukan tahapan vaksinasi.

“Karena vaksinasi ini dosisnya dua kali maka dibutuhkan data yang akurat agar vaksinasi itu dapat dilakukan dengan baik. Pemanfaatan tiga aplikasi yang kita gunakan dalam integrasi data ini harus betul-betul digunakan untuk kepentingan keamanan, untuk kepentingan kenyamanan dan untuk kepentingan akurasi data,” jelas Menteri Johnny.

Untuk diketahui, pemerintah menghadirkan tiga aplikasi untuk meningkatkan efisiensi sistem satu data vaksinasi COVID-19. Adapun tiga aplikasi itu adalah PeduliLindungi, PrimaryCare, dan SMILE.

Pemanfaatan tiga aplikasi yang kita gunakan dalam integrasi data ini harus betul-betul digunakan untuk kepentingan keamanan, kenyamanan, dan kepentingan akurasi data.

Terujung, Terkoneksi

Akses internet untuk fasyankes memang menjadi perhatian serius pemerintah. Demikian juga implementasi program tersebut menandakan pemerintah serius mengatasi persoalan pandemi dari berbagai sektor sentral yang memang menjadi kebutuhan masyarakat.

Presiden Joko Widodo secara khusus memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju agar menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi kesehatan. Arahan Presiden itu yang kemudian dilaksanakan oleh Menteri Kominfo Johnny G. Plate dengan mempercepat penyediaan akses internet di 3.126 fasyankes. melalui BAKTI Kementerian Kominfo, penyediaan akses ini berhasil dituntaskan dalam tiga bulan yang dibangun dari pelosok negeri di wilayah Terdepan, Tertinggal dan Terpencil (3T).

Melalui konferensi pers Virtual Akselerasi Penyediaan Akses Internet di Puskesmas dan Rumah Sakit di Indonesia dalam Rangka Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Oktober 2020, Menteri Johnny mengingatkan bahwa komitmen pemerintah melakukan akselerasi penyediaan akses internet di fasyankes ini merupakan prioritas utama yang perlu dilakukan untuk percepatan pemulihan dan penanganan COVID-19.

"Khususnya dalam tiga agenda utama yaitu optimalisasi telekomunikasi antar dan intra fasyankes, peningkatan kualitas arus data fasyankes, serta pemanfaatan aplikasi kesehatan berbasis digital khususnya di daerah-daerah 3T," imbuhnya.

Penyediaan akses internet untuk fasyankes di wilayah 3T juga terus dipercepat dengan pemanfaatan kapasitas satelit. "Seluruh fasilitas layanan kesehatan di Indonesia yang selama ini belum terjangkau diberikan akses internet setidaknya 1 Mbps sesuai kebutuhan, bahkan bisa lebih apabila dibutuhkan, dengan menghubungkan kepentingan itu langsung dengan satelit," tandasnya.

Apabila kapasitas satelit yang dimaksud terpenuhi, menurut Menteri Johnny pemerintah pusat seperti Kementerian Kesehatan akan dengan mudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait program vaksinasi COVID-19.

Kehadiran infrastruktur akses internet di fasyankes tentu menambah semangat dan dedikasi para nakes menyelamatkan masyarakat dan negeri ini dari bahaya pandemi. Menjadi harapan bersama agar semua ekosistem infrastruktur yang diberikan dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik dan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan, dan khususnya kesehatan masyarakat.

Mekanisme Pendaftaran Bagi Lansia Calon Peserta Vaksinasi COVID-19

Vaksinasi untuk orang lansia (lanjut usia) akan dimulai di **DKI Jakarta** dan **ibukota 33 provinsi**, dengan prioritas awal di **Jawa dan Bali** karena tingkat penularan COVID-19 yang tinggi.

Mekanisme **Pendaftaran** untuk Masyarakat Lansia Ada 2:

- **Vaksinasi di fasilitas layanan kesehatan**
(misalnya: puskesmas, Rumah Sakit milik pemerintah atau swasta)
- **Vaksinasi massal oleh organisasi atau institusi yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat**
(misalnya: organisasi para pensiunan ASN, Pepabri atau Veteran Republik Indonesia, organisasi keagamaan atau kemasyarakatan)

Badan POM Terbitkan EUA,

KONFERENSI PERS

*“Emergency Use Authorization (EUA)
Vaksin COVID-19”*

Jal 21 Januari 2021



Vaksin CoronaVac Sinovac
Siap Disuntikkan

Jakarta - Vaksin CoronaVac Sinovac telah resmi kantong izin penggunaan darurat/*Emergency Use Authorization* (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM). Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito mengumumkan penerbitan EUA Vaksin CoronaVac produksi Sinovac di Kantor Badan POM Jakarta, Senin (11/01/2021). Dengan demikian vaksin siap disuntikkan kepada masyarakat pekan ini untuk percepatan penanganan COVID-19.

Berdasarkan hasil uji klinik, vaksin CoronaVac Sinovac memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutunya. Data hasil uji klinik dievaluasi Badan POM bersama Komnas Penilai Obat, Indonesian *Technical Advisory Group on Immunization* (ITAGI), dan Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia secara bertahap melalui *rolling submission*, yaitu pada 9 Desember 2020, 29 Desember 2020, 8 Januari 2021 dan 10 Januari 2021.

Sesuai panduan *World Health Organization* (WHO) dalam pemberian persetujuan EUA untuk vaksin COVID-19 (*Considerations for Evaluation of COVID-19 Vaccines*), yaitu memiliki minimal data hasil pemantauan keamanan dan khasiat/efikasi selama 3 bulan pada uji klinik fase 3 dengan efikasi vaksin minimal 50%, maka Vaksin CoronaVac ini memenuhi persyaratan EUA.

Lebih lanjut Kepala Badan POM menyatakan hasil evaluasi data keamanan vaksin CoronaVac yang diperoleh dari studi klinik fase 3 di Indonesia, Turki dan Brazil selama 3 bulan setelah penyuntikan dosis yang ke 2 menunjukkan vaksin CoronaVac aman. Vaksin tidak menyebabkan efek samping berat.

“

Efek samping vaksin CoronaVac hanya bersifat ringan berupa nyeri, iritasi dan sedang berupa pembengkakan sistemik, nyeri otot, demam, dan gangguan sakit kepala. Efek samping tersebut tidak berbahaya dan dapat pulih kembali.”

Sementara itu, efikasi vaksin CoronaVac memenuhi standar minimal yang ditetapkan WHO. Hasil analisis uji klinik menunjukkan efikasi vaksin CoronaVac di Bandung sebesar 65,3%, di Turki 91,25%, serta di Brazil 78%. Pada uji klinik fase 3 di Bandung, data imunogenisitas menunjukkan hasil yang baik. “Jumlah subjek yang memiliki antibodi untuk melawan virus tersebut yaitu 99,74% setelah 14 hari penyuntikan dan 99,23% setelah 3 bulan,” lanjut Kepala Badan POM.

Sedangkan, aspek mutunya telah tervalidasi dari hasil inspeksi Badan POM ke sarana produksi Sinovac di China. Aspek mutu vaksin juga telah dievaluasi mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar internasional penilaian mutu vaksin. Salah satunya melalui inspeksi langsung ke sarana produksi vaksin CoronaVac di Sinovac China dan Bio Farma Bandung.

Penerbitan EUA ini sekaligus memantapkan program vaksinasi COVID-19 yang dimulai pada Rabu, 13 Januari 2021. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih mengimbau para tenaga kesehatan dan masyarakat mendukung program vaksinasi COVID-19. Jangan ada polemik karena vaksin telah mendapat izin Badan POM yang berarti terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya. (HM-Fathan)

Sumber: www.pom.go.id



Badan POM Terbitkan EUA Vaksin COVID-19 Produksi Bio Farma

Jakarta - Vaksin COVID-19 produksi Bio Farma resmi kantongi izin penggunaan darurat/*Emergency Use Authorization* (EUA) dari Badan POM. Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito umumkan penerbitan EUA Vaksin COVID-19 yang disiarkan dari Kantor Badan POM Jakarta, Selasa (16/02). Dengan demikian, vaksin produksi dalam negeri ini siap disuntikkan kepada masyarakat untuk mempercepat implementasi program vaksinasi nasional.

Kepala Badan POM secara langsung memberikan persetujuan EUA vaksin COVID-19 produksi Bio Farma melalui sistem Aplikasi e-Registrasi Obat dan Produk Biologi (AeRO) di hadapan awak media. Kemudian Kepala Badan POM langsung menyerahkan sertifikat EUA tersebut kepada Direktur Utama Bio Farma, Honesty Basyir. "Saya ucapkan terimakasih kepada Bio Farma yang telah mengikuti timeline bersama, sehingga EUA vaksin COVID-19 ini bisa disetujui," ucapnya.

Lebih lanjut Kepala Badan POM menyatakan hasil evaluasi data uji stabilitas, dokumen validasi proses produksi dan validasi metode analisis, spesifikasi produk dan spesifikasi kemasan yang digunakan, vaksin COVID-19 produksi Bio Farma memenuhi persyaratan untuk mendapat EUA. Vaksin produksi Bio Farma ini menggunakan bahan baku dari Sinovac China. Importasi *bulk* bahan baku vaksin telah dilakukan sebanyak 2 kali sebanyak 15 juta dosis pada 12 Januari 2021 dan 11 juta dosis pada 2 Februari 2021.

Vaksin produksi Bio Farma ini diberi nama Vaksin COVID-19, dengan nomor registrasi EUA2102907543A1. Vaksin ini mempunyai bentuk sediaan vial 5 ml, berisi 10 dosis vaksin per vial yang merupakan vaksin dari virus yang diinaktivasi. Dikemas dalam dus berisi 10 vial, stabil disimpan pada suhu 2°-8°C. Setiap vial dilengkapi dengan 2D Barcode yang menunjukkan identitas masing-masing vial, dan berfungsi untuk melakukan tracking dan mencegah vaksin palsu.



“Badan POM bekerja sama dalam melakukan surveillance, investigasi, dan kajian KIPI,”

Vaksin COVID-19 produksi Bio Farma wajib didaftarkan untuk mendapat EUA, meskipun sama kandungan dan profil khasiat-keamanannya dengan vaksin CoronaVac produksi Sinovac Beijing yang telah mendapat EUA pada 11 Januari 2021. “Adanya perbedaan tempat produksi, perbedaan kemasan dari *single dose* menjadi *multiple dose*, maka sesuai peraturan wajib diregistrasikan untuk mendapatkan Persetujuan izin edar ataupun EUA,” jelas Kepala Badan POM.

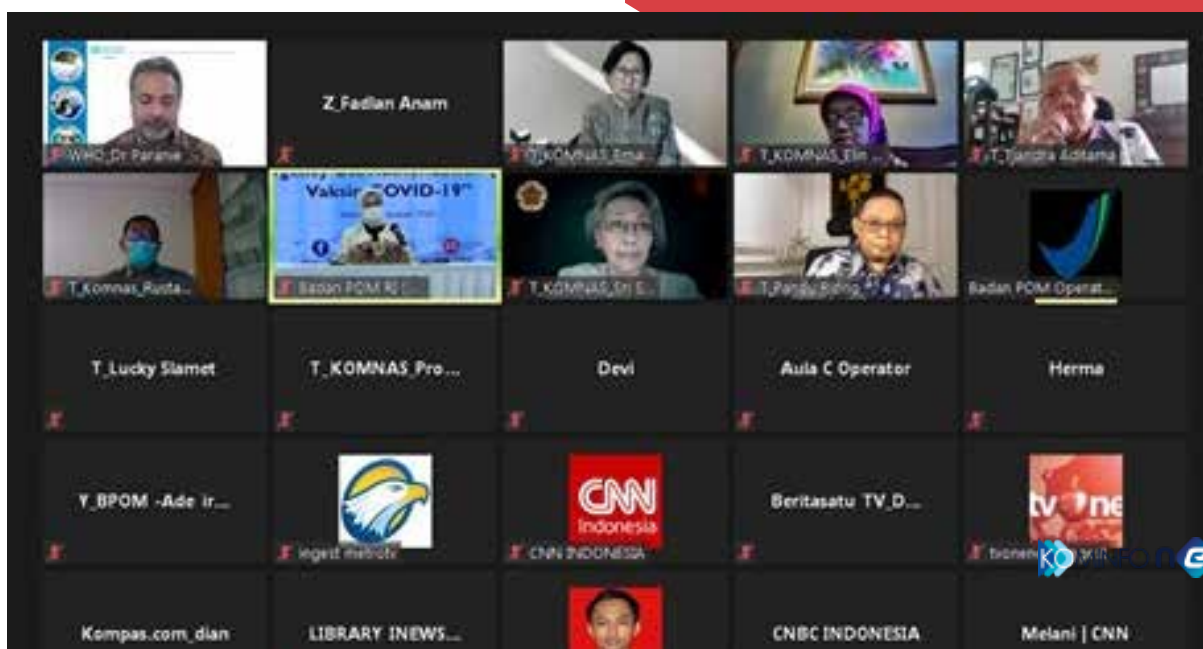
Kepala Badan POM mengatakan sebelum produk siap digunakan, Badan POM melakukan pengujian untuk pelulusan produk (*lot release*). “Sampai 15 Februari 2021, Badan POM telah menerbitkan sertifikat *lot release* untuk 5 bets masing-masing sebanyak kurang lebih 1 juta dosis. “Dengan telah diberikan pelulusan produk, maka vaksin tersebut siap digunakan dalam program vaksinasi,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bio Farma mengatakan dengan dirilisnya 5 juta dosis vaksin COVID-19 ini, maka ada tambahan suplai untuk mempercepat program vaksinasi. Bio Farma sampai saat ini telah memproduksi 15 bets atau 15 juta dosis vaksin COVID-19. Dan akan segera menyusul

140 juta dosis bahan baku masuk ke Indonesia untuk kemudian diterbitkan sertifikat *lot release*. “Target bulan ini akan disuntikkan 7,5 juta dosis vaksin,” ujarnya.

Ke depan, Badan POM akan terus mengawal mutu vaksin sepanjang jalur distribusi. Mengingat vaksin merupakan produk rantai dingin dimana suhu penyimpanan dan pengiriman harus dijaga sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada suhu 2-8°C. “UPT Badan POM mengawal Dinas Kesehatan dalam pengiriman dan penyimpanan vaksin sesuai Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), serta pengawasan dan pemantauan mutu vaksin yang beredar melalui *sampling* dan pengujian di sarana produksi dan distribusi, juga fasilitas kesehatan,” jelasnya.

Badan POM juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Komite Nasional dan Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas dan Komda PP KIPI) untuk melakukan pemantauan KIPI. Pemantauan dilakukan terhadap pelaporan yang diterima dari tenaga kesehatan atau industri farmasi pemilik vaksin atau masyarakat. “Badan POM bekerja sama dalam melakukan surveillance, investigasi, dan kajian KIPI,” tutupnya. HM-Fathan



MUI Tetapkan Vaksin COVID-19 Produksi Sinovac

Halal dan Suci





Vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience Co., yang sertifikasinya diajukan Bio Farma, suci dan halal."

JAKARTA – Setelah menggelar rapat pleno secara tertutup di Hotel Sultan, Jakarta pada Jumat (08/01), Komisi Fatwa MUI Pusat akhirnya menetapkan Vaksin COVID-19 produksi Sinovac Halal dan Suci. Namun penggunaan vaksin ini masih menunggu izin keamanan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Yang terkait aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi panjang penjelasan auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi Sinovac Lifescience Co yang sertifikasinya diajukan Bio Farma suci dan halal," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh, Jumat (08/01/2021) di Hotel Sultan, Jakarta.

Menurutnya, meskipun sudah halal dan suci, penggunaan Vaksin COVID-19 produksi Sinovac itu masih menunggu keputusan BPOM terkait keamanan (*safety*), kualitas (*quality*), dan kemanjuran (*efficacy*).

"Akan tetapi terkait kebolehan penggunaannya, ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan, kualitas, dan *efficacy* BPOM. Fatwa utuhnya akan disampaikan setelah BPOM menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan, apakah aman atau tidak," ujarnya.

Kiai Niam merinci, rapat yang diikuti pimpinan dan anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tersebut, hanya membahas menetapkan kesesuaian syariah Vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Lifescience .Co. Ada tiga vaksin produksi Sinovac yang didaftarkan yaitu CoronaVac, Vaccine COVID-19, dan Vac2 Bio.

"Artinya yang kita bahas hari ini adalah mengenai produk vaksin COVID-19 dari produsen Sinovac ini bukan yang lain. Pembahasan diawali dari audit dari auditor," ungkapnya.

Komisi Fatwa menetapkan kehalalan ini setelah sebelumnya mengkaji mendalam laporan hasil audit dari tim MUI. Tim tersebut terdiri dari Komisi Fatwa MUI Pusat dan LPPOM MUI. Tim tersebut sebelumnya telah berpengalaman dalam proses audit Vaksin MR.

Tim itu sebelumnya tergabung dalam tim Kementerian Kesehatan, Bio Farma, dan BPOM sejak bulan Oktober 2020. Mereka bersama tim lain mengunjungi pabrik Sinovac dan mengaudit kehalalan vaksin di sana. Sepulang dari Indonesia, tim masih menunggu beberapa dokumen yang kurang.

Dokumen itu diterima secara lengkap oleh tim MUI pada Selasa (05/01) melalui surat elektronik. Pada hari yang sama, tim juga merampungkan audit lapangan di Bio Farma yang nantinya akan memproduksi vaksin ini secara massal. Tim kemudian melaporkan hasil audit tersebut kepada Komisi Fatwa MUI Pusat untuk dilakukan kajian keagamaan menentukan kehalalan vaksin.

Hari ini Komisi Fatwa telah menentukan kehalalan dan kesucian vaksin ini. Namun fatwa utuh belum keluar karena masih menunggu aspek *toyib* atau keamanan digunakan dari BPOM. Bila BPOM sudah mengeluarkan izin, maka vaksin produksi Sinovac ini bisa digunakan. (Azhar/Din)

Sumber: www.mui.go.id



Pemerintah Amankan Stok
Vaksinasi COVID-19 bagi

Petugas Pelayanan Publik

Vaksin COVID-19 CoronaVac dari Sinovac tahap keempat tiba di Bandara Soekarno Hatta hari ini, Selasa (2/2). Vaksin tersebut berjumlah 10 juta vaksin ditambah 1 juta vaksin untuk *overfilled* dalam bentuk bulk. Sehingga sampai saat ini total vaksin yang telah diterima Indonesia adalah sejumlah 28 Juta vaksin.

"Kedatangan vaksin tahap keempat ini menjadi kelanjutan kedatangan tahap pertama dan kedua pada Desember 2020 sebanyak total 3 juta vaksin jadi dari Sinovac dan tahap ketiga dalam bentuk bulk sebanyak 15 juta vaksin pada 12 Januari 2021," kata Sekjen Kementerian Kesehatan RI, drg. Oscar Primadi, MPH., di Bandara Soekarno Hatta, Banten, Selasa (2/2/2021).

"Ketersediaan vaksin aman dan sesuai skema yang telah direncanakan berkat lancarnya koordinasi dan komunikasi berbagai pihak, termasuk komitmen pengiriman oleh Sinovac," lanjut drg. Oscar.

Vaksin Sinovac yang sudah tiba ini merupakan kali kedua dalam bentuk bulk yang kemudian akan diproduksi oleh Bio Farma. Bio Farma sendiri sudah mendapatkan sertifikat CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dari Badan POM.

Berdasarkan rencana sebelumnya, tahap pertama vaksinasi COVID-19 dilakukan pada Januari-April 2021 bagi sekitar 1,5 juta tenaga kesehatan dan 17,4 petugas publik di seluruh daerah di Indonesia. Untuk tenaga kesehatan, diharapkan dapat selesai pada akhir Februari 2021.

Sesuai dengan kalkulasi, peruntukan vaksin bagi tenaga kesehatan dianggap telah tercukupi oleh vaksin jadi yang datang pada tahap satu dan dua. Sehingga, untuk pengiriman tahap ketiga dan keempat ini, rencananya akan dialokasikan bagi para petugas publik yang ada di seluruh Indonesia.

"10 juta dosis vaksin yang kita terima hari ini rencananya juga akan digunakan untuk vaksinasi bagi petugas pelayanan publik," tambah dr. Nadia.

Terkait *overfilled*, Juru Bicara PT Bio Farma, Bambang Heriyanto mengungkapkan, *overfilled* adalah ekstra volume yang diberikan oleh Sinovac untuk mengantisipasi proses produksi di Biofarma.

"Bahan baku yang kita terima hari ini merupakan bahan baku yang didatangkan dari Sinovac sebanyak 140 juta dosis untuk tahun 2021, yang pengirimannya akan dilakukan secara bertahap hingga bulan Juli 2021 -- dari yang sebelumnya direncanakan November 2021 ini. Ada percepatan maju hingga Juli 2021," ucap Bambang.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Hotline Virus Corona 119 ext 9.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak @kemkes.go.id (D2/NI)

Sumber: kemkes.go.id



Hingga saat ini, vaksinasi telah dilakukan kepada lebih dari 500 ribu tenaga kesehatan dan tahap untuk total 1,5 juta tenaga kesehatan diharapkan selesai sebelum akhir Februari."

dr. Siti Nadia Tarmidzi

(Juru Bicara Pemerintah Vaksinasi COVID-19, Kementerian Kesehatan)

Tahapan **Pendaftaran** Vaksinasi COVID-19 untuk Lansia di Fasilitas Layanan Kesehatan:



Mendaftar dengan mengunjungi tautan yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan di <https://s.id/pendaftaran-lansia>.



Isi formulir pendaftaran **sesuai kota domisili** dengan menjawab sejumlah pertanyaan di dalamnya.



Peserta lansia dapat mengisi formulir sendiri atau meminta bantuan anggota keluarga lain atau melalui kepala RT/RW.



Seluruh data peserta akan masuk ke **Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing** yang akan menentukan jadwal dan termasuk hari, waktu, serta lokasi pelaksanaan vaksinasi.



Vaksinasi Massal oleh Organisasi atau Institusi dapat Diselenggarakan dengan Syarat:

Organisasi tersebut **wajib bekerjasama** dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat (Provinsi atau Kabupaten/Kota) untuk pelaksanaan vaksinasi massal.

Harus menyediakan **narahubung perwakilan** yang berasal dari Kabupaten/Kota atau Provinsi tersebut yang harus dapat dihubungi oleh panitia penyelenggara ataupun pasien.



Sumber: kemeks.go.id, covid19.go.id

Menkominfo Jalani Vaksinasi COVID-19 Dosis Kedua

di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Senin (1/2/2021)



Menteri Johnny Tiba di RSPAD

Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyambangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta, Senin (01/02/2021) untuk menjalani vaksinasi dosis kedua. Dua minggu sebelumnya, Menteri Kominfo Johnny G. Plate juga telah menjalani vaksinasi pertama di tempat yang sama.



Tahap Pemeriksaan Kesehatan

Menteri Kominfo Johnny G. Plate melakukan pemeriksaan kesehatan (tekanan darah, pengukuran suhu tubuh, pemeriksaan riwayat kesehatan) terlebih dahulu sebelum mengikuti vaksinasi untuk dosis kedua. Tahapan ini diperlukan untuk memastikan penerima vaksin berada dalam kondisi prima dan layak mengikuti vaksinasi untuk dosis kedua.



Tunjukkan Botol Vaksin

Menteri Kominfo Johnny G. Plate menunjukkan botol ampul vaksin sebelum disuntik Vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co.Ltd. yang di Indonesia bekerja sama dengan PT Bio Farma (Persero).

Proses Penyuntikan Vaksin

Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat disuntik Vaksin CoronaVac oleh Tim Medis Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta. Vaksin ini diproduksi oleh Sinovac Life Science Co.Ltd. yang di Indonesia bekerjasama dengan PT Bio Farma (Persero).



Tidak Ada Efek Samping

Menteri Kominfo Johnny G. Plate berfoto dengan latar belakang tulisan "Saya Sudah di Vaksin", usai menjalani Vaksinasi dosis kedua. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan tidak terasa sakit saat penyuntikan, dan tidak ada efek samping sama sekali.

KOMINFO TALK

EPISODE

DUKUNGAN KOMINFO UNTUK PROGRAM VAKSINASI COVID-19 NASIONAL

**Danny Januar Ismawan**

Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah BAKTI

**dr. Lutfi Oscar Bayuni**

Dokter Umum dan Penanggung Jawab Klinik Pratama Kemkominfo

**Gunawan Hutagalung**

Koordinator Jasa Telekomunikasi Ditjen PPI Kemkominfo

Kontribusi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyukseskan Program Vaksinasi COVID-19 Nasional dilakukan melalui dukungan infrastruktur berupa pembangunan akses internet di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di seluruh Indonesia.

Melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Kementerian Kominfo telah menyelesaikan penyediaan akses internet di 3.126 titik fasilitas layanan Kesehatan (fasyankes) yang sebelumnya tidak terfasilitasi internet dengan baik. Pembangunan akses internet



Sebagai dukungan Kominfo dalam membantu penanggulangan COVID-19, dalam waktu 3 bulan sejak Oktober lalu, kami berhasil menuntaskan mandat dari Pak Menteri untuk membangun akses internet di seluruh fasyankes. Sehingga posisi sekarang seharusnya tidak ada lagi fasyankes yang tidak ada akses internet.



di 3.126 fasyankes disebutkan oleh Direktur Danny Sebagian besar menggunakan teknologi satelit. Karena jika bicara implementasi dalam waktu 3 bulan, meski ada pilihan di luar satelit, namun akan butuh waktu lebih lama. Sehingga Kementerian Kominfo memutuskan untuk membangun dengan menggunakan teknologi yang lebih cepat terlebih dahulu dengan terus melakukan evaluasi secara bertahap untuk dilakukan peningkatan layanan.

“Saat ini satu-satunya opsi yang memungkinkan adalah menggunakan satelit. Kita gunakan kapasitas yang terbatas tapi berikan dampak untuk membantu kelancaran puskesmas terutama untuk vaksinasi. Hampir semua menggunakan satelit, meski ada beberapa lokasi yang sudah tersedia ISP (Internet Service Provider), kita gunakan teknologi yang lebih cepat terlebih dahulu,” jelas Direktur Danny.

15 FEBRUARI 2021

KOMINFO TALK DUKUNGAN KOMINFO UNTUK PROGRAM VAKSINASI COVID-19 NASIONAL



[@kominfoinfo](#)
[@kominfoinfo](#)
[kominfoinfo TV](#)

Strategi dan Kendala Bangun Akses Internet Fasyankes

Penyelesaian 3.126 titik fasyankes ini menggenapi tersedianya akses internet di 13.011 fasyankes di seluruh Indonesia. Adanya akses internet ini menjadi tulang punggung penting untuk pelayanan kesehatan dan program vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

Dalam pembangunan akses internet di fasyankes ini, Kementerian Kominfo memiliki strategi agar dapat menuntaskannya dalam kurun waktu tiga bulan (Red. Oktober sampai Desember 2020). Strategi tersebut diungkapkan Direktur Danny adalah dengan memperkuat *management project* serta melibatkan cukup banyak mitra vendor karena daerah yang dituju daerah terpencil. “Kita bisa menyelesaikan pembangunan ini karena melibatkan banyak mitra vendor yang sudah sangat profesional. Selain itu pihak Pemerintah Daerah juga sangat kooperatif sehingga mereka sangat membantu ketika kita temui kendala dari sisi logistik,” ungkapnya.

Sedangkan, kendala yang dihadapi selama proses pembangunan akses internet di 3.126 fasyankes, Direktur Danny menjelaskan bahwa kendala yang jadi permasalahan merupakan masalah klasik yaitu terkait koordinasi.

“Masalah koordinasi justru yang jadi kendala dan seringkali ditemui di lapangan, seperti saat tim sudah datang ke lokasi ternyata pihak puskesmasnya belum terinfokan sehingga terjadi penolakan. Sehingga kita terus melakukan perbaikan dari sisi koordinasi, agar tidak ada lagi kasus kejadian yang seperti ini,” jelasnya.

Kerjasama dengan Sektor Kesehatan

Setelah seluruh fasyankes sudah terfasilitasi dengan akses internet, maka setidaknya ada dua hal yang menjadi fokus utama yaitu peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi pemanfaatannya di sektor kesehatan. Pihak Kominfo melalui BAKTI sejak beberapa tahun lalu proaktif melakukan Kerjasama dengan sektor terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit melalui program *telehealth* dan *telemedicine*.

BAKTI juga bekerjasama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dalam memfasilitasi jika ada puskesmas yang ingin melakukan konsultasi dengan dokter RSCM. “Karena BAKTI adalah BLU dan RSCM juga BLU maka kita melakukan kolaborasi dan Kerjasama. Kita memfasilitasi RSCM dan Puskesmas yang ingin melakukan konsultasi dengan dokter-dokter spesialis,” ujar Direktur Danny.

Vaksinasi Tahap Kedua bagi ASN

Pada KominfoTalk edisi ke-3, ini selain membahas penyediaan akses internet untuk fasyankes, juga turut menghadirkan dr. Lutfi Oscar Bayuni selaku dokter Umum dan Penanggung Jawab Klinik Pratama Kemkominfo untuk berbagi informasi mengenai vaksinasi.

Vaksinasi tahap kedua rencananya akan mulai diberikan bagi pekerja publik termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada akhir Februari ini. "Perkiraan vaksinasi dari Kementerian Kesehatan bagi ASN dan petugas publik akan dilakukan pada akhir Februari. Target dari vaksinasi sendiri selain ASN juga seluruh pegawai termasuk OB (*office boy*) dan satpam di lingkungan Kominfo," jelas dr. Lutfi.

Jika persiapan dan persyaratannya sudah sesuai dan data-data lengkap, dr. Lutfi mengatakan vaksinasi di lingkungan Kominfo bisa dilakukan pada akhir Februari 2021 ini. Saat ini tenaga Kesehatan di Klinik Pratama Kominfo sedang mengikuti pelatihan untuk menjadi vaksinator oleh Kementerian Kesehatan.

"Tenaga Kesehatan di Kominfo sedang mengikuti pelatihan menjadi vaksinator, sehingga nanti untuk vaksinasi bisa dilakukan dari Klinik Pratama Kominfo. Selain itu kami juga akan meminta data-data dari Biro Kepegawaian berupa nama pegawai, NIP, NIK dan nomor telepon untuk dilaporkan ke dinas Kesehatan untuk keperluan vaksinasi," ungkap dr. Lutfi.

Terkait persiapan vaksinasi, dr. Lutfi turut memberikan tips agar para ASN di lingkungan Kominfo mulai mempersiapkan diri dengan menjaga Kesehatan. "Sambil menunggu jadwal vaksin, mari persiapkan diri sendiri, dengan memperhatikan tekanan darah dan kadar gula darah. Selain itu, nanti meski sudah di vaksinasi kita harus tetap patuhi protokol Kesehatan dan 5M agar terhindar dari COVID-19," jelasnya.



Vaksin Masuk Desa: Nakes Percaya Diri, Masyarakat Siap

Kedatangan Vaksin Sinovac menjadi angin segar bagi tenaga kesehatan (nakes) di daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T). Mengingat pentingnya informasi dan literasi mengenai vaksin dan vaksinasi, Tim Redaksi Majalah KominfoNext melakukan penelusuran dengan mewawancarai salah seorang tenaga medis yang bertugas di wilayah 3T, yaitu Makasuti Lonthor, Kepala Puskesmas Desa Banda Ely, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku.

Mengawali perbincangan via telepon siang itu, Lonthor menjelaskan tentang kedatangan Vaksin Sinovac di Kepulauan Kei, yang mencakup Kota Tual dan Maluku Tenggara, pada tanggal 27 Januari 2021. Begitu vaksin tiba, pemerintah daerah setempat dibantu aparat keamanan TNI dan Polri mendistribusikan dosis vaksin ke pulau-pulau. Vaksin untuk Puskesmas Banda Ely sendiri diantar menyeberangi laut dari pusat kota di Kei Kecil menuju Pulau Kei Besar.

“Kami petugas kesehatan di daerah pelosok sangat bersyukur, vaksin sudah sampai di daerah terpencil ini. Dengan adanya vaksin ini membuat kita lebih percaya diri, lebih mampu untuk melakukan pelayanan-pelayanan terdepan, karena memang petugas kesehatan garda terdepan. Jadi memang kita tenaga kesehatan yang harus kuat dulu agar bisa melakukan aksi ke masyarakat,” kata Makasuti Lonthor saat dihubungi Tim Redaksi Majalah KominfoNext.

Sebanyak 66 dosis Vaksin Sinovac COVID-19 sudah tiba di desa Banda Ely pada tanggal 30 Januari 2021. Para nakes yang berjumlah 33 orang pun telah divaksinasi tahap ke-1 dan tahap ke-2, masing-masing pada tanggal 2-3 Februari, dan 16-17 Februari 2021. Sedangkan vaksinasi untuk masyarakat umum dijadwalkan bulan Maret mendatang.

Pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), menargetkan sasaran vaksinasi untuk Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sebanyak 1.468.764 peserta. Jumlah tersebut termasuk nakes yang bertugas di wilayah 3T. Sedangkan total yang telah divaksinasi secara nasional tahap ke-1 berjumlah 1.227.918, dan tahap ke-2 sebanyak 736.710 dari total sasaran 181.554.465 orang (update data per 21 Februari 2021 melalui situs resmi covid19.go.id).





Lantas seperti apa tanggapan nakes setelah dilakukan vaksinasi, dan bagaimana meyakinkan masyarakat akan manfaat Vaksin Sinovac COVID-19 buatan perusahaan asal Tiongkok itu?

“Alhamdulillah kalau tenaga kesehatan sendiri untuk katong di puskesmas sejauh ini tidak ada penolakan, karena memang semua sudah memahami tentang manfaat-manfaat dari Vaksin Sinovac. Jadi tidak ada penolakan, kecuali mungkin ada ibu hamil yang memang tidak bisa dan ada yang dengan penyakit-penyakit tertentu. Tapi Alhamdulillah, Puskesmas Banda Ely semua pegawai tidak ada yang mengalami penyakit tertentu, semua sehat-sehat,” kata Lonhor.

Pihak Puskesmas Banda Ely memanfaatkan momen vaksinasi bagi para nakes tersebut dengan mengajak masyarakat menyaksikan proses pemberian vaksin secara langsung. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat percaya bahwa informasi tentang bahaya dan efek samping dari vaksin sendiri tidak benar.

Pihak Puskesmas juga melakukan sosialisasi saat pencaanangan yang melibatkan 19 Kepala Ohoi (Kepala Desa), kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua majelis ta'lim, hingga para guru, agar sebelum giliran divaksinasi masyarakat sudah memahami dan meyakini bahwa Vaksin Sinovac yang digunakan itu aman.

"Memang itu kita punya trik agar Kepala Ohoi tidak percaya dengan berita-berita hoaks (tentang bahaya Vaksin Sinovac, red.). Kan berita hoaks banyak menyebar sehingga membuat kepanikan masyarakat juga. Waktu vaksin didatangkan, banyak masyarakat merasa panik."

"Namun kemudian, setelah dilakukan sosialisasi secara masif, masyarakat kemudian memahami manfaat dan pentingnya menyelesaikan vaksinasi. Dan ternyata Kepala Ohoi dan masyarakat yang sebelumnya masih ragu-ragu, setelah diberikan penjelasan akhirnya semua paham, bahkan mau cepat-cepat giliran mereka untuk divaksinasi," kata Lonthor.

Kesiapan Vaksinasi untuk Masyarakat

Setelah sukses divaksinasi, para nakes mengaku siap melakukan aksi dan sosialisasi di 19 desa secara keseluruhan dalam kurun waktu dua minggu terhitung sejak vaksinasi tahap ke-2 dilakukan. Lonthor dan nakes lainnya berharap pada saat giliran nantinya, masyarakat tidak datang dengan keterpaksaan. Namun benar-benar paham tentang manfaat dari Vaksin Sinovac.

Oleh karena itu, para kader posyandu di masing-masing desa telah diarahkan untuk melakukan sosialisasi masif. Meskipun selama sosialisasi dilakukan, nakes melihat masih ada keraguan dan ketakutan yang dirasakan masyarakat saat mendengar vaksin. Kendati demikian, petugas kesehatan terus berkomitmen dan berupaya melakukan sosialisasi lebih masif lagi.

"Intinya memang kita semua memahami, dari sebagian besar masyarakat, misalkan di atas 60% sampai 70% yang sudah divaksin, berarti itu sudah mampu untuk memberikan perlindungan kepada keluarganya. Jadi, misalkan di dalam rumah itu ada sasaran 4-5 orang, ternyata cuman 2-3 orang yang divaksinasi, berarti otomatis dalam serumah sudah ada perlindungan., kata Lonthor

Hingga saat ini pihak Puskesmas belum menerima data riil berapa jumlah vaksin untuk masyarakat di Desa Banda Ely, dikarenakan sedang dilakukan pendataan sasaran. Sebelumnya, ada wacana bahwa lansia tidak harus divaksin, namun pemerintah menerbitkan aturan baru agar lansia tetap divaksin sehingga membutuhkan waktu untuk pendataan.

"Harapan kami para tenaga kesehatan agar semua sasaran harus dilakukan vaksinasi, karena dengan adanya vaksinasi, maka dengan sendirinya ada antibodi dalam tubuh. Kemudian penyebaran virus itu sendiri semakin berkurang agar ketika kita beraktivitas bisa bebas dari virus COVID-19. Jadi, tetap kita mempunyai kiat-kiat agar semua sasaran masyarakat melakukan vaksinasi dan yang terpenting adalah tetap disiplin melakukan protokol kesehatan," lanjut Lonthor.

Mengenai pandemi COVID-19, petugas medis mengajak masyarakat semakin sadar akan bahaya dari wabah tersebut. Lonthor mengatakan, kasus positif dan kematian akibat pandemi COVID-19 di Kota Tual dan Maluku Tenggara menjadi tolak ukur dahsyatnya COVID-19. Masyarakat bahkan telah menyaksikan langsung update kasus positif dan kematian akibat COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan.

“Bahkan teman kita yang Kepala Puskesmas ada yang sudah sampai ke tingkat penanganan khusus di rumah sakit. Jadi, virus itu memang ada dan salah satu upaya untuk mencegahnya dengan cara melakukan vaksinasi untuk semuanya, karena memang COVID-19 ini benar-benar mematikan nyawa, apalagi virus ini juga ada yang tanpa gejala yang secara tiba-tiba racunnya sudah di dalam tubuh,” jelas Lonthor.

Ia menginginkan masyarakat dapat mengenal manfaat vaksin dan siap divaksinasi. Mematuhi protokol kesehatan dan siap melakukan vaksinasi untuk menjaga imunitas adalah kunci utama mengakhiri pandemi.



Sumber Foto : antara Foto



Sumber Foto : antara Foto



Kupas Tuntas PeduliLindungi

Sejak diluncurkan pada Maret 2020 lalu, penggunaan aplikasi PeduliLindungi terus berkembang. Tak lagi sekadar menjadi aplikasi utama untuk melakukan *tracing*, *tracking*, dan *fencing* dalam penanganan COVID-19, PeduliLindungi juga kini digunakan dalam proses registrasi Program Vaksinasi COVID-19 Nasional, dan menjadi satu dari tiga aplikasi utama dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19.

Kementerian Komunikasi dan Informatika pun terlibat aktif dalam pengembangan PeduliLindungi sejak awal. Adalah Gunawan Hutagalung, Koordinator Jasa Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, yang terlibat langsung menjadi perwakilan Tim Teknis PeduliLindungi sejak lahirnya aplikasi tersebut.

Gunawan |
| Hutagalung

Dalam wawancara singkat via telepon dengan tim KominfoNext, lulusan Teknik Informatika STT Telkom dan Magister Teknik Elektro Universitas Indonesia ini menceritakan awal mula keterlibatannya dalam PeduliLindungi.

“Memang sejak ada kasus virus ini di Wuhan, Pak Menteri dan Prof Ramli (Dirjen PPI, red.), sudah mengambil inisiatif mempersiapkan infrastruktur TIK untuk membantu penanganan, khususnya kanal informasi. PPI diminta untuk menyiapkan *call center*, *chatbot*, dan semuanya. Dari situ Prof Ramli meminta saya untuk mengkoordinir semua persiapan itu. Saya diminta berkoordinasi dengan Facebook, dengan TelkomSigma, dll. Dari situ mulai akhirnya saya terlibat sampai dengan pembuatan aplikasi PeduliLindungi, dan sekarang sistem Satu Data Vaksinasi COVID-19,” terang Gunawan kepada tim KominfoNext. Sebelumnya, dikutip dari program KominfoTalk, Senin (15/02/2021), Gunawan menjelaskan bahwa sistem pertama yang dibangun begitu COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi adalah *tracking* menggunakan *triangular* BTS.

Dua metode

Tracking

Sebelumnya, dikutip dari program KominfoTalk, Senin (15/02/2021), Gunawan menjelaskan bahwa sistem pertama yang dibangun begitu COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi adalah *tracking* menggunakan *triangular* BTS.

Namun penelusuran tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai kontak erat karena jangkauannya yang cukup jauh, mencapai hingga 200 meter. Oleh karenanya dikembangkan metode kedua, *tracing* kontak erat melalui penggunaan Bluetooth dan *geo-position*.

“Secara global, *tracking* dikombinasikan dengan *tracing* yang mampu melakukan *close contact*, yang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu Bluetooth dan *geo-position*. Pemerintah memilih Bluetooth, dan karena kita sudah punya sistem M-site, *tracing* dengan *triangular* BTS itu, maka kita padu padankan dengan aplikasi. Kita *benchmark* dengan beberapa negara, salah satunya yang terdekat itu aplikasi TraceTogether di Singapura. Maka lahirlah aplikasi PeduliLindungi.”



Dengan teman-teman operator semua, **kita bangun *tracking* berdasarkan *triangular* BTS.** Jadi orang yang terkena COVID-19 kita lacak 14 hari ke belakang, berada di mana dan siapa saja yang berdekatan dengan dia. Dari situ akan kelihatan.

Seiring perkembangan kebijakan penanganan COVID-19, memasuki adaptasi kebiasaan baru, PeduliLindungi didorong untuk menjadi referensi utama bagi otoritas untuk melakukan *screening* di transportasi maupun sarana publik. “Paspur ini akan menunjukkan status orang atas hasil tes COVID-19, apakah itu PCR, Antigen, atau Rapid Test Antibodi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Satgas,” jelas Gunawan.

Dukungan dalam Program Vaksinasi

Dalam mendukung pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 Nasional, PeduliLindungi berfungsi sebagai kanal registrasi dan sertifikat vaksin.

“Registrasi vaksin dilakukan dengan memasukkan enam kode digit terakhir dari NIK, maka kita akan mengetahui apakah kita sudah menjadi sasaran target penerima atau tidak. Setelahnya kita bisa meminta tiket vaksin, dan bisa juga melihat di mana saja pos vaksin terdekat yang bisa digunakan dan berapa antrian di sana,” terangnya.

Aplikasi ini akan terhubung dengan aplikasi PrimaryCare (PCare) yang dibangun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Kemarin kita juga *support* untuk infrastruktur di sana, sementara aplikasi untuk report vaksin namanya SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik). Nanti akan ketahuan semua, akan dipermudah. Setelah vaksin akan diterbitkan sertifikat vaksin di aplikasi, yang nantinya akan digunakan untuk menunjukkan Paspor COVID-19 kita,” jelasnya.

Satu Data Vaksinasi

Gunawan menjelaskan, seluruh data sasaran penerima vaksin saat ini terpusat di sistem Satu Data Vaksinasi yang dikelola Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

“Sistem KPCPEN mengambil data kependudukan yang tersebar di berbagai layanan publik, seperti yang ada di BPJS, SISMINDUK, semuanya ditarik, baru di-*reconcile*. Dengan vaksin yang terbatas, harus ditentukan sasaran penerima. *Filtering*, dibuatlah kebijakan dengan tahapan-tahapan. Akhirnya kita memperkenalkan namanya sistem *top-down*. Kita buat sasaran penerima, kita kirimkan pemberitahuan, dia registrasi ulang, lalu diberikan vaksin,” papar Gunawan.

Proses menentukan sasaran penerima dilakukan dengan melihat data-data yang didapat dari berbagai layanan publik tersebut. “Dari BPJS, kita tahu jumlah orang yang bekerja di layanan publik. Dari Pemda, dari masing-masing PD pasar, berapa pedagang di sana. Itu dimasukkan sebagai sasaran penerima. Rabu ini (17/02/2021) kita akan memulai vaksinasi untuk pedagang pasar. Info siapa pedagang pasarnya



kita dapat dari otoritas yang mengelola pasar, dari swasta ataupun pasar pemerintah," jelasnya.

Gunawan turut menjelaskan, sistem pendaftaran melalui aplikasi saat ini sudah semakin dipermudah melalui 3 sistem dalam Satu Data Vaksinasi, yaitu PeduliLindungi, PCare, dan SMILE.

"Kalau dulu memang statusnya harus registrasi, si otoritas pasar harus mendaftarkan ulang lagi, baru divalidasi, baru dikirimkan tiket vaksinnya. Ini menyebabkan kesimpangsiuran data. Sekarang tidak lagi, sistemnya sudah lebih fleksibel dan lebih mudah," terangnya.

Ketiga aplikasi tersebut akan mempermudah sasaran penerima yang tidak menerima pemberitahuan untuk tetap divaksinasi. "Misalnya pos vaksinnya di Tanah Abang. Jika ada pedagang yang tidak menerima pemberitahuan, dia bisa *go-show*. Langsung melapor, dan akan diarahkan ke bagian registrasi *go-show* melalui aplikasi PCare, dan akan divalidasi langsung oleh otoritas pasar di sana. Setelah itu dikirimkan ke sistem Satu Data Vaksinasi dan akan dikeluarkan tiketnya. Sepanjang dia memang menjadi sasaran penerima yang sah, dia langsung bisa melakukan vaksin. Setelah divaksin, seluruh *report*-nya bisa dilihat di aplikasi PeduliLindungi lagi."

Sementara untuk masyarakat yang tidak menggunakan ponsel pintar, saat ini juga tengah dikembangkan PeduliLindungi berbasis Unstructured Supplementary Service Data (USSD). "Berbasis SMS, untuk yang masih menggunakan *feature phone*. Tapi pengembangannya belum selesai, diharapkan nanti pada saat vaksinasi massal sudah bisa digunakan," jelasnya.



Kendala Terberat

Ketika ditanya tentang kendala terberat tim dalam mengembangkan aplikasi PeduliLindungi, Gunawan justru menekankan pada tingkat penggunaan aplikasi ini di masyarakat. "Kalau dari sisi pengembangan sistem ngga masalah sebenarnya, karena kita punya anak-anak muda yang luar biasa. Tapi paling sulit adalah bagaimana mendorong publik sukarela menggunakan aplikasi ini, karena tantangannya banyak, mulai dari isu keamanan data, isu mengenai perlindungan data pribadi dll."

Ia turut memaparkan data pengguna PeduliLindungi yang hingga saat ini masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pengguna *smartphone*. "Sejak diperkenalkan oleh Pak Menteri di akhir bulan Maret 2020, sampai sekarang pengguna aplikasi ini ada di angka 4,7 juta. Itu sangat sedikit rasionya jika dibandingkan dengan pengguna

smartphone. Pendekatan dari Presiden dan Menteri waktu itu tidak menjadikan aplikasi ini wajib, lebih kepada *voluntary*, kepedulian kita untuk mengatasi pandemi ini. Itu juga kenapa disebut PeduliLindungi."

Lebih lanjut ia menjelaskan, setiap bulannya Tim PeduliLindungi diharuskan untuk melaporkan perkembangan aplikasi PeduliLindungi secara rutin kepada Menkominfo. Namun perkembangan situasi yang dinamis membuat tim hampir setiap hari menyampaikan laporan kepada Menteri Johnny G. Plate.

"Sesuai dengan PMK, kita dari tim harus ada *reporting* ke Pak Menteri setiap bulan. Tapi sebenarnya *reporting*-nya bisa dibilang *daily basis* ya, karena perkembangannya sangat dinamis. Dan Pak Menteri juga selalu melaporkan ini di rapat dengan Komisi I DPR dan lainnya," jelas Gunawan.

Liberalisasi

Tarif Telko

Perjalanan karir Gunawan Hutagalung dimulai sejak tahun 2006, ketika ia menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Tarif Telekomunikasi, Direktorat Telekomunikasi Ditjen PPI. Di tahun tersebut, Gunawan terlibat langsung dalam Tim Tarif dan Interkoneksi untuk melakukan liberalisasi tarif telekomunikasi.

“Jadi di tahun itulah mulai terjadi kompetisi penuh antar operator, yang mendorong sampai sekarang kita bisa menikmati tarif semurah ini. Kan awalnya tarif benar-benar belum liberalisasi, belum terjadi kompetisi, tapi sejak kita menerapkan interkoneksi berbasis biaya, terjadilah kompetisi tarif yang membawa kita sekarang bisa menikmati tarif yang bisa dibilang jauh lebih murah dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelas Gunawan.

Keterlibatannya dalam tim yang dibentuk atas arahan Dirjen PPI saat itu, Basuki Yusuf Iskandar, menjadi pengalaman berkesan baginya. “Waktu itu Dirjennya, Pak Basuki, membentuk Tim Tarif dan Interkoneksi untuk mengeluarkan regulasi itu. Saya masih Kepala Seksi, dan saya bertindak untuk melakukan desain teknis dll. Cukup berkesan, karena semua orang jadi bisa nelfon, sampai dengan pekerja-pekerja informal seperti yang bekerja di rumah itu bisa *nelfon* sepuasnya,” kenangnya.

Pengalaman berkesan lainnya sepanjang perjalanan karirnya ialah saat menyusun Indonesia Broadband Plan (IBP).

“

Cikal bakal IBP itu sebenarnya dari Kominfo, dulu namanya **Dokumen Rencana Kebijakan Broadband Nasional, RKBN**. Tapi diserahkan ke Bappenas karena Bappenas yang mempunyai otoritas untuk membuat perencanaannya. Itu dijadikan dasar bagi Bappenas.

Uniknya, saat proses penyusunan RKBN tersebut, Gunawan berkoordinasi langsung dengan Mira Tayyiba, Sekretaris Jenderal Kominfo yang saat itu masih menjabat pimpinan tinggi di BAPPENAS. “Nah dulu itu Bu Sekjen yang mengkoordinir di Bappenas, Bu Mira Tayyiba. Dulu beliau masih Kasubdit di sana. Saya koordinasi dengan Bu Sekjen, lalu beliau membawa itu (RKBN, red.) ke forum, ke Mastel dll, dan dengan *adjustment* sedemikian rupa lahirlah nama Rencana Pita Lebar Indonesia,” terangnya.

Menurut Gunawan, lahirnya Rencana Pita Lebar Indonesia tersebut berperan penting dalam orkestrasi pengembangan pita lebar di Indonesia. “Dengan itu ada orkestrasi pengembangan broadband, Minimal sampai tahun 2019 kemarin, sebelum sekarang kita sudah masuk ke Transformasi Digital yang digaungkan oleh Pak Menteri dan Pak Presiden.”





**Nakes Klinik
Pratama Kominfo
Mendapat
Kesempatan**

**Vaksin
COVID-19
Tahap Pertama**

Pemerintah mulai melaksanakan program vaksinasi COVID-19 tahap pertama pada Rabu, 13 Januari 2021. Tenaga kesehatan (nakes) merupakan salah satu kelompok yang menjadi salah satu prioritas vaksinasi pada tahap pertama. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan, vaksinasi COVID-19 diprioritaskan kepada para tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan adalah profesi yang sehari-hari menjadi garda terdepan dan bersinggungan langsung dengan COVID-19.

Vaksinasi COVID-19 kepada para tenaga kesehatan diharapkan dapat membuat para tenaga kesehatan aman dari penyakit. Hal yang sama juga menjadi harapan bagi delapan tenaga kesehatan Klinik

Pratama Kementerian Kominfo yang dikepalai oleh dr. Lutfi Oscar Bayuni, yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti vaksinasi tahap pertama.

Usai mendapatkan suntikan kedua pada tanggal 3 Februari 2021 di Puskesmas Gambir, dr. Lutfi menjelaskan bahwa untuk dapat menerima vaksin COVID-19, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para nakes. Pertama, persyaratan administrasi yaitu nakes yang sudah teregistrasi oleh organisasi profesinya, dan sudah memiliki surat izin praktik. Syarat lainnya yaitu belum pernah terinfeksi COVID-19 sebelumnya, tidak memiliki penyakit penyerta, dan tidak sedang hamil.

Berikut persyaratan penerima vaksin yang telah diperbaharui oleh Kementerian Kesehatan:

1. Jika pernah terpapar COVID-19 dan sudah sembuh lebih dari tiga bulan, bisa diberikan vaksinasi.
2. Berusia di atas 18 tahun. Kelompok lanjut usia (lansia), sudah bisa mendapatkan persetujuan untuk diberikan vaksin COVID-19.
3. Bagi ibu hamil vaksinasi masih harus ditunda. Jika ingin melakukan perencanaan kehamilan, bisa dilakukan setelah mendapat vaksinasi kedua COVID-19.
4. Tekanan darah harus di bawah 180/110 mmHg.
5. Ibu menyusui sudah bisa mendapat vaksinasi.
6. Syarat penerima vaksin COVID-19 yang keenam adalah, para pengidap penyakit kronik, seperti PPOK, asma, penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal, penyakit hati yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, vaksinasi ditunda dan tidak bisa diberikan.
 - Tetapi, jika sudah berada dalam kondisi terkendali, diharapkan membawa surat keterangan layak untuk mendapat vaksinasi dari dokter yang merawat.
 - Selain itu, untuk penderita TBC yang sudah menjalani pengobatan lebih dari dua minggu juga sudah bisa divaksinasi.
7. Pada vaksinasi pertama, untuk orang-orang yang memiliki riwayat alergi berat, seperti sesak napas, bengkak, kemerahan di seluruh badan, maupun reaksi berat lainnya maka tidak akan diberikan lagi vaksinasi kedua.
8. Jika sedang mendapat terapi kanker, maka diwajibkan untuk membawa surat keterangan layak divaksinasi dari dokter yang merawat.

Dalam sesi wawancara di Radio Kominfo pada Senin 8 Februari 2021, dr. Lutfi menerangkan bahwa dalam syarat penerima vaksin COVID-19, selain harus dalam kondisi sehat, orang yang memiliki penyakit komorbid tertentu juga tidak disarankan untuk menerima vaksin khususnya pada vaksin COVID-19 buatan Sinovac, seperti:

1. Penyakit Autoimun Sistemik (SLE, Sjogren, vaskulitis, dan autoimun lainnya)
2. Sindrom Hiper IgE
3. Pasien dengan infeksi akut
Pasien dengan kondisi penyakit infeksi akut yang ditandai dengan demam yang menjadi kontraindikasi vaksinasi.
4. PGK (penyakit ginjal kronis) dialisis, PGK non-dialisis, transplantasi ginjal, sindrom nefrotik dengan imunosupresan/kortikosteroid
Saat ini, pemberian vaksin belum direkomendasikan pada pasien PGK non-dialisis, PGK dialisis, resipien transplantasi, dan sindroma nefrotik yang menerima imunosupresan/kortikosteroid.
5. Hipertensi
Beberapa uji klinis dari sejumlah vaksin Corona telah meneliti pasien dengan hipertensi. Namun, populasi ini belum direkomendasikan mendapat vaksin Corona karena belum ada rekomendasi dari tim uji klinis vaksin yang dilakukan di Indonesia. Rekomendasi berikutnya menunggu hasil uji klinis di Bandung.
6. Gagal jantung
7. Penyakit jantung koroner
8. Rematik autoimun
9. Penyakit-penyakit gastrointestinal suntikan vaksin covid19 tahap pertama
10. Hipertiroid/hipotiroid karena autoimun
11. Kanker
Pasien kanker, kelainan hematologi seperti gangguan koagulasi, pasien imunokompromais, pasien dalam terapi aktif kanker, pemakai obat imunosupresan, dan penerima produk darah belum layak mendapatkan vaksin Corona.
12. Pasien hematologi onkologi
Studi klinis Sinovac tidak melibatkan pasien dengan kondisi tersebut. Dengan tidak adanya data pada kelompok tersebut, maka belum dapat dibuat rekomendasi terkait pemberian vaksin Sinovac pada kelompok ini.

Vaksin yang diberikan kepada nakes Klinik Pratama Kementerian Kominfo adalah vaksin hasil kerja sama PT Bio Farma (Persero) dengan Sinovac. Vaksin Sinovac dibuat dengan mematikan virus COVID-19 (inactivated) sehingga berfungsi untuk memicu reaksi imun tubuh ketika masuk ke tubuh penerima vaksin. Vaksin jenis ini tidak menimbulkan risiko terinfeksi dikarenakan bahan pembuatan vaksin dari virus yang telah dimatikan.

“Kenapa vaksinasi COVID-19 membutuhkan dua kali dosis penyuntikan. Hal itu dilakukan karena sistem imun membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengetahui bagaimana cara efektif melawan virus,” ungkap dr. Lutfi.

Menurut dia, suntikan pertama dilakukan untuk memicu respons kekebalan awal, sementara suntikan kedua untuk menguatkan respons imun yang telah terbentuk. “Hal ini memicu respons antibodi yang lebih cepat dan lebih efektif di masa mendatang,” ujar dr. Lutfi menambahkan.

“Karena vaksin COVID-19 menangani penyakit yang tergolong masih baru, jadi belum ada penelitian yang dapat mengetahui berapa lama kemampuan

vaksin untuk melindungi penerima vaksin dari risiko infeksi COVID-19,” kata dr. Lutfi.

Namun, manfaat vaksin COVID-19 yang diterima, selain dapat menciptakan respons antibodi untuk sistem kekebalan tubuh, vaksin ini juga dapat mencegah virus masuk ke dalam tubuh karena merangsang sel tubuh manusia, terutama sel yang memproduksi imunoglobulin. Akibatnya, tubuh individu akan kebal pada SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19. Selain itu, vaksin ini juga dapat menghentikan penyebaran virus ke seluruh tubuh, dan manfaat yang terakhir jika kita menerima vaksin, otomatis tubuh akan terlindungi dari serangan virus COVID-19 yang pada akhirnya akan melindungi orang-orang di sekitar kita.

Mengingat begitu banyaknya manfaat vaksin COVID-19 bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita, dr. Lutfi berpesan jika ada masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk divaksin COVID-19, jangan menunda atau menolak karena vaksin ini sangat baik bagi kita dan sudah terbukti. Vaksinasi ini bisa menjadi salah satu upaya untuk menekan laju penyebaran virus corona yang saat ini masih belum terkendali.

Tetap Jalankan Protokol Kesehatan

Lebih lanjut, dr. Lutfi menyampaikan bahwa masyarakat masih memiliki kewajiban untuk menjalankan protokol kesehatan meski sudah ada vaksinasi. Karena selain tetap harus menjaga diri sendiri, masih dibutuhkan waktu untuk mencapai kekebalan kelompok (*herd immunity*). Sehingga upaya 3M, 3T, dan vaksinasi harus tetap dijalankan.

Sebagai salah satu orang yang telah menerima vaksin COVID-19 di Kementerian Kominfo, dr. Lutfi sangat senang dan tenang karena menurutnya di Kominfo kasus COVID-19 terbilang masih banyak sekali dan terus bertambah.

“Setiap kali kami bekerja di klinik selalu merasa was-was karena selalu ada risiko tertular oleh pasien

yang kemudian bisa menularkan keluarga dan orang-orang di rumah. Dengan sudah di vaksin dan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, risiko tertular saat bekerja semakin kecil sehingga meminimalkan rasa kekhawatiran kami saat pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga” ungkapnya.

Menutup wawancara, dr. Lutfi berpesan agar masyarakat tetap patuh protokol kesehatan dengan menjalankan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena vaksin ini diperkirakan butuh waktu sampai 1 tahun hingga dapat didistribusikan dan digunakan oleh seluruh Masyarakat Indonesia.



QnA

Seputar

Vaksin COVID-19

Tanggal 10 Februari 2021 lalu, tim redaksi Majalah KominfoNEXT mendapat kesempatan berkunjung ke kawasan perkantoran Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, untuk melihat perkembangan dan kesiapan pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 Nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Tim KominfoNext berkesempatan bertemu dengan Head of Surveillance & Clinical Trial Division, Bio Farma Vaccine Institute, Dr. Novilia Sjafri Bachtiar, dr., M.Kes., untuk berbincang-bincang seputar pelaksanaan Vaksinasi COVID-19.

Dalam perbincangan siang itu, tim redaksi menyampaikan puluhan pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui tim media sosial Kementerian Kominfo, untuk dijawab secara langsung oleh tim dari Bio Farma. Simak hasil sesi tanya jawab tim KominfoNext dengan Dr. Novilia Sjafri Bachtiar, dr., M.Kes.

KOMINFO



/ Apakah vaksin ini **diberikan secara gratis** kepada seluruh lapisan masyarakat? /

Betul, sesuai dengan arahan Presiden RI, vaksin akan diberikan gratis pada masyarakat sesuai dengan indikasi kegunaan vaksinnya, dengan umur penerima vaksin 18 tahun keatas.



/ Bagaimana dengan **kehalalan vaksin** ini? /

Vaksin ini sudah **mendapat fatwa MUI** yang menyatakan vaksin ini halal.



/ Apabila sudah divaksin, apakah **boleh lepas masker?** /

Banyak orang berpikir ketika sudah divaksin bisa bebas lepas masker. Padahal, tidak 100% vaksin itu bisa menimbulkan kekebalan. Kita juga tidak tahu seberapa besar ancaman virus yang ada di luar, apa virusnya banyak atau sedikit. Jadi selama pandemi, kita harus tetap pakai masker dan menerapkan protokol 5M.





Proses administrasi calon (nurse) sedang bekerja
Berkas kesehatan dan (pilih salah satu) present



Pemeriksaan sebelum menerima yang dilakukan beberapa dokter
Menerima (the vaccine) diberikan ke semua anggota...



Proses pemeriksaan kesehatan pasien sebelum dan sesudah pemberian vaksin
Andalambak prosedur (nurse) di rumah (for) tindakan (for) tindakan (for) tindakan



Pemeriksaan sebelum dan sesudah pemberian vaksin
Menerima (the vaccine) diberikan ke semua anggota...



/ Apakah vaksin ini termasuk dalam **jenis obat**? Apakah vaksin bisa digunakan oleh orang yang sakit? /

Vaksin memang termasuk dalam golongan obat, namun secara fungsi sangat berbeda dengan obat. Vaksin tidak berfungsi untuk menyembuhkan orang sakit, tetapi sebagai bentuk pencegahan, pencegahan agar tidak sakit dan pencegahan dari sakit yang berat. Sehingga bila sudah divaksin, bisa saja dia terjangkit penyakit itu, namun dalam derajat yang lebih rendah. Sehingga vaksin lebih baik dari obat, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.



/ Bagaimana **cara vaksin bekerja** di dalam tubuh kita? /

Vaksin COVID-19 terdiri dari virus yang di-inaktivasi yang akan dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan. Oleh sistem kekebalan tubuh kita (vaksin tersebut, red.) akan dikenali sebagai benda asing. Kemudian mekanisme kekebalan tubuh kita akan membentuk antibodi yang spesifik terhadap vaksin tersebut.



/ Berarti vaksin ini akan membuat kita **kebal dari COVID-19?** /

Betul. Namun kekebalan tersebut juga bervariasi, tergantung dari seberapa tinggi antibodi yang dibentuk. Jadi bisa menjadi kebal penyakit sama sekali, atau bisa juga penyakit tersebut muncul dalam derajat yang ringan.



/ Apakah vaksin ini **mengandung chip?** Apakah vaksin ini dapat mengubah DNA manusia? /

Kalau vaksin ini mengandung chip, pasti harganya mahal sekali. Sehingga itu tidak benar. Jadi, vaksin hanya mengandung virus yang telah di-inaktivasi, adjuvant yang berguna untuk meningkatkan kerja imun, dan pelarutnya. Sehingga tidak mengandung chip, dan tidak dapat mengubah DNA. Vaksin hanya bisa menimbulkan kekebalan spesifik.



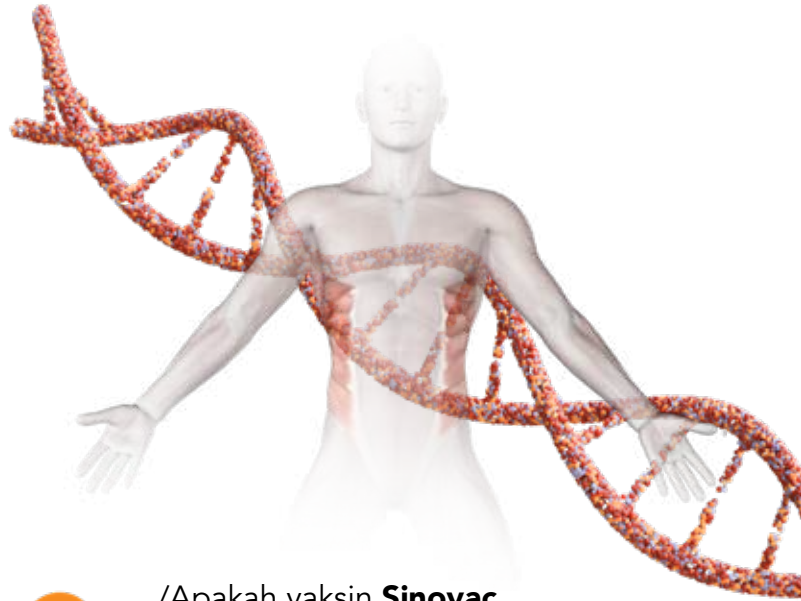
/ **Siapa saja** yang bisa divaksin? Mengapa ada beberapa kriteria yang tidak boleh divaksin? /

Kriteria ini berdasarkan data uji klinis yang telah dilakukan, sehingga orang yang boleh menerima vaksin ialah yang sudah diatas 18 tahun. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan orang-orang dengan dengan penyakit bawaan belum bisa divaksin karena belum ada datanya. Kemudian bagi orang-orang yang sudah pernah divaksin namun mengalami alergi berat, tidak boleh disuntik dosis kedua.



/ Apa benar vaksin dapat **menambah nafsu makan?** /

Dari data yang dikumpulkan, tidak ada didapatkan bahwa vaksin tersebut dapat meningkatkan nafsu makan. Sehingga tidak ada korelasi secara langsung.



/Apakah vaksin **Sinovac berbahaya?** Apakah vaksin Sinovac memiliki efek samping?/

Vaksin dibuat dengan teknologi tinggi serta bahan baku yang telah diverifikasi. Pembuatannya juga telah tervalidasi, mutunya juga diawasi. Sehingga vaksin tersebut secara mutu baik, dan tidak berbahaya. Namun berita hoaks di luar membuat orang-orang lebih takut terhadap vaksin daripada takut dengan virusnya, ini yang terbalik sebenarnya. Kalau bicara efek samping, hampir tidak ada jenis obat yang tidak memiliki efek samping. Efek samping yang paling sederhana, yaitu nyeri pada bagian tubuh yang disuntik, bengkak, dan merah. Jika secara sistemik, dampak yang bisa dirasakan ialah kelelahan atau nyeri otot. Itu yang sering dijumpai pada orang yang telah disuntikkan vaksin.



/ Bagaimana dengan tanggapan bahwa vaksin dapat diterima oleh lansia dan orang-orang dengan **penyakit bawaan?** /

Data selalu di-update, ketika sudah ada uji klinis terhadap lansia dan orang dengan penyakit bawaan, maka vaksin tersebut bisa digunakan oleh golongan orang tersebut.



/ **Mengapa** Indonesia memakai vaksin Sinovac ini? /

Sebelum melakukan kerjasama dengan Sinovac, kita telah melihat list WHO. Melihat mana yang paling cepat prosesnya, serta melihat platform yang digunakan Sinovac juga familiar dengan pengujian di Indonesia.



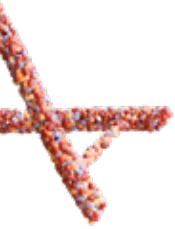
/ Apakah vaksin ini **mengandung bahan pengawet** dan bahan lainnya yang membahayakan? /

Vaksin Sinovac tidak mengandung bahan pengawet. Namun, ada beberapa vaksin lain yang mengandung pengawet, tetapi harus mengikuti batas maksimal untuk dikandung dalam satu dosis vaksin. Sehingga bila ada vaksin yang mengandung pengawet, maka akan tetap aman digunakan.



/ Bagaimana kita mengetahui vaksin masih **dalam kondisi baik** saat disuntikkan? /

Jika penyimpanan vaksin telah sesuai, maka harus dilihat apakah ada label vaksin yang rusak, botol yang retak, atau tutup vaksin yang terbuka. Jika ada kasus tersebut, maka vaksin tidak boleh dipakai. Selanjutnya melihat secara fisik, harusnya vaksin ketika dikocok maka akan larut, bila menggumpal itu bisa jadi ada masalah. Hal-hal itulah yang harus dilihat sebelum vaksin digunakan.





/Apa vaksin tersebut **memiliki waktu kadaluarsa?** Bagaimana cara mengetahuinya?/

Waktu kadaluarsa tergantung dengan uji *stability*/stabilitas vaksin tersebut. Beda vaksin, maka akan beda waktu kadaluarsanya. Ada vaksin yang kadaluarsanya 6 bulan, atau 1 tahun. Kalau masih pengembangan seperti ini 6 bulan, tapi nanti jika vaksin yang datang sudah banyak bisa saja menjadi 1-2 tahun, hal ini tergantung dari data stabilitas vaksin tersebut.



/Proses uji klinisnya berarti cukup panjang ya?/

Cukup panjang, meliputi rekrutmen 1620 orang selama 2,5 bulan dan penelitian tiap subjek selama 6 bulan. Sehingga cukup panjang prosesnya.



/Apakah betul Vaksin Sinovac **tidak dapat dipalsukan?**/

Upaya agar vaksin tidak dapat dipalsukan adalah dengan menggunakan barcode, sehingga dapat discan. Jadi jika vaksin tersebut palsu, maka tidak bisa dipalsukan. Satu botol memiliki satu barcode, ini merupakan upaya agar vaksin tidak bisa dipalsukan.



/Apakah vaksin **diperjualbelikan secara bebas?** Apa bisa diperdagangkan melalui *marketplace*? /

Tidak bisa, karena vaksin harus diberikan oleh tenaga medis. Jadi harus datang langsung ke tempat pemberian vaksin.



/Apakah ada cara lain untuk pemberian vaksin? **Apakah harus disuntik?** Apakah harus disuntikkan pada lengan sebelah kiri? /

Tidak bisa, karena vaksin harus diberikan oleh tenaga medis. Jadi harus datang langsung ke tempat pemberian vaksin.



/Bagaimana Bio Farma melakukan uji klinis Vaksin Sinovac? Bagaimana **proses uji klinis** tersebut? /

Harus tau sebelumnya vaksin tersebut sudah sampai pada fase apa. Harus tau hasil uji klinis sebelumnya. Proses uji klinis dilakukan dengan desain uji klinis, mengurus kemitraan, dan mengurus perizinan dengan mitra, pemerintahan setempat, maupun dengan BPOM.





/ Apakah vaksin yang mau diedarkan ke masyarakat **harus melalui uji klinis** di negara tersebut? /

Tidak perlu, sepanjang datanya lengkap dan memenuhi syarat dan hasilnya bisa diterima, vaksin tersebut tentu bisa diregistrasikan di negara tersebut tanpa uji klinis. Uji klinis Vaksin Sinovac yang dilakukan di Indonesia berguna untuk mempercepat akses, sehingga Indonesia melakukan uji klinis fase 3, karena sebelumnya Vaksin Sinovac telah mencapai uji klinis fase 2.



/ Apa saja **kandungan Vaksin Sinovac** yang sudah diuji oleh Bio Farma? /

Kandungannya sederhana, yaitu inactivated virus, adjuvant, dan pelarut NaCl.



/ **Bagaimana dengan vaksin lain** yang nanti akan masuk ke Indonesia? Kapan masuknya? Apakah Bio Farma akan melakukan uji klinis seperti Vaksin Sinovac? /

Vaksin dengan produsen berbeda akan masuk dengan mitranya masing-masing (tidak selalu dengan Biofarma). Bila datanya sudah lengkap, maka tidak perlu dilakukan uji klinis.



/ Kira-kira **vaksin apalagi** yang akan masuk ke Indonesia? /

Pfizer, Astrazeneca, Moderna. Di luar itu belum ada lagi.



/ Dari informasi yang beredar, katanya Bio Farma sedang **mengembangkan vaksin sendiri**. Apakah benar? Jika benar, bagaimana prosesnya? /

Bukan Bio Farma sendiri, ada melibatkan beberapa institusi seperti Eijkman, Balitbang, dan Ristek. Bibit vaksin akan diterima Maret 2021, kemudian akan diproses, divalidasi proses produksinya, dilakukan proses pre-klinis, uji klinis fase 1-3.



/Kira-kira **butuh waktu berapa lama** untuk menghasilkan vaksin dari Bio Farma?/

Bisa sampai tahun 2022.



/Bagaimana **sistem distribusi** Vaksin Sinovac? Apakah sudah berjalan lancar? Apakah ada kendala?/

Distribusi dengan menggunakan barcode, dengan rantai dingin sesuai dengan suhu yang dibutuhkan vaksin tersebut (2-8o C), lalu dikirim ke Kabupaten atau Kota tujuan, sesuai dengan alokasi pemerintah. Akan dilakukan pengecekan barcode setiap vaksin sampai, agar tau berapa jumlah yang sampai, keterangan suhunya, dll. Dilakukan pengecekan apakah sudah sesuai SOP apa belum.

Data yang disampaikan di atas adalah hasil wawancara per tanggal 10 Februari 2021.



/Terdapat kabar **mati listrik saat pendistribusian** vaksin, sehingga vaksinnya tidak dapat digunakan lagi. Apa kabar tersebut benar?/

Baru tahu kalau ada kejadian mati listrik tersebut, tapi jika ada mati listrik sebentar harusnya tidak masalah. Bisa dilihat suhu naiknya, asal masih 2-8o C, vaksin masih aman digunakan. Kalau ada kejadian mati listrik, sebaiknya jangan membuka pintu pendinginnya.



/Apa saja **kendala distribusi** Vaksin Sinovac selama ini?/

Yang pertama adalah penerbangan, di pandemi seperti ini, tidak semua maskapai menjalankan penerbangan secara normal. Banyak tempat yang tidak dilalui penerbangan. Selain itu, medan dari tujuan juga sangat sulit ditempuh.



Saksikan Video wawancara ft Bio Farma hanya di Youtube Kemkominfo TV



Uji Klinis dan Sistem Distribusi Vaksin COVID-19

Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 perdana kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu, 13 Januari 2021 menandai dimulainya Program Vaksinasi COVID-19 Nasional secara gratis di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, Pemerintah menjamin untuk memberikan vaksin COVID-19 secara gratis kepada seluruh masyarakat.

Dalam kunjungan ke PT Bio Farma pada Rabu, 10 Februari 2021, tim redaksi KominfoNext mendapat kesempatan berbincang dengan Corporate Secretary PT Bio Farma, Bambang Heriyanto, yang juga merupakan satu dari lima Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 yang ditunjuk pemerintah sejak 08 Desember 2020 lalu. Dalam perbincangan siang itu, Bambang memaparkan secara rinci seputar vaksin, proses uji klinis vaksin, hingga pendistribusian vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia.

Vaksin merupakan sebuah komponen virus yang dilemahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Vaksinasi memiliki fungsi melatih kekebalan tubuh manusia. Secara alami sistem tubuh manusia akan membentuk antibodi saat sakit atau terserang patogen (virus atau bakteri). Dengan vaksinasi, tubuh akan mengenali patogen, sehingga saat patogen tersebut masuk ke dalam tubuh, antibodi di dalam tubuh sudah siap untuk melawan patogen tersebut.

Tujuan dilakukannya vaksinasi pada seseorang adalah untuk membentuk herd immunity atau kekebalan gembala. Menurut Ahli Epidemiologi FKM UI dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D, herd immunity adalah suatu istilah untuk suatu keadaan di mana 80 persen populasi mempunyai kekebalan terhadap suatu penyakit dapat melindungi sub-populasi yang rentan dari kelompok sub-populasi yang sakit. (Sumber: <https://www.fkm.ui.ac.id/herd-immunity/>)

Bambang menjelaskan, apabila seluruh masyarakat Indonesia sudah melakukan vaksinasi, maka virus akan gagal mencari inang dan akan mati, sehingga pandemi akan berakhir. Vaksinasi secara massal akan membentuk kekebalan kelompok, di mana ketika minimal 70 persen penduduk sudah divaksin, maka 30 persen lainnya akan terlindungi dari paparan virus tersebut.



Penggunaan Vaksin Sinovac

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggunakan vaksin Sinovac dalam program vaksinasi COVID-19. Pertama kali hadir di Indonesia pada Desember 2020, vaksin Sinovac merupakan vaksin yang aman, sehat, berkhasiat, dan bermutu. Selain itu, vaksin Sinovac juga sudah melewati kualifikasi World Health Organization (WHO).

Vaksin Sinovac menggunakan metode platform *Inactivated Virus* (virus yang dimatikan). PT Bio Farma sebagai penanggung jawab pembuatan vaksin Sinovac sudah mengembangkan platform tersebut, sehingga Bio Farma akan lebih mudah untuk melakukan kendali mutu terhadap vaksin tersebut

Selain *inactivated virus*, kandungan yang terdapat dalam vaksin meliputi beberapa komponen, seperti adjuvandan *buffer* untuk menjaga pH vaksin, serta NaCl sebagai pereda nyeri. Vaksin Sinovac tidak mengandung pengawet, sehingga kesterilannya harus selalu dijaga.

Kedatangan vaksin Sinovac yang pertama dan kedua datang dalam bentuk vaksin jadi, sementara pada kedatangan ketiga dan seterusnya hanya berupa vaksin curah. Vaksin curah adalah vaksin setengah jadi, di mana proses selanjutnya akan diproses di Indonesia dengan menerapkan standarisasi WHO dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Uji Klinis dan Distribusi Vaksin Sinovac

Selain bertanggung jawab dalam pembuatan vaksin, PT Bio Farma juga bertanggung jawab terhadap uji klinis dan distribusi vaksin Sinovac di Indonesia. Sebelum vaksin diedarkan secara resmi, vaksin harus melalui tahapan uji klinis.

Uji klinis memiliki empat tahap, yaitu tahap pre-klinis, uji klinis fase 1, uji klinis fase 2, dan uji klinis fase 3. Tahapan pre-klinis dilakukan dengan uji coba vaksin pada hewan, sedangkan pada tahapan uji klinis fase 1-3 uji klinis dilakukan ke manusia dengan populasi yang terbatas. Setelah dilakukan uji klinis

fase 3 dan memenuhi standar, vaksin akan memasuki tahapan *Post Marketing Surveillance* di mana akan dilakukan pemantauan oleh BPOM RI.

Berdasarkan uji klinis yang dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, terdapat beberapa Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang dilaporkan, seperti demam, kemerahan, dan bengkak. Apabila setelah menerima vaksin ditemukan KIPI dengan demam selama dua hari, maka kejadian tersebut harus dilaporkan ke faskes (fasilitas kesehatan) terdekat.

Sementara dalam distribusi vaksin Sinovac menggunakan Sistem Manajemen Distribusi Vaksin (SMDV) berbasis Internet of Things (IoT). Vaksin akan didistribusikan melalui truk berpendingin (2-8o C) yang suhunya akan dipantau melalui sensor agar suhu tetap stabil.

Pendistribusian vaksin juga dikawal langsung oleh TNI POLRI untuk memastikan keamanan distribusi. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (kemenkes), vaksin akan didistribusikan ke wilayah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,



Vaksin Merah-Putih

Saat ini, PT Bio Farma juga sedang mengembangkan dan melakukan riset terhadap Vaksin COVID-19, yaitu Vaksin Merah Putih. Vaksin Merah-Putih dikembangkan oleh tujuh institusi, yang terdiri dari dua lembaga peneliti dan lima Perguruan Tinggi. Platform yang digunakan dalam vaksin Merah-Putih yang sedang dikembangkan adalah Inactivated Virus, RNA, dan rekombinan.

Bibit vaksin Merah Putih akan diterima pada Maret 2021. Setelah menerima bibit, tujuh instansi tersebut akan diproses, memvalidasi proses produksi, serta melakukan empat tahap uji klinis. Diperkirakan vaksin Merah-Putih siap di Indonesia pada tahun 2022.

hingga ke puskesmas. Untuk menjaga keaslian vaksin dan agar tidak mudah dipalsukan, terdapat kode identifikasi yang terdapat di botol vaksin agar tidak bisa dipalsukan.

Dalam perbincangan siang itu, Jubir Bambang turut memaparkan sejumlah tantangan dalam pendistribusian vaksin Sinovac. Menurutnya, masalah paling besar dalam distribusi yaitu pengiriman melalui jalur udara. Di masa pandemi, tidak semua maskapai menjalankan penerbangan secara normal. Ditambah dengan realita bahwa tidak semua wilayah di Indonesia dilalui jalur penerbangan. Selain itu, geografis Indonesia membuat medan tujuan sulit ditempuh.





Vaksinasi Nasional di Tengah Gempuran Hoaks dan Infodemi

Vaksin COVID-19

“**Infodemi merupakan istilah yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk menggambarkan persebaran hoaks berkaitan dengan pandemi COVID-19.**

Oleh: Fransiskus Emilus D. Kadju

Beberapa waktu lalu jagat maya dihebohkan oleh sebuah infodemi berupa video berdurasi 2:04 menit berisi klaim bahwa, vaksin COVID-19 memiliki *chip* pelacak untuk memantau orang-orang yang sudah divaksin. Video tersebut menampilkan cuplikan video penjelasan Ketua Tim Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, beserta potongan video lainnya, yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 memiliki komponen yang bisa melacak lokasi orang yang telah disuntik vaksin COVID-19.

Faktanya informasi tersebut adalah hoaks, karena *barcode* pada kemasan vaksin COVID-19, sebagaimana dijelaskan Erick Thohir dalam video tersebut, digunakan untuk melacak pendistribusian vaksin, bukan menempel pada orang yang telah menerima vaksin.

Contoh di atas merupakan salah satu dari sekian banyak bukti bahwa saat ini eksistensi masyarakat Indonesia diserang dari dua sisi. Pertama adalah pandemi COVID-19 yang terus menggempur realitas *offline* masyarakat Indonesia hingga saat ini. Kedua, narasi-narasi hoaks seputar vaksin COVID-19 yang menggempur psikologi masyarakat melalui jagad maya.

Trigger-nya jelas, ketika vaksin COVID-19 sudah ditemukan, kemudian dipesan oleh pihak Indonesia untuk didistribusikan secara gratis kepada seluruh masyarakat, muncullah hoaks-hoaks baru seputar vaksin COVID-19, atau disebut infodemi yang membuat masyarakat ragu untuk mengikuti Program Vaksinasi Nasional. Inilah efek konsep “lintasan peluru” yang mana ketika sebuah informasi palsu terus disebar, akan membuat orang semakin yakin akan kebenaran dari informasi tersebut. Inilah *the power of infodemic* yang mengancam kehidupan bangsa Indonesia, selain pandemi COVID-19.

Asal Mula Kata Hoaks hingga Infodemi yang Kontra Produktif

Pada galibnya, hoaks merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “hoax” yang berarti informasi bohong. Seiring dengan disrupsi media komunikasi publik yang ditandai dengan maraknya penggunaan media sosial dan media digital, kata hoaks pun kian populer, yang mana dimaknai sebagai informasi atau berita yang salah, palsu, atau bohong. Seiring dengan populernya kata hoaks, narasi-narasi hoaks pun terus bermunculan dan membuat gaduh jagad maya.

Berdasarkan kamus Oxford, kata hoaks pertama kali muncul sekitar abad ke-18 dari seorang filsuf dan ahli bahasa berkebangsaan Inggris, Robert Nares. Ia menyebut bahwa kata hoaks berasal dari kata kerja *hocus* yang merupakan kependekan dari mantra yang biasa diucapkan oleh para pesulap pada abad ke-17. Kata tersebut diambil dari seorang pesulap yang menyebut dirinya dengan julukan *The Kings Majesties Most Excellent: ‘hocus pocus.’*

Dalam setiap penampilannya, si pesulap selalu menampilkan ragam trik sulap,

dengan melafalkan kata “*hocus pocus, tontus talontus, vade celeriter jubeo*” sebagai mantra. Di sini, masyarakat yang hadir dalam pertunjukan sulap tersebut tahu bahwa yang dibuat sang pesulap hanyalah trik, dan bukan nyata. Kendati tahu bahwa mereka dibohongi, mereka tetap saja menonton dan menganggapnya sebagai hiburan belaka, bukan sesuatu persoalan yang harus didiskusikan secara serius, apalagi percaya.

Seiring dengan perkembangan zaman, kata hoaks kembali *booming* usai munculnya sebuah film Hollywood yang berjudul *The Hoax* pada 2006 lalu, yang mana film tersebut menggambarkan kebohongan. Namun pada era pandemi COVID-19 ini, bukan lagi etimologi kata hoaks yang diperdebatkan, melainkan “*duel fakta*” antara satu narasi dan narasi lainnya mengenai objek dan tema pembahasan yang sama. Debat kusir yang kontra produktif pun terjadi bahkan terus bermunculan layaknya *mobius trip*.

Konsekuensi logisnya, masyarakat jadi bingung tentang mana yang benar dan mana yang hoaks. Sudah barang tentu bahwa kenyataan ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang fakta dan kebenaran, serta kurangnya nalar kritis publik dalam menyaring informasi yang masuk.

Hoaks, dalam konteks narasi-narasi yang berkenaan dengan COVID-19 atau infodemi, masyarakat justru dibuat makin skeptis terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia.

Penanganan Persebaran Konten Hoaks Vaksin COVID-19

Periode 14 Februari 2021 (Pukul 06.00 WIB)

PLATFORM DIGITAL	Sebaran	Takedown
Facebook	367	367
Instagram	9	9
Twitter	45	45
Youtube	36	36
TikTok	15	15
Total :	472	472

Temuan Hoaks Vaksin COVID-19:

108

Infodemi Vaksin COVID-19 sebagai Kejahatan Melawan Kemanusiaan

Tidak dimungkiri bahwa kasus positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu. Melansir situs covid19.go.id pukul 16.12 WIB, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia pada 14 Februari 2021 bertambah 6.765 pasien dari total positif COVID-19 sehari sebelumnya yaitu 1.210.703 orang. Hal ini membuat total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia per 14 Februari 2021 menjadi 1.217.468 orang.

Dari jumlah ini, 1.025.273 di antaranya sembuh, 33.183 meninggal, dan sisanya masih dalam perawatan. Dari jumlah

tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat pertama total positif COVID-19 di ASEAN. Melihat kenyataan ini, tampak bahwa Indonesia dihadapkan pada dua pilihan, yaitu: vaksin COVID-19 massal, atau diam menunggu hingga semua tahapan uji klinis selesai, dengan taruhan nyawa rakyat yang terus hilang dari hari ke hari.

Akhirnya Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi negara memutuskan untuk memberlakukan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Namun sayang, masih saja ada oknum-oknum tak bertanggung jawab, yang dengan bersembunyi di balik akun-akun anonim, terus menyebarkan propaganda penolakan terhadap gerakan vaksin COVID-19 nasional melalui narasi-narasi infodemi. Secara tidak

langsung, hal tersebut merupakan kejahatan melawan kemanusiaan, karena seolah mereka ingin agar masyarakat Indonesia diam dan pasrah terhadap gempuran COVID-19. Ada semacam agitasi terselubung kepada masyarakat agar tidak mengikuti vaksin COVID-19 yang dicanangkan pemerintah.

Berdasarkan data dari Kementerian Kominfo RI, hingga 14 Februari 2021 ditemukan bahwa dari total 472 isu hoaks, terdapat 108 hoaks terkait vaksin COVID-19 atau infodemi yang tersebar di berbagai platform media sosial. Platform dengan tingkat penyebaran hoaks terbanyak adalah Facebook. Kemudian diikuti Twitter, Youtube, Tiktok, dan Instagram.

Salah satu konten hoaks yang cukup meresahkan masyarakat dan pemerintah sejak beberapa waktu lalu, yaitu ketika Presiden Jokowi menjalani vaksinasi secara live tetapi banyak pihak kemudian mengklaim bahwa Presiden Jokowi tidak benar-benar Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka, melainkan hanya vitamin biasa.

Selain itu, ada juga isu hoaks terbaru berupa pesan berantai yang mengatasnamakan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berisi pendaftaran vaksin COVID-19 dari WHO dengan menyertakan tautan pendaftaran. Faktanya, vaksinasi di Indonesia hanya dilakukan oleh pihak pemerintah dan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat.

Narasi-narasi infodemi tersebut lantas membuat masyarakat Indonesia terpecah ke dalam dua pusran, yaitu kelompok yang setuju mengikuti vaksinasi COVID-19, dan kelompok yang tidak setuju mengikuti vaksinasi COVID-19. Melihat dikotomi yang terus bergelung di kalangan masyarakat, tidak tanggung-tanggung Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 terkait Perubahan atas Perpres No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tersebut salah satunya mengatur persoalan seputar sanksi administratif maupun hukum pidana bagi orang yang menolak atau menghalangi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Adapun sanksi yang diterapkan bagi masyarakat yang menolak divaksin COVID-19 dapat berupa denda atau penghentian pemberian bantuan sosial. Hal tersebut ditegaskan pemerintah dalam upaya mewujudkan *herd immunity* (kekebalan komunal) dari COVID-19, mengingat *herd immunity* baru bisa dicapai bila 70% masyarakat Indonesia sudah divaksin.

Pasca dikeluarkannya Perpres tersebut, narasi propaganda pun kembali muncul dari kalangan yang menolak vaksinasi COVID-19. Mereka menilai bahwa Perpres Nomor 14 Tahun 2021 merupakan kebijakan melawan hak asasi manusia. Inilah bentuk propaganda yang sangat berbahaya bagi keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

Mengapa? Karena bila narasi-narasi seperti ini terus meracuni kognisi sosial bangsa Indonesia melalui jagad maya, maka bukan tidak mungkin, masyarakat akan enggan mengikuti vaksin COVID-19. Tentunya bila hal ini terjadi, maka dimensi kesehatan, sosial, dan ekonomi Indonesia akan semakin terpuruk. Tentunya kita semua tidak ingin hal ini terjadi, kecuali bagi mereka yang tidak pro pada kemanusiaan.

Fakta di Balik Vaksin COVID-19

Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau *Emergency Use Authorization* (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co.Ltd.China dan PT Bio Farma (Persero) dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.

Vaksin Sinovac akan diberikan dalam dua dosis dengan 0,5 milimeter per dosisnya. Berdasarkan hasil uji klinis, dipastikan vaksin COVID-19 yang akan digunakan dalam Program Vaksinasi Nasional aman dan tidak menimbulkan efek samping serius.

Dalam pemberian izinnya, BPOM melakukan kajian hasil uji klinis tahap 3 (akhir) pengujian vaksin, termasuk khasiat atau efikasi vaksin yang dilakukan di Bandung, serta didukung data dari Turki dan Brasil. Uji klinis tahap 3 di Bandung menunjukkan vaksin COVID-19 buatan China mempunyai tingkat

efikasi 65,3 persen. Hasil tersebut telah memenuhi persyaratan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang mana efikasi vaksin minimal 50 persen. Angka efikasi mengartikan harapan bahwa vaksin Sinovac mampu menurunkan kejadian infeksi COVID-19 hingga 65,3 persen.

Selain itu, vaksin COVID-19 di Indonesia telah mendapatkan label halal oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 2 Tahun 2021 pada 11 Januari 2021 tentang Produk Vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT Bio Farma (Persero). Fatwa tersebut mengikat pada tiga vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science.Co.Ltd. China dan PT Bio Farma (Persero), yaitu CoronaVac, Vaksin COVID-19, dan Vac2Bio. Oleh karena itu, vaksin COVID-19 produksi Sinovac dan PT Bio Farma boleh digunakan untuk umat Islam di Indonesia.

Terjaminnya vaksin yang dipesan pemerintah Indonesia dari berbagai pengembang vaksin ternama di dunia, dibarengi kesiapan kapasitas PT Bio Farma untuk memproduksi 250 juta vaksin per tahun, serta rencana distribusi vaksin terintegrasi ke seluruh Tanah Air, merupakan bukti bahwa Pemerintah tengah siap memerangi pandemi COVID-19, disamping memerangi berbagai infodemi yang meresahkan masyarakat.

Melawan keraguan sebagian masyarakat Indonesia terhadap vaksin COVID-19, pada Rabu (17/02/2021), Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima vaksin Sinovac. Lebih lanjut, hal tersebut merupakan sinyal kuat bahwa vaksin tahap ke-2 sudah siap diberikan kepada masyarakat, terlebih warga lanjut usia (lansia). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun mengatakan, dirinya berharap vaksinasi COVID-19 yang diterima Wakil Presiden Ma'ruf Amin dapat menjadi contoh bagi warga lansia lainnya agar tidak terpengaruh oleh hoaks dan infodemi yang ada serta termotivasi mengikuti vaksinasi COVID-19.

Sinergitas Pemerintah dan Masyarakat Lawan Hoaks dan Infodemi

Dalam upaya menghadapi hoaks dan infodemi, pemerintah melalui Kementerian Kominfo, selain terus memantau persebaran hoaks seputar vaksin COVID-19 selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, juga aktif mengklarifikasi narasi-narasi hoaks tentang vaksin COVID-19 dengan pendasaran yang jelas dan bukti yang valid dan memberikan *labeling* hoaks, misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Kementerian Kominfo juga melakukan *law enforcement* terhadap konten-konten infodemi seputar vaksin COVID-19 dengan memblokirnya (*take down*) dari jejaring media sosial sehingga potensi penyebarannya bisa dibendung.

Selain bergerilya di hilir, Kementerian Kominfo juga berupaya melawan hoaks dan infodemi dari hulu melalui aksi preventif yaitu meningkatkan rasio literasi digital di kalangan masyarakat melalui program literasi digital. Melalui program yang dikoordinasi oleh Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi tersebut, masyarakat diarahkan untuk bisa mengidentifikasi informasi hoaks yang beredar, termasuk infodemi.

Kementerian Kominfo juga melibatkan pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi kepada masyarakat, termasuk berkolaborasi dengan 108 organisasi, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dan juga sektor swasta yang berfokus pada literasi digital masyarakat.

Namun, perlu disadari bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Upaya memberantas konten negatif di internet juga membutuhkan dukungan dari seluruh entitas masyarakat dan bangsa, tanpa terkecuali. Hal sederhana yang bisa dilakukan masyarakat ialah: **Pertama**, tidak boleh pasif menerima segala informasi yang berseliweran di jagad maya, melainkan harus memiliki rasa “curiga” apakah informasi tersebut benar atau tidak, karena curiga adalah awal dari kesadaran kritis. Hanya dengan membangun kesadaran kritis, masyarakat akan sulit dipengaruhi oleh dogmatisme hoaks dan propaganda irasional yang massif dilakukan oleh kaum oportunist, tidak hanya untuk isu vaksin COVID-19, tetapi juga untuk semua isu yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI, serta isu-isu anti Pancasila dan UUD 1945.

Guna membantu masyarakat memerangi infodemi seputar vaksin COVID-19, Pemerintah telah menyiapkan situs <http://sd.id/infovaksin> yang bisa diakses secara terbuka oleh semua entitas masyarakat. Caranya mudah, cukup memasukkan kata atau kalimat yang ingin dicari seputar vaksin COVID-19, masyarakat dapat mengakses dan membaca semua penjelasan yang valid. Melalui laman tersebut, masyarakat bisa membuktikan kesahihan dari sebuah isu yang berhubungan dengan vaksin COVID-19, apakah bersifat infodemi atau tidak.



Kedua, masyarakat baik secara mandiri maupun komunal bisa memerangi hoaks dan infodemi. Caranya juga mudah, cukup bergabung dan ikut terlibat dalam grup-grup diskusi antihoaks yang ada di Facebook seperti Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage Indonesian Hoaxes, Grup Sekoci, Grup Turn back Hoax, dan grup-grup lainnya yang berikhtiar melawan hoaks dan propaganda. Dalam grup-grup tersebut, masyarakat bisa membangun diskusi terkait isu apa saja yang terindikasi hoaks, termasuk seputar infodemi vaksin COVID-19.

Ketiga, bila menemukan narasi-narasi terindikasi hoaks dan infodemi di platform digital, siapapun bisa melakukan aduan kepada Kementerian Kominfo dengan mengirimkan email ke aduankonten@kominfo.go.id untuk kemudian diproses oleh pihak Kominfo. Masyarakat pun dapat melaporkan konten-konten hoaks dan infodemi melalui berbagai kanal informasi yang tersedia seperti media sosial Facebook, Twitter, Instagram, hingga Google yang menyediakan fitur *report* atau *feedback* untuk melaporkan berita yang mengandung informasi negatif.

Keempat, selain masyarakat umum, para pemuda pun harus bangkit melawan hoaks dan infodemi yang ada. Jika dahulu para pahlawan merebut kemerdekaan dengan cara menghadapi penjajah dari negeri antah-berantah, maka pada zaman *cyberspace* ini anak-anak bangsa harus berjuang memerdekakan diri dan lingkungan dari hoaks yang memecah belah keutuhan NKRI. Generasi muda hendaknya menjadi agen perubahan yang tidak boleh diam, melainkan mulai mengambil langkah untuk menyebarkan konten-konten positif di jagad maya.

Semangat tersebut bisa ditularkan melalui artikel ataupun konten kreatif sehingga *engagement* positif di jagad maya menjadi semakin luas. Dengan demikian, narasi-narasi infodemi, hoaks, dan provokasi tidak akan mendapat tempat yang serius dalam percakapan publik di jagad maya. Semuanya akan kembali pada asalnya, yaitu "*hocus pocus*;" sesuatu yang ditertawakan karena dianggap lucu dan tidak dianggap sebagai suatu kebenaran, apalagi sampai dipercaya.



Program vaksinasi COVID-19 telah berjalan secara bertahap sejak 13 Januari 2021 lalu. Pemerintah menaruh harapan melalui program vaksinasi ini, masyarakat dapat segera memperoleh kesempatan untuk divaksinasi dalam rangka mewujudkan *herd immunity* sehingga Indonesia dapat segera keluar dari pandemi COVID-19 dan produktif secara sosial dan ekonomi.









Mekanisme pendataan sasaran penerima vaksin COVID-19 di Indonesia dilakukan secara *top-down* melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19, yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait atau sumber lainnya. Data yang digunakan meliputi nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat tempat tinggal sasaran. Sistem Informasi Satu Data penerima vaksin COVID-19 dibuat untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data dan menghindari informasi data ganda.





Pemerintah menjadwalkan vaksinasi tahap I pada periode Januari – April 2021 yang ditujukan untuk tenaga kesehatan. Setelah tahap I selesai, dilanjutkan dengan tahap II secara bertahap di seluruh Indonesia. Sasaran vaksinasi tahap II yaitu kelompok masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas tinggi sehingga rentan terpapar virus. Lebih dari 38 juta orang ditargetkan untuk menerima vaksin COVID-19 pada tahap II ini.



Bio Farma, sebagai BUMN produsen vaksin juga berupaya mengembangkan vaksin bekerjasama dengan institusi dalam negeri melalui konsorsium nasional seperti Kementerian Riset dan Teknologi / BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, serta Lembaga Eijkman sebagai penyedia bibit vaksin yang rencananya akan diserahkan kepada Bio Farma pada bulan Maret. Selanjutnya Bio Farma akan melakukan proses validasi Proses ini uji praklinis Proses ini diperkirakan akan memakan waktu hingga tahun 2022.

Perlu diingat bahwa tubuh kita membutuhkan waktu untuk membentuk antibodi atau kekebalan tubuh. Sehingga, siapapun yang sudah vaksinasi tetap harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan tetap menerapkan 5M: Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan, Membatasi mobilitas, dan Menjauhi kerumunan.







Hari Pers Nasional

2021

Bangkit dari Pandemi COVID-19



Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2021 diperingati masih dalam suasana Pandemi COVID-19. Provinsi DKI Jakarta dipilih sebagai tempat penyelenggaraan pada tahun ini, bertempat di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara.

Sebelum pelaksanaan acara puncak peringatan, sehari sebelumnya diselenggarakan Konvensi Nasional Media Massa HPN 2021, Senin (8/2/2021).

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang hadir secara virtual pada kesempatan konvensi tersebut menyampaikan *keynote speech* dengan mengambil topik "Membangun Ekosistem Pers yang Berkelanjutan".

Pada sesi pemaparan tersebut, Menteri Koinfo menyampaikan bahwa kebangkitan media sosial (medsos) sebagai media yang dipercaya masyarakat dapat memantik isu-isu yang lain di masa depan, yakni permasalahan hak cipta, hak reproduksi konten atau *publisher right*. "Hal ini tentu perlu disikapi dengan bijak. Meski

digitalisasi membuat pers dan media melakukan perubahan dalam berbagai proses bisnis yang ada, jangan sampai semangat untuk terus memberitakan informasi yang aktual, faktual, akuntabel itu dapat atau menjadi berubah," tegasnya.

**“
Kita harus terus
waspada atas infodemik
yang mengisi ruang
berita melalui *post-truth*,
hoaks, disinformasi,
misinformasi, *fake news*,
yang membingungkan
masyarakat.”**

- Johnny G. Plate -

Menteri Koinfo kemudian mengingatkan, tantangan digitalisasi justru harus dilihat sebagai suatu peluang untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas mulia insan pers dalam menyebarkan informasi guna mencerdaskan kehidupan bangsa. "Tagline ini berulang kali dan terus disampaikan guna mencerdaskan

kehidupan bangsa," ucapnya. Menteri Koinfo juga mengingatkan memang akan ada persaingan luar biasa di tengah disrupsi teknologi, ditambah dengan kondisi saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pers tetap harus mengedepankan fungsi utamanya, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kondisi yang terus berubah menurut Menteri Johnny harus direspon dengan semangat untuk bergerak maju melalui peningkatan kemampuan insan pers nasional kita terlebih bagi pelaku media siber yang begitu cepatnya menjangkau masyarakat.

"Kerja bersama antara industri pers dan stakeholder dalam menciptakan tata kelola media yang *agile* sangatlah diperlukan, melalui upaya diversifikasi produk-produk media, intensifikasi kualitas produk-produk jurnalisme, serta ekstensifikasi faktor-faktor penting dalam industri pers dan media," ungkap Menteri Koinfo.

Ditegaskannya, hal tersebut harus terus diupayakan agar industri pers dan media dapat selalu meningkatkan kualitas dan profesionalismenya.

Kebe- basan Pers

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koinfo mengatakan jika berbicara mengenai media yang terlintas adalah kebebasan. "Namun saat bicara media, yang langsung muncul di benak pikiran saya adalah kebebasan. Di satu sisi kita bicara kebebasan-kebebasan yang luar biasa, tentu

itu terkait dengan konten. Tapi di sisi lain kita membutuhkan juga regulasi-regulasi yang kuat dalam mengatasi kompetisi yang semakin luar biasa."

Menteri Johnny mengatakan bahwa saat ini pers didorong untuk turut bertransformasi dan terus beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi dan dampak dari COVID-19 terhadap industri ini.

"Kemajuan teknologi dan digitalisasi membuat cakupan pers serta media semakin luas mengingat masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi itu sendiri juga," ungkapnya.

Di sisi yang informasi menurut Menteri Koinfo bahwa kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan gratis bahkan turut meningkat dengan adanya digitalisasi.

"Saat ini kita sedang menghadapi COVID-19, kami (Koinfo, .red) tentu terus mengajak agar pemerintah bersama masyarakat dan ekosistem media selalu bergandengan tangan, saling mendukung upaya bangsa kita memutus rantai COVID-19 sekaligus bersama-sama tergabung dalam usaha bersama kita untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional," pungkas Menteri Johnny.

Tiga Pelajaran bagi Media

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam Pembukaan Konvensi HPN 2021 mengapresiasi pemilihan tema dalam HPN 2021. "Tema yang diangkat tepat, membangun ekosistem kalau kita pelajari evolusi bisnis awalnya monopoli, berkembang ke kompetisi. Selamat HPN 2021 selamat menjalani konvensi,

dunia pers tetap jaya. Demokrasi berkualitas Indonesia tetap jaya," pungkasnya.

Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers juga menekankan tiga pelajaran yang dapat diambil media ketika menghadapi pandemi COVID-19. Pertama, yakni perubahan. Menurut

M. Nuh, tidak hanya masyarakat dunia, media pun turut merasakan dampak pandemi COVID-19. "Oleh karena itu mau tidak mau kita harus berubah," ungkapnya.

Pelajaran kedua, menurutnya adalah tentang kebersamaan dalam membangun optimisme. "Media kita, insan pers terus menggelorakan optimisme dan empati publik, karena jawaban saat kita menghadapi persoalan besar adalah optimisme dan empati publik."

Terakhir, ia mengingatkan pentingnya bagi insan pers bagaimana cara mengolah data menjadi informasi. "Pelajaran ketiga, jangan sekali-kali media abai terhadap data, tidak mampu mengelola data menjadi informasi. Kalau itu yang terjadi justru tidak mencerdaskan kehidupan bangsa malah membodohi," katanya.

Berjuang Lawan Pandemi

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir dalam peringatan Hari Pers Nasional 2021 selaku tuan rumah tempat pelaksanaan acara HPN tahun ini.

Gubernur Anies mengatakan, karena pandemi COVID-19 ini berbeda dengan bencana lain seperti menghadapi tsunami, gempa, bencana gunung meletus, atau ketika hujan hingga sungai meluap, Oleh karenanya dibutuhkan penanganan krisis yang berbeda.

"Bencana itu, peristiwanya terjadi sekali, sesudah itu dampaknya dikelola. Kali ini, peristiwanya terjadi terus menerus dan kita

belum tahu ujungnya kapan dan bagaimana. Untuk kita kendalikan ini maka dibutuhkan langkah bersama di tingkat makro yakni kebijakan dan langkah bersama di tingkat mikro." katanya.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, agar hal tersebut bisa berlangsung, harus ada kesamaan kesadaran, ada kesetaraan pengetahuan, ada pemahaman yang tepat dan siapa yang bisa memainkan peran itu.

"Kemudian teman teman pers memiliki kesempatan untuk memiliki peran membangun kesadaran, karena inilah yang kemudian bisa memunculkan bagaimana saya pakai masker,

jaga jarak, itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman kita dan hari ini media menjadi instrumen yang luar biasa penting," tuturnya.

Instrumen penting itu menurut Gubernur Anies terutama, dalam memonitor kebijakan pemerintah termasuk soal 3T (*testing, tracing, treatment*) dan mengkampanyekan perilaku 3M (memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan) ke masyarakat.

Gubernur Anies pun mengajak seluruh insan pers di Indonesia yang tengah memperingati HPN 2021 untuk mengawal dan berjuang bersama dalam upaya melawan pandemi COVID-19.

"Pandemi COVID-19 saat ini melanda dunia, bukan hanya kita di Indonesia. Musuh bersama yang kita hadapi sekarang adalah, bagaimana berjuang melawan mengalahkan COVID-19, dan mengantisipasi semua dampak negatif dari COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia," pungkasnya.



Peran Pers untuk Edukasi Pemulihan COVID-19

Peringatan Hari Pers Nasional tahun 2021 mengusung tema "Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan Pers sebagai Akselerator Perubahan". Bukan tanpa alasan, tema itu menjadi salah satu perhatian seluruh bangsa Indonesia agar pers mampu menyampaikan informasi yang objektif, membangun, dan mengedukasi masyarakat. Menjadi bagian penting dalam upaya bangsa untuk melawan pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional.

Apresiasi khusus diberikan Presiden Joko Widodo kepada pers Indonesia. Selama masa pandemi, menurutnya pers membantu pemerintah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan dan pada gilirannya mampu mencegah penyebaran COVID-19.



“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada insan pers, karena membantu pemerintah untuk mengedukasi masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat,” ujarnya dalam acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Bahkan, Kepala Negara mengajak insan pers untuk bersama-sama membangun harapan dan optimisme untuk mewujudkan keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 beserta dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

“Pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. Mari bersama-sama membangun harapan, menyuarakan optimisme, dan kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dan krisis ekonomi, juga meraih banyak lompatan kemajuan,” ujarnya.

Apresiasi juga disampaikan Presiden karena insan pers tetap berkomitmen untuk berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. “Saya tahu rekan rekan pers tetap bekerja dan

berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi, dan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Presiden, pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers, mengingat jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan juga di masa yang akan datang. Bersama-sama, Presiden mengajak pers membangun harapan, menyuarakan optimisme.



**“ Mari kita
bersama
membangun
harapan,
menyuarakan
optimise.**

Kado 5 Ribu Vaksin untuk Wartawan

Dalam peringatan HPN 2021 ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah memberikan apresiasi kepada insan wartawan yang akan menjadi penerima vaksin COVID-19 gelombang berikutnya. Pemerintah, menurut Kepala Negara, akan memberikan 5.000 vaksin untuk awak media pada akhir Februari hingga awal Maret nanti.

"Saya yakin banyak awak media yang sudah ingin divaksin, saya sudah bisik-bisik dengan Prof. Nuh (Ketua Dewan Pers), untuk di akhir bulan Februari sampai awal Maret nanti untuk awak media. Sudah kita siapkan kira-kira 5000 orang untuk bisa divaksin," tuturnya.

Menurut Presiden, saat ini pelaksanaan program vaksinasi sedang fokus untuk tenaga kesehatan dan juga para pelayan masyarakat, termasuk pedagang pasar yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. "Nanti keluar dari Bio Farma 12 juta vaksin, kita berikan 5.000 untuk awak media," tegasnya.

Di tengah pandemi yang berdampak pada terjadinya kontraksi ekonomi, pemerintah juga tidak menutup mata atas kendala dan tantangan yang dihadapi insan pers. Presiden menyatakan pemerintah berusaha meringankan beban industri media, yang dilakukan dengan cara memberikan beragam insentif.

"Saya menyadari insan pers juga menghadapi masa-masa sulit di era pandemi sekarang ini. Kita semua tau permasalahan kesehatan dan ekonomi membebani semua negara termasuk negara Saya tahu industri pers sebagaimana sektor swasta yang lain sedang menghadapi juga masalah perusahaannya, masalah keuangannya yang juga tidak mudah," tuturnya.

Oleh karena itu, Presiden menegaskan pemerintah berusaha untuk meringankan beban industri media salah satunya dalam hal kewajiban membayar pajak. "PPH-21 bagi awak media telah dimasukkan dalam daftar pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya, pajak

dibayar oleh pemerintah dan ini berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan, juga untuk industri media dilakukan pengurangan PPH Badan, kemudian pembebasan PPh-22 impor dan percepatan restitusi dan insentif ini juga berlaku sampai Juni 2021," tegasnya.

Insentif juga diberikan bagi industri dalam bentuk pembebasan abonemen listrik. Memang, Presiden mengakui, keringanan dan bantuan yang diberikan kepada industri media dan awak media tersebut memang tidak seberapa. "Saya tahu, perlu saya sampaikan beban pemerintah juga berada pada posisi yang sangat berat, selain berat untuk menangani masalah kesehatan, juga berat dalam menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan. Salah satu belanja pemerintah yang dibelanjakan adalah vaksin untuk vaksinasi dan pemerintah sekarang sedang bekerja keras untuk memperoleh vaksin," jelasnya.



Presiden menyetujui adanya konvergensi dan *level of playing field* yang adil pada media. Presiden menegaskan pemerintah juga menerbitkan regulasi untuk mengatur perimbangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal itu dilatari fakta bahwa industri media sedang terdesak dengan perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat.

“Saya setuju diperlukan konvergensi dan *level of playing field* yang adil, sebagian aspirasi ini sudah ditampung dalam Undang Undang Cipta Kerja yang saat ini barusan terbit PP-nya, yaitu PP tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran,” tuturnya.

Bahkan secara khusus, menurut Presiden, pemerintah masih membuka diri terhadap aspirasi dari awak media. “Saya akan perintahkan kepada menteri-menteri terkait dengan rancangan regulasi yang melindungi *Publisher Right*, agar manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konvensional dengan *over the top* yaitu layanan melalui internet”, ujarnya.

Presiden juga menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media. “Saya juga telah menerima laporan bahwa telah terbit Permen yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, aturan ini mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dan platform digital,” jelasnya.

Menjaga Ekosistem



Acara Puncak

Kegiatan Puncak HPN digelar di Candi Bentar Hotel Putri Duyung Resort Ancol Jakarta, yang diisi dengan penandatanganan antara PPKI dan beberapa lembaga dan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan untuk 10 daerah dan Anugerah Adinegoro yang diberikan kepada Insan Pers.

Puncak Peringatan HPN diikuti oleh sejumlah peserta dari seluruh Indonesia. Peringatan tahun ini juga disebut menjadi yang terbesar karena diikuti oleh kurang lebih 5.000 peserta secara virtual dari berbagai lokasi.

Hadir secara langsung di Istana Negara di antaranya ialah Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD

RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, hingga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Atal Sembiring Depari.

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang ditetapkan Sebelum Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1985 dibuat, Hari Pers Nasional telah digodok pada 1978 sebagai salah satu keputusan Kongres ke-28 Persatuan Wartawan (PWI) di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam Kongres tersebut, sejumlah tokoh hendak memperingati peran pers nasional dalam sejarah kemerdekaan Indonesia melalui penetapan satu hari bersejarah.

Pada sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung tanggal 19 Februari 1981, disepakati peringatan untuk pers dirayakan setiap tahun setiap tanggal 9 Februari. Perayaan tersebut digelar setiap tahun secara bergantian di ibu kota provinsi se-Indonesia dengan berbagai tema. (B.Humas Kemkominfo-Sina)



“Kado” HPN 2021, Pemerintah Siapkan 5 Ribu Vaksin untuk Wartawan

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan lima ribu vaksin yang akan diberikan kepada awak media menjadi kado di Hari Pers Nasional 9 Februari 2021. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada peringatan HPN di Istana Negara menargetkan vaksinasi untuk insan pers dilakukan akhir Februari hingga awal Maret mendatang.

“Saya kira kita perlu berterima kasih kepada Bapak Presiden yang mempunyai perhatian secara khusus juga, jadi ini saya kira kado ulang tahun atau kado Hari Pers Nasional,” ujarnya dalam program Prime Talk Metro TV, dari Jakarta, Selasa (09/02/2021) malam.

Menurut Menteri Johnny kebijakan keberpihakan itu selain mengutamakan awak media sebagai garda informasi penanganan COVID-19, juga sekaligus mengajak ekosistem industri pers melakukan vaksinasi lebih awal sesuai dengan keputusan Presiden RI.

Presiden, kata Menteri Johnny menekankan topik utama dalam memperingati HPN 2021 adalah melihat tantangan industri media terhadap COVID-19 dan disrupti teknologi. “Ini adalah dua hal yang juga di address secara baik oleh Bapak Presiden,” ujarnya.

PORTAL
KOMINFO.GO.ID

Ajak Masyarakat Waspadai Hoaks, Kominfo Sediakan Kontak 24 Jam

Berita bohong atau hoaks dengan pengemasan sedemikian rupa kerap muncul dan membuat masyarakat percaya. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat sejak 23 Januari 2020 s.d. 1 Februari 2021 terdapat 1.402 isu hoaks yang berkaitan dengan COVID-19. Khusus untuk vaksin, Kementerian Kominfo telah menangani 97 temuan isu hoaks hingga 1 Februari 2021.

Koordinator Pengendalian Internet Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Anthonius Malau mengajak masyarakat untuk mewaspadai berita yang provokatif dan tidak dengan mudah mempercayai berita-berita tersebut.

"Diharapkan masyarakat mampu memeriksa dua hal, pertama apakah sumber berita valid atau tidak. Kedua, cek keaslian fakta dan fotonya. Kemudian kami pun mengharapkan masyarakat melaporkan hoaks ke kanal yang kami sediakan ada di nomor WA 08119224545 yang kami buka 24 jam," ajaknya dalam Keterangan Pers di media center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Kementerian Kominfo, Jakarta, Selasa (02/02/2021).



LAPORKAN HOAKS :

Sub Direktorat Pengendalian Konten Internet
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Lantai 8 Gedung Utama
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jalan Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta Pusat

Telepon: +62 21 3845786

Whatsapp: +62 8119224545

Email: aduankonten@kominfo.go.id



Ajak Pers Agar Ruang Digital Tetap Aman dan Produktif

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak insan pers untuk menjaga ruang digital tetap aman dan produktif. Secara khusus, Menteri Kominfo meminta insan pers untuk terus mewaspadaai infodemik yang mengisi ruang berita melalui kemasan hoaks, disinformasi, dan misinformasi.

“Dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, pers tetap harus mengedepankan fungsi utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tantangan digitalisasi justeru harus dilihat sebagai suatu peluang untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas mulianya

insan pers. Terlepas dari tingkat persaingan yang terus luar biasa, terlepas dari disrupsi teknologi, terlepas dari COVID-19,” ujarnya ketika memberikan sambutan dalam acara Konvensi Nasional Media Massa HPN 2021, dari Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (08/02/2021).

Oleh karena itu, menurut Menteri Kominfo diperlukan kerja bersama antara industri pers dan stakeholders dalam menciptakan tata kelola media yang agile melalui upaya diversifikasi produk-produk media, intensifikasi kualitas produk-produk jurnalisme, serta ekstensifikasi faktor-faktor penting dalam industri pers dan media.

“Hal tersebut harus terus kita upayakan agar industri pers dan media dapat selalu meningkatkan kualitasnya dan profesionalismenya,” jelasnya.

PORTAL
KOMINFO.GO.ID

HPN 2021, Momentum Sebarkan Informasi Positif Penanganan COVID-19

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 harus dijadikan sebagai ajang memperkuat jalinan kerja sama antara pemerintah dengan segenap insan pers. Menurut Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo hal itu terutama dalam menyebarluaskan informasi positif yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di tanah air.

“Menjadi instrumen penting untuk bersama-sama memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan penanganan Covid-19,” ujarnya dalam tayangan virtual Ngobrolin HPN 2021 di Tengah Pandemi C-19

dari Jakarta, Sabtu (30/01/2021). Dalam kegiatan yang dilaksanakan Monumen Pers Solo itu, Dirjen Widodo menilai sinergitas antara pemerintah dengan insan pers akan membawa efek yang positif terhadap perlawanan melawan wabah global ini. Menurutnya, terdapat dua hal yang berpotensi terpengaruh oleh kerjasama yang terjalin antar keduanya yakni sektor kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.

“Dari sisi kesehatan, informasi yang bersifat positif akan menekan jumlah kasus positif terinfeksi pandemi. Sehingga, hal tersebut mendorong upaya pemerintah dalam memutus penyebaran

wabah global ini secara efektif. Dari sisi ekonomi, informasi tentang kebijakan pemerintah yang telah optimal dalam membantu masyarakat yang terdampak. Dari mulai bantuan tunai hingga kredit bagi para pelaku UMKM yang terdampak,” jelasnya.

Dirjen IKP menyatakan melalui jalinan kerja sama antara keduanya akan menyebarkan setiap informasi positif dari sudut pandang optimisme. Karena, saat ini, asupan informasi yang bersifat seperti itu sangat dibutuhkan oleh khalayak ramai pada umumnya.





Dorong Tata Kelola, Standardisasi Telekomunikasi dan Pelindungan Data Pribadi

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mendorong tata kelola dan standarisasi telekomunikasi yang lebih inklusif dan menyeluruh di regional ASEAN.

"Tata Kelola telekomunikasi yang inklusif tentunya akan mendorong percepatan penggelaran infrastruktur jaringan 4G dan 5G untuk meningkatkan konektivitas nasional di masing-masing negara ASEAN," tegasnya melalui Sesi Dialog Virtual Menteri Digital ASEAN dengan International Telecommunication Union (ITU) dalam *1st ASEAN Digital Ministers' Meeting (ADGMIN)*, dari Jakarta, Jumat (22/01/21).

Selain itu, Menteri Kominfo menyatakan pentingnya pelindungan data pribadi dan keamanan data. "Data sekarang memiliki nilai ekonomi yang signifikan sehingga perlu dikelola dan digunakan dengan menjunjung prinsip kedaulatan data, yakni a *reciprocal, lawful, fair, and transparent manner*," tuturnya.

Menteri Johnny mengapresiasi peran ITU sebagai mitra ASEAN yang membantu percepatan transformasi digital di kawasan ASEAN. Selanjutnya, Menteri Johnny mengharapkan pertukaran praktik terbaik dan pengetahuan praktis melalui platform kolaborasi ASEAN-ITU yang diyakini bukan hanya akan memperkuat kerja sama Indonesia dengan ITU, tetapi juga mendukung realisasi ASEAN yang terkoneksi secara digital.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal ITU Houlin Zhao, para menteri digital ASEAN juga mengapresiasi ITU yang memberikan dukungan terus-menerus kepada ASEAN antara lain dalam pengembangan kota pintar berkelanjutan (*smart sustainable cities*) dan ekosistem 5G.

PORTAL
KOMINFO.GO.ID



WAH, VAKSINASI HARI INI KELIATANNYA DIDOMINASI LAKI-LAKI



WAH BAPAK KELIATANNYA SEMANGAT BANGET NIH MAU DIVAKSIN.

PERMISI..

SAYA SIH YAKIN BAPAK GAK ABIS BACA HOAKS YG 'ITU' KAN YAA?



EH? EMM.. GAAK KOK DOK..

WADUH APA DIA BISA BACA PIKIRANKUH?!!



WAH BAGUS DONG PAK, SOALNYA ADA JUGA YANG KEMAKAN HOAKS

KATANYA EFEK SAMPING VAKSIN BISA MEMPERBESAR ALAT VITAL PRIA. PADAHAL UMUMNYA HANYA BIKIN LAPAR DAN MUDAH KANTUK SELAMA BEBERAPA HARI



NANI?!!! TERNYATA ITU HOAKS?!!!

PADAHAL TADI UDAH SENENG BANGET



DOK, INI VAKSIN GAK BISA DIBATALIN YA DOK? KALO BESOK BESOK BOLEH GAK DOK?

MENDADAK MULES DOK.. MAU PULANG AJA

LOH KENAPA PAK?

REAL OR FAKE



1 [DISINFORMASI] Perusahaan Vaksin Merck Sebut Lebih Baik Melawan COVID-19 daripada Mendapatkan Vaksin

Penjelasan :

Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa perusahaan farmasi raksasa Amerika, Merck mengatakan lebih baik untuk melawan COVID-19 dan pulih secara alami daripada mendapatkan vaksinasi.

Dilansir dari Reuters Fact Check, klaim tersebut merupakan representasi yang keliru dari pernyataan Merck. Merck tidak pernah membuat pernyataan lebih baik melawan COVID-19 daripada mendapatkan vaksinasi. Adapun pernyataan yang dikeluarkan oleh Merck adalah, bahwa pihaknya akan berhenti mengembangkan dua formula vaksin COVID-19 yang sedang dikerjakannya. Penyebabnya, respons kekebalan tubuh yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari fase awal uji klinis kedua formula itu. Namun Merck menegaskan tetap akan berkomitmen dalam penelitian COVID-19 dan akan memberi fokus kepada dua potensi obat penyakit infeksi itu yang juga sedang dikembangkannya.



2 [HOAKS] Pendaftaran Vaksin COVID-19 WHO

Penjelasan :

Beredar sebuah pesan berantai mengatasnamakan World Health Organization (WHO), yang memberikan informasi terkait pendaftaran vaksin COVID-19 dengan menyertakan link yang diklaim sebagai link pendaftaran vaksin. Narasi pesan tersebut adalah "Organisasi Kesehatan Dunia memberikan vaksin COVID-19 gratis. Saya mendapat vaksin COVID-19 gratis, senang sekali. Keluarga dan teman-teman saya juga sudah divaksinasi. Anda harus mengajukan vaksinasi sesegera mungkin. Klik tautan untuk mengajukan vaksinasi. <https://www.swwa.cn/tiaoban.php?app=yimiao>".

Dilansir dari Cek Fakta Liputan6.com, diketahui bahwa informasi beserta link pendaftaran vaksin COVID-19 yang mengatasnamakan WHO pada pesan berantai tersebut adalah tidak benar dan bukan merupakan pesan yang dikeluarkan oleh WHO. Di Indonesia sendiri program vaksinasi COVID-19 hanya diselenggarakan oleh pemerintah dan untuk saat ini prioritas vaksin untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu. World Health Organization memberikan imbauan melalui Websitenya [who.int](https://www.who.int), bahwa masyarakat diharapkan berhati-hati terhadap kejahatan siber yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19, seperti pesan berantai ini.

4 [HOAKS] Bupati Pasuruan Alami Sakit Usai Suntik Vaksin COVID-19

Penjelasan :

Beredar informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa Bupati Pasuruan H.M. Irsyad Yusuf mengalami sakit setelah disuntik Vaksin COVID-19. Faktanya, dalam sambutannya pada saat akan melaksanakan suntik vaksin tahap kedua, kelanjutan dari pemberian vaksin pertama, Irsyad Yusuf membantah informasi yang beredar dengan mengatakan "tidak benar kalau habis disuntik vaksin itu saya sakit, malahan inginnya makan terus, buktinya, ini saya datang untuk penyuntikan dosis kedua kelanjutan dari pemberian vaksin pertama yang dilaksanakan pada 28 Januari 2021. Sekali lagi tidak ada keluhan efek samping yang berarti, keluhannya hanya ingin makan saja. Saya juga sampaikan terima kasih atas jajaran forkopimda yang dengan sukarela menerima vaksin dosis kedua ini sebagai teladan dan contoh untuk masyarakat lainnya, bahwa dalam suntik vaksin COVID-19 tidak ada efek samping yang membahayakan".

3 [HOAKS] Vaksin COVID-19 Sebabkan Lamban Berpikir dan Susah Menghafal

Penjelasan :

Sebuah unggahan beredar di Facebook yang menyebutkan vaksin COVID-19 dapat menyebabkan gangguan pada otak sehingga membuat lamban berpikir dan sulit menghafal. Unggahan tersebut disertai dengan tangkapan status seseorang yang diklaim merupakan apoteker.

Faktanya, menurut Ahli Patologi Klinis yang juga Direktur RS UNS Tonang Dwi Ardyanto, vaksin COVID-19 menyebabkan gangguan otak seperti lamban berpikir dan sulit menghafal adalah klaim yang tidak benar. Lebih lanjut Tonang mencontohkan, program vaksinasi yang sudah berjalan puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Yang jelas, anak-anak kita, yang bahkan kurang dari 1 tahun, sudah rutin mendapatkan vaksin termasuk yang metode pembuatannya sama dan sudah terbukti nyata, yaitu *inactivated vaccine*.



5

[Hoaks] Pfizer dan Moderna Bukan Vaksin Melainkan “Sistem Operasi Dirancang untuk Manusia” dan “Agen Biologis”

Penjelasan :

Beredar sebuah postingan menggunakan Bahasa Inggris di media sosial, yang mengklaim bahwa hanya Pemerintah yang menyebut Vaksin Pfizer-BioNTech dan Moderna COVID-19 sebagai “vaksin”, dan justru perusahaan mereka sendiri menyebutnya sebagai “Agen Biologis” dan “sistem operasi yang dirancang untuk memprogram manusia”.

Faktanya, baik perusahaan Pfizer dan Moderna sama-sama menyebutnya sebagai Vaksin COVID-19. Dilansir dari Reuters.com, Badan Pengawas Obat dan Makanan AS telah meninjau data keamanan dari uji klinis dan memberikan otorisasi penggunaan darurat untuk kedua vaksin tersebut. Merujuk pada situs website Moderna, yang dimaksudkan dengan “Sistem Operasi” adalah pembuatan platform teknologi vaksin yang berfungsi sangat mirip dengan sistem operasi pada komputer agar dapat dipasang dan dimainkan secara bergantian dengan program yang berbeda. Dalam kasus ini, “program” adalah obat mRNA dan aplikasinya adalah urutan mRNA unik yang mengkode protein. Sementara itu, Dervila Keane, juru bicara Pfizer, menegaskan bahwa Pfizer telah diberikan otorisasi sementara di lebih dari 50 negara dan telah menunjukkan tingkat kemanjuran Vaksin COVIDs-19 sebesar 95 persen.



6 [DISINFORMASI] Vaksin Covid-19 memiliki Chip yang dapat Melacak Keberadaan Orang yang Telah Disuntikan Vaksin

Penjelasan :

Telah beredar sebuah video berdurasi 2.04 Menit pada platform media sosial, video tersebut menampilkan cuplikan video penjelasan Ketua Tim Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir terkait Barcode vaksin COVID-19, beserta cuplikan video lain yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 yang menjadi program Pemerintah Indonesia saat ini memiliki komponen manajemen sistem yang bisa melacak lokasi keberadaan setiap orang yang telah disuntik vaksin COVID-19.

Faktanya, klaim narasi pada video tersebut yang menyebutkan bahwa orang yang telah disuntik vaksin dapat dilacak keberadaannya adalah tidak benar. Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menyatakan bahwa informasi vaksin COVID-19 mengandung chip atau komponen yang mampu mendeteksi keberadaan orang setelah disuntikkan adalah berita bohong alias hoaks. Barcode yang ada di produk vaksin COVID-19 merupakan kode untuk pelacakan distribusi produk vaksin, dan tidak menempel di dalam orang yang menerima suntik vaksin tersebut.



[DISINFORMASI] Diagram Chip 5G pada Vaksin COVID-19

Penjelasan :

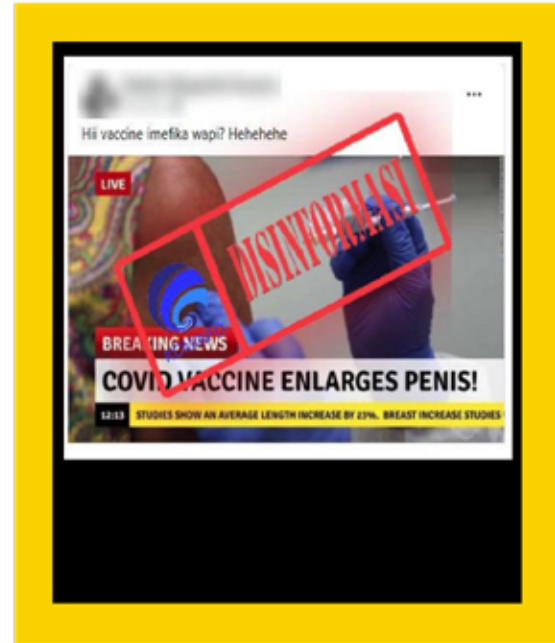
Beredar sebuah foto pada postingan di sosial media Twitter yang diklaim sebagai diagram chip 5G pada vaksin COVID-19. Setelah ditelusuri, foto yang diklaim sebagai diagram chip 5G pada vaksin COVID-19 adalah tidak benar. Faktanya dikutip dari Inet.detik.com, foto tersebut merupakan skema untuk pedal Boss Metal Zone MT-2, yang biasa digunakan gitaris untuk menambah efek dan distorsi pada suara gitar. Gambar tersebut telah diedit untuk menambahkan tulisan 'COVID-19 5G CHIP DIAGRAM' dan '5G frequency'. Padahal frekuensi 5G berbeda tergantung pada spektrum radionya.

8 [DISINFORMASI] Vaksin Covid-19 memiliki Chip yang dapat Melacak Keberadaan Orang yang Telah Disuntikan Vaksin

Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook sebuah gambar hasil tangkapan layar dari siaran langsung berjudul "Vaksin COVID-19 Memperbesar Ukuran Penis" (Covid Vaccine Enlarges Penis!). Disebutkan pula bahwa penelitian menunjukkan rata-rata panjang penis meningkat 23 persen.

Dikutip dari Antaranews.com, menurut pemeriksaan fakta Pesacheck.org, unggahan yang beredar di Facebook tersebut adalah hoaks. Foto itu pertama kali dibuat dengan menggunakan "Break Your Own News" dengan tujuan parodi saja. "Break Your Own News" adalah situs untuk membuat meme yang menggunakan format "breaking news". Pengguna dengan mudah tinggal menempelkan foto serta membuat judul yang diinginkan. Situs itu sebelumnya telah mengimbau pengguna untuk berhati-hati atas apa yang dibuat dan kemungkinan unggahan tersebut disebarluaskan.



9 [DISINFORMASI] Vaksin Sinovac Berbahaya, Virus Mati Bisa Hidup Lagi

Penjelasan :

Beredar narasi di media sosial yang mengklaim bahwa virus mati yang terdapat di dalam vaksin Sinovac bisa hidup lagi.

Dilansir dari health detik.com, vaksin COVID-19 Sinovac dikembangkan dengan metode inactivated. Artinya virus yang berada dalam vaksin sudah dimatikan dan tidak mengandung virus hidup atau yang dilemahkan. Sementara itu, vaksin Sinovac menggunakan partikel virus SARS-CoV-2 yakni virus Corona penyebab COVID-19, yang telah dimatikan, atau genomnya telah rusak. Partikel virus yang sudah dimatikan ini nantinya akan berinteraksi dengan sistem kekebalan tubuh tanpa risiko penyakit serius. WHO juga menyebut metode inactivated virus ini sebagai salah satu dari tujuh teknologi pengembangan vaksin.

10 [HOAKS] Berbahaya Vaksin Mengandung Polisorbat 80

Penjelasan :

Beredar postingan di media sosial Facebook, tentang bahaya Vaksin karena mengandung Polisorbat 80. Dalam postingannya terdapat gambar dengan narasi "Rahasia kotor Vaksin!! Polysorbate 80. Pengemulsi kimiawi ini menekan sistem kekebalan dan melewati sawar darah otak yang dapat menyebabkan anafilaksis, radang otak dan kemandulan."

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim postingan yang menyebutkan Vaksin COVID-19 yang mengandung polisorbat berbahaya adalah tidak benar. Faktanya isu tersebut sudah pernah beredar sejak 2017. Namun postingan serupa marak kembali dibagikan setelah Vaksin COVID-19 mendapat izin darurat (EUA) di beberapa negara. Menurut data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) Vaksin COVID-19 buatan Pfizer dan Moderna tidak mengandung Polisorbat 80.

“

Sistem Satu Data Vaksinasi COVID -19 mengintegrasikan data lintas kementerian dan lembaga untuk menghasilkan sistem yang komprehensif, baik untuk tahap pendaftaran, distribusi, pelaksanaan, hingga monitoring pelaksanaan vaksinasi pertama dan kedua. ”

Johnny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika RI
Puskesmas Jurang Mangu, Tangsel
12 Januari 2021

